



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR PUSAT

# LAPORAN KEUANGAN

Unit Akuntansi Pembantu  
Pengguna Anggaran Eselon I

AUDITED | Tahun Anggaran 2022

---

# KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>1</b>
<b>I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>	<b>3</b>
<b>II. NERACA</b>	<b>4</b>
<b>III. LAPORAN OPERASIONAL</b>	<b>5</b>
<b>IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>	<b>6</b>
<b>V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>7</b>
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	58
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	65
F. Pengungkapan Penting Lainnya	69
<b>VI. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-E1</b>	
A. LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan	
B. LRA Belanja dan Pengembalian Belanja	
C. LRA Belanja Dalam Rangka COVID-19	
D. Neraca Percobaan Kas dan Akrual	
E. Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
F. Daftar Saldo Rekening Pemerintah	
G. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	
H. Daftar Satuan Kerja Lingkup DJPb	
I. Telaah Laporan Keuangan	



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200 3812436 FAKSIMILE 3846402, SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023  
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan



# RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Audited Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp36.191.165.857.439,00 atau mencapai 109.95% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp32.917.166.553.000,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.611.414.506.019,00 atau mencapai 99.85% dari alokasi anggaran sebesar Rp37.669.071.894.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp55.767.965.905.733,00; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp29.656.634.220.125,00; Investasi Jangka Panjang (neto) sebesar Rp7.772.544.483.121,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp10.930.613.300.780,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar (Rp267.831.599,00) dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp7.407.906.070.108,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15.114.183.841.116,00 dan Rp40.653.782.064.617,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.218.862.875.413,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp34.612.734.485.180,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.606.128.390.233,00. Jumlah surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp96.211.263.310,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp1.702.339.653.543,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp38.057.945.123.283,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp1.702.339.653.543,00 kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas defisit Rp212.709.809.697,00 ditambah lain-lain sebesar defisit Rp19.078.537.695,00 ditambah transaksi antar entitas sebesar surplus Rp1.125.285.635.183,00 sehingga Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp2.595.836.941.334,00 dan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.653.782.064.617,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022		% thd Angg 2022	31 DESEMBER 2021		% thd Angg 2021	% REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN</b>								
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	32,917,166,553,000	36,191,165,857,439	109.95	13,851,300,615,000	72,948,278,476,689	526.65	49.61
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>32,917,166,553,000</b>	<b>36,191,165,857,439</b>	<b>109.95</b>	<b>13,851,300,615,000</b>	<b>72,948,278,476,689</b>	<b>526.65</b>	<b>49.61</b>
<b>BELANJA</b>								
<b>Belanja Operasi</b>	B.2.							
Belanja Pegawai	B.3	289,080,277,000	286,815,947,635	99.22	515,248,588,000	512,598,951,587	99.49	55.95
Belanja Barang	B.4	37,207,473,778,000	37,153,042,889,627	99.85	54,457,539,541,000	54,280,301,532,522	99.67	68.45
Belanja Modal	B.5	172,517,839,000	171,555,668,757	99.44	451,819,497,000	444,094,273,140	98.29	38.63
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>37,669,071,894,000</b>	<b>37,611,414,506,019</b>	<b>99.85</b>	<b>55,424,607,626,000</b>	<b>55,236,994,757,249</b>	<b>99.66</b>	<b>68.09</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan



# NERACA

## II. NERACA

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK/TURUN	% NAIK (TURUN)
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	7,721,142	-	7,721,142	0.00%
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	5,882,390,135	1,308,243,930	4,574,146,205	349.64%
Kas Pada Badan Layanan Umum	C.3	24,557,304,394,286	26,523,886,036,073	(1,966,581,641,787)	-7.41%
Investasi Jangka Pendek-BLU	C.4	3,057,426,608,776	1,365,253,308,776	1,692,173,300,000	123.95%
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.5	1,559,968,031,629	1,976,945,174,391	(416,977,142,762)	-21.09%
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.6	1,019,845,910	2,820,864,145	(1,801,018,235)	-63.85%
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.7	457,355,338,948	321,356,092,117	135,999,246,831	42.32%
Piutang Bukan Paiaik	C.8	412,966,823	270,582,742	142,384,081	52.62%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Paiaik	C.9	(129,878,993)	(129,167,073)	(711,920)	0.55%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.9	12,000,000	46,999,200	(34,999,200)	-74.47%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.10	(60,000)	(234,996)	174,996	-74.47%
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Persediaan	C.10	17,374,861,469	19,810,188,939	(2,435,327,470)	-12.29%
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>29,656,634,220,125</b>	<b>30,211,626,295,744</b>	<b>(554,992,075,619)</b>	<b>-1.84%</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
Dana Bergulir	C.12	1,332,605,202,696	1,388,002,223,013	(55,397,020,317)	0.00%
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	C.13	6,640,289,050,977	5,496,601,629,976	1,143,687,421,001	20.81%
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	C.14	(167,148,325,297)	(98,621,228,223)	(68,527,097,074)	69.49%
Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	C.15	(33,201,445,255)	(34,959,337,208)	1,757,891,953	-
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>7,772,544,483,121</b>	<b>6,751,023,287,558</b>	<b>1,019,763,303,610</b>	<b>15.11%</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.16	1,907,443,863	2,062,714,669	(155,270,806)	-7.53%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.17	(1,639,612,264)	(2,021,919,669)	382,307,405	-18.91%
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>267,831,599</b>	<b>40,795,000</b>	<b>227,036,599</b>	<b>556.53%</b>
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	C.18	9,072,828,813,486	9,302,751,404,486	(229,922,591,000)	-2.47%
Peralatan dan Mesin	C.19	1,636,741,890,276	1,638,971,189,833	(2,229,299,557)	-0.14%
Gedung dan Bangunan	C.20	2,061,188,950,999	2,010,588,866,751	50,600,084,248	2.52%
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.21	1,114,536,000	12,814,117,196	(11,699,581,196)	-91.30%
Aset Tetap Lainnya	C.22	12,056,073,376	11,878,464,671	177,608,705	1.50%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.23	13,133,398,275	1,154,066,062	11,979,332,213	1038.01%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.24	(1,866,450,361,632)	(1,706,493,328,697)	(159,957,032,935)	9.37%
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.25	-	-	-	0.00%
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>10,930,613,300,780</b>	<b>11,271,664,780,302</b>	<b>(341,051,479,522)</b>	<b>-3.03%</b>
<b>ASET LAINNYA</b>					
Aset Tak Berwujud	C.26	846,281,903,677	817,986,939,307	28,294,964,370	3.46%
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.27	7,118,197,617,793	5,129,978,846,011	1,988,218,771,782	38.76%
Aset Lain-Lain	C.28	25,462,113,898	24,540,225,420	921,888,478	3.76%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C.29	(582,035,565,260)	(525,797,608,468)	(56,237,956,792)	10.70%
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>7,407,906,070,108</b>	<b>5,446,708,402,270</b>	<b>1,961,197,667,838</b>	<b>36.01%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>55,767,965,905,733</b>	<b>53,681,063,560,874</b>	<b>2,086,902,344,859</b>	<b>3.88%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	21,556,184,910	3,606,523,743,224	(3,584,967,558,314)	-99.40%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.32	-	31,307,914	(31,307,914)	-100.00%
Pendapatan Diterima di Muka	C.33	1,505,831,273	1,968,318,378	(462,487,105)	-23.50%
Uang Muka dari KPPN	C.34	7,721,142	-	7,721,142	0.00%
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.35	22,232,325	12,369,075	9,863,250	79.74%
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>23,091,969,650</b>	<b>3,608,535,738,591</b>	<b>(3,585,443,768,941)</b>	<b>-99.36%</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang jangka panjang BLU kepada BUN	C.36	15,091,091,871,466	12,014,582,699,000	3,076,509,172,466	25.61%
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>15,091,091,871,466</b>	<b>12,014,582,699,000</b>	<b>3,076,509,172,466</b>	<b>25.61%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>15,114,183,841,116,000</b>	<b>15,623,118,437,591</b>	<b>(508,934,596,475)</b>	<b>-3.26%</b>
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas	C.37	40,653,782,064,617	38,057,945,123,283	2,595,836,941,334	6.82%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>40,653,782,064,617</b>	<b>38,057,945,123,283</b>	<b>2,595,836,941,334</b>	<b>6.82%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>55,767,965,905,733</b>	<b>53,681,063,560,874</b>	<b>2,086,902,344,859</b>	<b>3.89%</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan



# LAPORAN OPERASIONAL

## III. LAPORAN OPERASIONAL

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	36,218,862,875,413	72,916,068,314,437
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>36,218,862,875,413</b>	<b>72,916,068,314,437</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	419,768,971,328	610,708,180,838
Beban Persediaan	D.3	19,128,041,784	22,060,897,998
Beban Barang dan Jasa	D.4	33,418,804,649,147	55,198,191,964,635
Beban Pemeliharaan	D.5	239,957,908,760	210,155,946,012
Beban Perjalanan Dinas	D.6	167,593,547,085	118,827,992,075
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	298,675,373,107	299,942,033,624
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	48,805,993,969	26,320,943,845
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>34,612,734,485,180</b>	<b>56,486,207,959,027</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>1,606,128,390,233</b>	<b>16,429,860,355,410</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(2,764,411,127)	(28,455,298,398)
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		98,975,674,437	36,471,632,952
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.9	<b>96,211,263,310</b>	<b>8,016,334,554</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>1,702,339,653,543</b>	<b>16,437,876,689,964</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	D.10	<b>1,702,339,653,543</b>	<b>16,437,876,689,964</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan



# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK/TURUN	%
EKUITAS AWAL	E.1	38,057,945,123,283	22,580,761,526,507	15,477,183,596,776	68.54%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1,702,339,653,543	16,437,876,689,964	(14,735,537,036,421)	-111.55%
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(231,788,347,392)	298,059,042,543	(529,847,389,935)	-177.77%
PENYESUAIAN NILAIASET		-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3	117,846,300	-	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4	-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	(212,827,655,997)	55,889,280,288	(268,716,936,285)	-480.80%
LAIN-LAIN	E.6	(19,078,537,695)	242,169,762,255	(261,248,299,950)	-107.88%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	1,125,285,635,183	(1,258,752,135,731)	2,384,037,770,914	-52.80%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2,595,836,941,334	15,477,183,596,776	(12,881,346,655,442)	-120.15%
EKUITAS AKHIR	E.8	40,653,782,064,617	38,057,945,123,283	2,595,836,941,334	6.82%

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

#### A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuknya tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia, ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

Selaku institusi Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi *reorganisasi* dengan "terbentuknya" tiga organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional, suatu Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. "*Core function*"nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara, pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara, serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat teknis pada kantor pusat serta Kantor Wilayah DJPB dan KPPN pada kantor instansi vertikal. Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun merupakan titik awal sinergi organisasi baru tersebut.

Landasan Kegiatan Operasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas bidang perbendaharaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen dengan visi **“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”/ “To be a world-class state treasury manager.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien dan optimal;
- Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
- Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, professional dan modern.

Susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;  
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;  
Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.

6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Selain itu terdapat organisasi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Jumlah entitas akuntansi adalah 216 satuan kerja yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 98 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, 81 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2, dan 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus. Selain satker vertikal tersebut pada DJPb terdapat juga 4 satker Kantor Pusat dan 3 Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga total satuan kerja DJPb adalah **223** satuan kerja. Rincian entitas tersebut tersaji dalam lampiran Laporan Keuangan. Tugas unit vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;  
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 dan A2;  
Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah;  
Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran

anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan;  
Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi;  
Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga terdapat entitas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang koordinasi pelaporan keuangannya dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mempunyai tugas yaitu:

1. Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN):  
Mempunyai tugas menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui integrasi sistem manajemen keuangan negara, penerapan akuntansi akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan kemudahan akses bagi pengguna. SPAN akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Satuan Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP):  
Mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
3. Satuan Kerja Komite Investasi Pemerintah (KIP)
4. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS):  
Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP):

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH):

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lokasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkedudukan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta Pusat.

## A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2017 satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan *Piloting* aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

### A.3 Basis Akuntansi

*Basis  
Akuntansi*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.4 Dasar Pengukuran

*Dasar  
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### A.5 Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan  
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

#### **A.5.1 Pendapatan- LRA**

*Pendapatan-  
LRA*

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### **A.5.2 Pendapatan- LO**

*Pendapatan-  
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Pengelolaan BMN
  - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***A.5.3 Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***A.5.4 Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***A.5.5 Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***A.5.5.1 Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### A.5.5.2 Aset Tetap

##### Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pada tahun 2018 perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap mengalami perubahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Perubahan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) peralatan dan mesin pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari

- Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) gedung dan bangunan pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - e. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.
  - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
  - Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

#### A.5.5.3 Piutang Jangka Panjang

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### A.5.5.4 Investasi Jangka Panjang

*Investasi  
Jangka  
Panjang*

- Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU.

- Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca.
- Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan penginvestasian diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan /Diinvestasikan menjadi Investasi Non Permanen Lainnya di Neraca.

#### A.5.5.5 Aset Lainnya

##### *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Cara Perolehan Aset Tak Berwujud:

- a. Pembelian;
- b. Pengembangan secara internal;
- c. Pertukaran;
- d. Kerjasama;
- e. Donasi/hibah;
- f. Warisan Budaya/Sejarah.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud:

- a. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas;
- b. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas.

#### Amortisasi Aset Tak Berwujud:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP berbasis Akrual dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### A.5.6 Kewajiban

##### *Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Kewajiban pada satuan kerja BPDP Kelapa Sawit diatur kebijakan sebagai berikut :
  - g. Utang atas permintaan kelebihan bayar pungutan oleh eksportir (lebih pungut) diakui apabila telah ada surat ketetapan lebih bayar dari BPDPKS atas permohonan pengembalian kelebihan bayar dari eksportir.
  - h. Utang atas penyaluran biodiesel diakui pada saat Badan Usaha

Bahan Bakar Nabati (BU BBN) menyampaikan tagihan kepada BPDPKS yang nilainya telah diverifikasi oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

- i. Utang terhadap biaya riset diakui pada saat perjanjian riset ditandatangani oleh BPDPKS dan Lembaga riset sebesar pencairan Tahap I. Pengakuan utang atas biaya riset tahap II dan III diakui sebesar hasil monitoring tahap sebelumnya.
- j. Utang terhadap biaya surveyor dicatat apabila telah ada tagihan dari surveyor yang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) dan telah diverifikasi oleh PPK.

#### A.5.7 Ekuitas

*Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### A.5.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia	100%

	Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	----------------------------	--

*Penyusutan  
Aset Tetap*

### A.5.9 Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrua

#### A.5.10 Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Akuntansi  
Penanganan  
Pandemi  
COVID-19

#### A.6 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan;
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
3. Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
4. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19

secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa;

5. Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama Periode Tahun Anggaran 2022, pagu anggaran lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya kenaikan belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Perubahan pagu berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

URAIAN	31 Desember 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan	Rp 32,917,161,053,000	Rp 32,917,166,553,000
<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 32,917,161,053,000</b>	<b>Rp 32,917,166,553,000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	Rp 512,608,529,000	Rp 289,080,277,000
Belanja Barang	Rp 750,185,408,000	Rp 720,053,007,000
Belanja Modal	Rp 114,907,802,000	Rp 166,612,273,000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 1,377,701,739,000</b>	<b>Rp 1,175,745,557,000</b>
<b>Belanja BLU</b>		
Belanja Barang-BLU	Rp 5,955,572,184,000	Rp 36,487,420,771,000
Belanja Modal-BLU	Rp 4,411,391,000	Rp 5,905,566,000
<b>Jumlah Belanja-BLU</b>	<b>Rp 5,959,983,575,000</b>	<b>Rp 36,493,326,337,000</b>
<b>Total Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 7,337,685,314,000</b>	<b>Rp 37,669,071,894,000</b>

Sedangkan perubahan pagu estimasi pendapatan anggaran per kelompok pendapatan dan pagu anggaran belanja per jenis belanja adalah sebagai berikut:

**a. Pendapatan**

URAIAN	31 DESEMBER 2022		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	32,709,164,053,000	32,709,164,053,000	0
Pendapatan Hibah BLU	40,000,000,000	40,000,000,000	0
Pendapatan BLU Lainnya	158,182,000,000	158,182,000,000	0
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	5,264,000,000	5,269,500,000	5,500,000
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	0
Pendapatan Denda	25,000,000	25,000,000	0
Pendapatan Lain-Lain	4,526,000,000	4,526,000,000	0
<b>Pendapatan</b>	<b>32,917,161,053,000</b>	<b>32,917,166,553,000</b>	<b>5,500,000</b>

**b. Belanja**

URAIAN	31 DESEMBER 2022		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
<b>Belanja</b>			
Belanja Pegawai			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	489,011,812,000	262,621,380,000	(226,390,432,000)
Belanja Lembur	23,596,717,000	26,458,897,000	2,862,180,000
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>512,608,529,000</b>	<b>289,080,277,000</b>	<b>(223,528,252,000)</b>

URAIAN	31 Desember 2022		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
Belanja Barang Non BLU			
Belanja Barang Operasional	170,249,070,000	174,053,406,000	3,804,336,000
Belanja Barang Non Operasional	37,007,185,000	36,636,518,000	(370,667,000)
Belanja Barang Persediaan	18,022,675,000	18,366,495,000	343,820,000
Belanja Jasa	132,012,550,000	105,143,231,000	(26,869,319,000)
Belanja Pemeliharaan	288,810,577,000	238,427,198,000	(50,383,379,000)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	103,708,351,000	146,010,633,000	42,302,282,000
Belanja Perjalanan Luar Negeri	375,000,000	1,415,526,000	1,040,526,000
<b>Jumlah Belanja Barang Non BLU</b>	<b>750,185,408,000</b>	<b>720,053,007,000</b>	<b>(30,132,401,000)</b>
Belanja Modal Non BLU			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,208,409,000	73,629,608,000	12,421,199,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53,699,393,000	65,356,561,000	11,657,168,000
Belanja Modal Lainnya	0	27,626,104,000	27,626,104,000
<b>Jumlah Belanja Modal Non BLU</b>	<b>114,907,802,000</b>	<b>166,612,273,000</b>	<b>51,704,471,000</b>
<b>Jumlah Belanja Non BLU</b>	<b>1,377,701,739,000</b>	<b>1,175,745,557,000</b>	<b>(201,956,182,000)</b>
<b>Belanja BLU</b>			
Belanja Barang-BLU	5,955,572,184,000	36,487,420,771,000	30,531,848,587,000
Belanja Modal-BLU	4,411,391,000	5,905,566,000	1,494,175,000
<b>Jumlah Belanja Non BLU</b>	<b>5,959,983,575,000</b>	<b>36,493,326,337,000</b>	<b>30,533,342,762,000</b>
<b>Total Jumlah Belanja</b>	<b>7,337,685,314,000</b>	<b>37,669,071,894,000</b>	<b>Rp 30,331,386,580,000</b>

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2022	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
4802	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	Rp 728,824,000	Rp 563,789,000
4803	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 4,082,877,000	Rp 4,034,494,000
4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	Rp 4,130,990,000	Rp 4,487,397,000
4805	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp 35,328,000	Rp 20,193,000
4806	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 587,110,000	Rp 517,799,000
6212	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	Rp 42,777,297,000	Rp 42,376,076,000
6213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 11,555,937,000	Rp 11,276,365,000
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp 1,165,614,000	Rp 1,262,072,000
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp 3,706,155,000	Rp 3,662,824,000
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 8,346,244,000	Rp 8,321,637,000
	<b>Jumlah Belanja Program CD</b>	<b>Rp 77,116,376,000</b>	<b>Rp 76,522,646,000</b>
WA	Program Dukungan Manajemen		
4711	Legislasi dan Litigasi	Rp 123,664,000	Rp 272,872,000
4715	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp 436,444,688,000	Rp 479,685,875,000
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 2,794,240,000	Rp 3,330,369,000
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 574,242,229,000	Rp 365,604,804,000
4722	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp 1,649,222,000	Rp 1,613,693,000
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 278,878,820,000	Rp 239,307,181,000
4716	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp -	Rp 34,000,000
	<b>Jumlah Belanja Program WA</b>	<b>Rp 1,294,132,863,000</b>	<b>Rp 1,089,848,794,000</b>

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2022	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	Rp 5,737,450,257,000	Rp 36,184,173,419,000
4836	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp 25,468,225,000	Rp 26,728,508,000
4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 71,297,027,000	Rp 71,406,678,000
4838	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp 1,795,288,000	Rp 1,286,952,000
4839	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 1,439,460,000	Rp 2,862,700,000
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	Rp 22,034,698,000	Rp 22,034,698,000
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	Rp 19,685,811,000	Rp 78,549,762,000
4716	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp 5,905,295,000	Rp 10,069,725,000
4717	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp 11,869,056,000	Rp 17,310,936,000
4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 24,799,750,000	Rp 40,520,541,000
4721	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 37,295,103,000	Rp 37,438,813,000
4723	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp 90,336,000	Rp 90,336,000
4724	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp 624,414,000	Rp 624,414,000
4726	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
4727	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 128,855,000	Rp 128,855,000
	<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>Rp 5,959,983,575,000</b>	<b>Rp 36,493,326,337,000</b>
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
6213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	Rp -	Rp 2,423,835,000
	<b>Jumlah Belanja Program CD</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2,423,835,000</b>
WA	Program Dukungan Manajemen		
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1,522,500,000	Rp 1,733,282,000
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 4,930,000,000	Rp 5,217,000,000
	<b>Jumlah Belanja Program WA</b>	<b>Rp 6,452,500,000</b>	<b>Rp 6,950,282,000</b>
	<b>Jumlah Belanja Hibah Luar Negeri</b>	<b>Rp 6,452,500,000</b>	<b>Rp 9,374,117,000</b>

## B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan  
Rp36.191.165.857.439,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp36.191.165.857.439,00** atau mencapai **109,95%** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp32.917.166.553.000,00**. Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2022		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Usaha Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp 17,000,000	Rp 102,233,000	601.37%
Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 30,335,674	0.00%
Pendapatan dari Penjualan Per-alatan dan Mesin	Rp 2,019,007,000	Rp 2,476,184,882	122.64%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp 816,000,000	Rp 2,093,793,030	256.59%
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp 2,417,493,000	Rp 2,426,826,581	100.39%

Uraian	31 DESEMBER 2022		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Usaha Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp 17,000,000	Rp 102,233,000	601.37%
Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 30,335,674	0.00%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 2,019,007,000	Rp 2,476,184,882	0.00%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp 816,000,000	Rp 2,093,793,030	256.59%
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp 2,417,493,000	Rp 2,426,826,581	100.39%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	Rp -	Rp 166,092,939	0.00%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	0.00%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 25,000,000	Rp 476,100,615	1904.40%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 205,000,000	Rp 333,195,712	162.53%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 95,000,000	Rp 116,929,180	123.08%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 1,476,000,000	Rp 4,436,052,418	300.55%
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Rp 2,750,000,000	Rp 1,388,743,887	50.50%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp 92,000,000	0.00%
<b>Sub total</b>	<b>Rp 9,820,500,000</b>	<b>Rp 14,138,487,918</b>	<b>143.97%</b>
Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Investasi	Rp 316,617,053,000	Rp 212,890,810,827	67.24%
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 32,390,547,000,000	Rp 34,715,185,248,903	107.18%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Rp 158,182,000,000	Rp 1,073,094,199,995	678.39%
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp -	Rp 99,798,661,210	0.00%
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	Rp 2,000,000,000	Rp 4,023,291,037	201.16%
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang	Rp 40,000,000,000	Rp 71,485,033,447	178.71%
Pendapatan Lain-lain BLU	Rp -	Rp 608,657,277	0.00%
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 32,907,346,053,000</b>	<b>Rp 36,177,085,902,696</b>	<b>109.94%</b>
Pengembalian Pendapatan	Rp -	Rp 58,533,175	0.00%
<b>Jumlah Netto</b>	<b>Rp 32,917,166,553,000</b>	<b>Rp 36,191,165,857,439</b>	<b>109.95%</b>

Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **50,39%** persen dibandingkan realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penurunan pendapatan secara signifikan disebabkan turunnya pendapatan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU, yaitu Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini disebabkan karena pelarangan sementara ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) oleh Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached dan Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* yang berlaku mulai 28 April s.d. 22 Mei 2022. Larangan sementara Ekspor CPO tersebut dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia setelah sempat mengalami kelangkaan cukup lama mulai awal tahun 2022 disertai harganya yang mengalami peningkatan sangat signifikan.

Selain itu, perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, dan berlaku mulai tanggal 1 November 2022 dimana tarif tertinggi sebesar USD 240/MT untuk pengenaan harga CPO sama dengan atau lebih dari USD

800/ton atau lebih rendah dibandingkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022 dengan tarif tertinggi sebesar USD 375/MT untuk pengenaan harga CPO sama dengan atau lebih dari USD 750/ton sehingga sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (424138) sebesar Rp34.715.185.248.903,00 atau 107,18 persen dari estimasi pendapatannya.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN)%
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	Rp 7,129,373,167	Rp 9,000,522,549	-20.79%
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	Rp 166,092,939	Rp 48,022,740	245.86%
Pendapatan Denda	Rp 476,100,615	Rp 1,407,412,043	-66.17%
Pendapatan Lain-Lain	Rp 6,366,921,197	Rp 18,128,946,490	-64.88%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 14,138,487,918</b>	<b>Rp 28,584,903,822</b>	<b>-50.54%</b>
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU	Rp 34,932,099,350,767	Rp 71,872,413,484,049	-51.40%
Pendapatan Hibah BLU	Rp 71,485,033,447	Rp 7,363,097,606	0.00%
Pendapatan BLU Lainnya	Rp 1,173,501,518,482	Rp 1,039,952,018,066	12.84%
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 36,177,085,902,696</b>	<b>Rp 72,919,728,599,721</b>	<b>-50.39%</b>
Pengembalian Pendapatan	Rp 58,533,175	Rp 35,026,854	0.00%
<b>Jumlah Netto</b>	<b>Rp 36,191,165,857,439</b>	<b>Rp 72,948,278,476,689</b>	<b>-50.39%</b>

## B.2. REALISASI BELANJA

*Realisasi Belanja*  
Rp37.611.414.506.019,00

Realisasi Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp37.611.414.506.019,00** atau **99,85%** (termasuk realisasi belanja satker BLU) dari anggaran belanja sebesar **Rp37.669.071.894.000,00**. Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah pengembalian belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar **Rp296.870.161,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022*

URAIAN	31 DESEMBER 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	Rp 289,080,277,000	Rp 286,876,871,853	99.24
Belanja Barang	Rp 720,053,007,000	Rp 706,380,398,640	98.10
Belanja Modal	Rp 166,612,273,000	Rp 166,163,164,864	99.73
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1,175,745,557,000</b>	<b>Rp 1,159,420,435,357</b>	<b>98.61</b>
Belanja Barang-BLU	Rp 36,487,420,771,000	Rp 36,446,898,436,930	99.89
Belanja Modal-BLU	Rp 5,905,566,000	Rp 5,392,503,893	91.31
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 36,493,326,337,000</b>	<b>Rp 36,452,290,940,823</b>	<b>99.89</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 296,870,161	0.00
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 37,669,071,894,000</b>	<b>Rp 37,611,414,506,019</b>	<b>99.85</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

### Komposisi Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2022



Terhadap pagu dan realisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersebut, terdapat pagu anggaran sebesar **3.351.474.000,00** dan realisasi anggaran sebesar **Rp3.133.243.741,00** untuk penanganan pandemi COVID-19 yang telah menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut.

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Khusus Penanganan COVID-19 per 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1,483,817,000	Rp 1,467,554,020	98.90
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 572,821,000	Rp 564,503,839	98.55
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 936,242,000	Rp 841,337,404	89.86
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,992,880,000</b>	<b>Rp 2,873,395,263</b>	<b>96.01</b>
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 194,450,000	Rp 133,466,478	68.64
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 164,144,000	Rp 127,282,000	
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 358,594,000</b>	<b>Rp 260,748,478</b>	<b>72.71</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 900,000	0.00
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 3,351,474,000</b>	<b>Rp 3,133,243,741</b>	<b>93.49</b>

Sedangkan realisasi belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut sumber dana/program/kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2022	
		Anggaran	Realisasi
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
4802	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	Rp 563,789,000	Rp 555,959,699
4803	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 4,034,494,000	Rp 3,948,026,855
4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	Rp 4,487,397,000	Rp 4,444,489,291
4805	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp 20,193,000	Rp 18,635,000
4806	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 517,799,000	Rp 495,029,000

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2022	
		Anggaran	Realisasi
6212	Komunikasi Edukasi dan Standar disasi	Rp 42,376,076,000	Rp 41,328,146,096
6213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 11,276,365,000	Rp 10,710,139,129
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp 1,262,072,000	Rp 1,230,790,247
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp 3,662,824,000	Rp 3,582,636,786
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 8,321,637,000	Rp 8,242,785,882
	<b>Jumlah Belanja Program CD</b>	<b>Rp 76,522,646,000</b>	<b>Rp 74,556,637,985</b>
WA	Program Dukungan Manajemen		
4711	Legislasi dan Litigasi	Rp 272,872,000	Rp 258,329,000
4715	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp 479,685,875,000	Rp 475,193,362,186
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 3,330,369,000	Rp 3,239,703,865
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 365,604,804,000	Rp 360,993,039,183
4722	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp 1,613,693,000	Rp 1,551,034,363
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 239,307,181,000	Rp 238,648,278,108
		Rp 34,000,000	Rp 34,000,000
	<b>Jumlah Belanja Program WA</b>	<b>Rp 1,089,848,794,000</b>	<b>Rp 1,079,917,746,705</b>
	<b>Jumlah Rupiah Murni</b>	<b>Rp 1,166,371,440,000</b>	<b>Rp 1,154,474,384,690</b>
WA	Program Dukungan Manajemen		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	Rp 36,184,173,419,000	Rp 36,164,055,179,838
4836	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp 26,728,508,000	Rp 24,794,453,989
4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 71,406,678,000	Rp 62,703,868,211
4838	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp 1,286,952,000	Rp 1,198,386,451
4839	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 2,862,700,000	Rp 2,818,676,953
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	Rp 22,034,698,000	Rp 21,268,559,576
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	Rp 78,549,762,000	Rp 73,573,429,911
4716	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp 10,069,725,000	Rp 8,481,982,032
4717	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp 17,310,936,000	Rp 15,567,734,436
4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 40,520,541,000	Rp 40,065,838,817
4721	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 37,438,813,000	Rp 37,378,539,296
4723	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp 90,336,000	Rp 62,565,069
4724	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp 624,414,000	Rp 278,131,000
4726	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 100,000,000	Rp 43,595,250
4727	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 128,855,000	Rp -
	<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>Rp 36,493,326,337,000</b>	<b>Rp 36,452,290,940,829</b>
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
6213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 2,423,835,000	Rp 2,423,835,000
	<b>Jumlah Belanja Program CD</b>	<b>Rp 2,423,835,000</b>	<b>Rp 2,423,835,000</b>
WA	Program Dukungan Manajemen		
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1,733,282,000	Rp 1,671,447,000
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 5,217,000,000	Rp 553,898,500
	<b>Jumlah Belanja Program WA</b>	<b>Rp 6,950,282,000</b>	<b>Rp 2,225,345,500</b>
	<b>Jumlah Belanja Hibah Luar Negeri</b>	<b>Rp 9,374,117,000</b>	<b>Rp 4,649,180,500</b>

Realisasi belanja neto sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **31.91%** dari realisasi belanja neto sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Realisasi Belanja mengalami penurunan yang signifikan pada Belanja Barang BLU. Hal ini disebabkan karena realisasi penyaluran belanja penyaluran insentif biodiesel mengalami penurunan karena naiknya harga solar mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia sehingga selisih HIP Biodiesel dan HIP Solar mengalami penurunan.

Perbandingan realisasi belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 286,876,871,853	Rp 512,598,951,587	-44.03%
Belanja Barang	Rp 706,380,398,640	Rp 599,783,083,440	17.77%
Belanja Modal	Rp 166,163,164,864	Rp 439,178,173,850	-62.16%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1,159,420,435,357</b>	<b>Rp 1,551,560,208,877</b>	<b>-25.27%</b>
Belanja Barang BLU	Rp 36,446,898,436,930	Rp 53,680,518,449,080	-32.10%
Belanja Modal BLU	Rp 5,392,503,893	Rp 4,916,241,790	9.69%
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 36,452,290,940,823</b>	<b>Rp 53,685,434,690,870</b>	<b>-32.10%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 142,500	-100.00%
<b>Jumlah Netto</b>	<b>Rp 37,611,711,376,180</b>	<b>Rp 55,236,994,757,247</b>	<b>-31.91%</b>

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai  
Rp286.815.947.635,00

Realisasi belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp286.815.947.635,00** Dan **Rp512.598.951.587,00**. Realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **44,05%** persen dari realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penurunan realisasi tersebut disebabkan karena penerapan pengalihan gaji terpusat periode tahun 2022, sehingga mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji induk pegawai DJPb dilaksanakan melalui Satker Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 165,431,434,320	Rp 346,280,961,650	-52.23%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 2,810,136	Rp 5,750,300	-51.13%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 10,501,265,768	Rp 22,608,211,932	-53.55%
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 3,088,146,514	Rp 6,486,210,774	-52.39%
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 9,836,030,000	Rp 19,515,140,000	-49.60%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 1,491,560,000	Rp 2,638,560,000	-43.47%
Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 454,219,505	Rp 1,123,995,697	-59.59%
Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 8,676,278,340	Rp 18,129,089,860	-52.14%
Belanja Uang Makan PNS	Rp 54,577,732,970	Rp 59,168,979,000	-7.76%
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp 40,025,000	Rp 64,725,000	-38.16%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp 714,560,000	Rp 1,306,000,000	-45.29%
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 6,110,805,000	Rp 13,041,070,000	-53.14%
Belanja Uang Lembur	Rp 25,952,004,300	Rp 22,610,610,000	14.78%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 286,876,871,853</b>	<b>Rp 512,979,304,213</b>	<b>-44.08%</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp 60,924,218	Rp 380,352,626	-83.98%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 286,815,947,635</b>	<b>Rp 512,598,951,587</b>	<b>-44.05%</b>

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang  
Rp37.153.042.889.627,00

Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp37.153.042.889.627,00** dan **Rp54.280.301.532.518,00**.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	Rp 172,733,136,787	Rp 164,701,848,395	4.88%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 35,118,973,883	Rp 31,581,253,937	11.20%
Belanja Persediaan	Rp 18,232,914,977	Rp 18,064,057,488	0.93%
Belanja Jasa	Rp 97,645,613,318	Rp 71,758,120,304	36.08%
Belanja Pemeliharaan	Rp 237,676,918,681	Rp 208,596,951,287	13.94%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 143,565,883,082	Rp 105,264,103,743	36.39%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 1,406,957,906	Rp -	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 706,380,398,634</b>	<b>Rp 599,966,335,154</b>	<b>17.74%</b>
Belanja Barang BLU	Rp 36,446,898,436,936	Rp 53,680,518,449,080	-32.10%
<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>Rp 36,446,898,436,936</b>	<b>Rp 53,680,518,449,080</b>	<b>-32.10%</b>
Pengembalian Belanja	Rp 235,945,943	Rp 183,251,716	28.76%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 37,153,042,889,627</b>	<b>Rp 54,280,301,532,518</b>	<b>-31.55%</b>

Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan **31,55%** dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Realisasi Belanja mengalami penurunan yang signifikan pada Belanja Barang BLU. Hal ini disebabkan karena BPDPKS telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa pencantuman saldo akhir 2021 menjadi saldo awal 2022 sebesar **Rp25.704.808.010.437,00** dan telah melakukan revisi DIPA penggunaan saldo awal 2022 sebesar **Rp25.704.808.000.000,00**. Kemudian BPDPKS juga melakukan revisi penggunaan realisasi PNPB tahun berjalan sebesar **Rp4.744.200.000.000,00** sehingga total pagu DIPA BPDPKS menjadi **Rp36.286.458.257.000,00**. Realisasi belanja riil yang dibayarkan s.d. 31 Desember 2022 telah mencapai sebesar **Rp36.252.608.480.822,00** atau mencapai **99,91** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp36.283.469.907.000,00**. Selain itu, pada tahun 2022 selisih kurang Harga Indeks Pasar minyak solar dengan Harga Indeks Pasar biodiesel mengalami penurunan dikarenakan harga solar mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia serta akibat konflik rusia dan ukraina yang masih berlangsung dan turunnya harga CPO hasil dari lelang KPBN (PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) akibat stok dalam negeri yang melimpah. Volume penyaluran biodiesel s.d. 31 Desember 2022 sebesar **10.359.544** kiloliter dimana volume biodiesel yang dibayar mencapai **6.971.435** kiloliter. Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat dalam penyerapan CPO pada tingkat hulu dan mengurangi impor minyak solar sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan terealisasinya salah satu kebijakan nasional utama Pemerintah yaitu Mandatori Biodiesel. Selain itu, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp3.005.961.741,00** atau **89.69%** dari pagu anggaran sebesar **Rp3.351.474.000,00** dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang Khusus Penanganan COVID-19  
Per 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1,483,817,000	Rp 1,467,554,020	98.90
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 572,821,000	Rp 564,503,839	98.55
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 936,242,000	Rp 841,337,404	89.86
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,992,880,000</b>	<b>Rp 2,873,395,263</b>	<b>96.01</b>
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 194,450,000	Rp 133,466,478	68.64
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 164,144,000	Rp 127,282,000	77.54
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 358,594,000</b>	<b>Rp 133,466,478</b>	<b>37.22</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 900,000	0.00
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 3,351,474,000</b>	<b>Rp 3,005,961,741</b>	<b>89.69</b>

Belanja Barang BLU  
Rp36.446.898.436.930,0  
0

#### B.4.1 Belanja Barang BLU

Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp36.446.898.436.930,00** dan **Rp53.680.518.449.080,00**. Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **32,10%** dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena BDPKPS telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa pencantuman saldo akhir 2021 menjadi saldo awal 2022 sebesar **Rp25.704.808.010.437,00** dan telah melakukan revisi DIPA penggunaan saldo awal 2022 sebesar **Rp25.704.808.000.000,00**. Kemudian BDPKPS juga melakukan revisi penggunaan realisasi PNPB tahun berjalan sebesar **Rp4.744.200.000.000,00** sehingga total pagu DIPA BDPKPS menjadi **Rp36.286.458.257.000,00**. Realisasi belanja riil yang dibayarkan s.d. 31 Desember 2022 telah mencapai sebesar **Rp36.252.608.480.822,00** atau mencapai **99,91** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp36.283.469.907.000,00**. Selain itu, pada tahun 2022 selisih kurang Harga Indeks Pasar minyak solar dengan Harga Indeks Pasar biodiesel mengalami penurunan dikarenakan harga solar mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia serta akibat konflik rusia dan ukraina yang masih berlangsung dan turunnya harga CPO hasil dari lelang KPBN (PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) akibat stok dalam negeri yang melimpah. Volume penyaluran biodiesel s.d. 31 Desember 2022 sebesar **10.359.544** kiloliter dimana volume biodiesel yang dibayar mencapai **6.971.435** kiloliter. Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat dalam penyerapan CPO pada tingkat hulu dan mengurangi impor minyak solar sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan terealisasinya salah satu kebijakan nasional utama Pemerintah yaitu Mandatori Biodiesel *Perbandingan Belanja Barang BLU 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 133,899,241,143	Rp 100,495,764,701	33.24%
Belanja Barang	Rp 9,295,209,503	Rp 8,231,951,663	12.92%
Belanja Jasa	Rp 50,184,304,088	Rp 41,344,018,199	21.38%
Belanja Pemeliharaan	Rp 1,535,835,224	Rp 726,401,388	111.43%
Belanja Perjalanan	Rp 22,636,819,400	Rp 13,621,370,132	66.19%
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 36,164,055,179,838	Rp 53,508,955,441,200	-32.41%
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp -	Rp -	0.00%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	Rp 603,914,790	Rp 427,388,550	0.00%
Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	Rp 64,427,184,472	Rp 6,010,207,865	0.00%
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 133,466,478	Rp 381,962,743	-65.06%
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 127,282,000	Rp 323,942,599	-60.71%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 36,446,898,436,936</b>	<b>Rp 53,680,518,449,040</b>	<b>-32.10%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0.00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 36,446,898,436,936</b>	<b>Rp 53,680,518,449,040</b>	<b>-32.10%</b>

Selain itu, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 pada satuan kerja BLU lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp260.748.478,00** atau **72,71%** dari pagu anggaran sebesar **Rp358.594.000,00** dengan rincian sebagai berikut.

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang Khusus Penanganan COVID-19 Per 31 Desember 2022*

URAIAN	31 DESEMBER 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 194,450,000	Rp 133,466,478	68.64
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 164,144,000	Rp 127,282,000	77.54
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 358,594,000</b>	<b>Rp 260,748,478</b>	<b>72.71</b>

**B.5 Belanja Modal**

*Belanja Modal*  
*Rp171.555.668.757,00*

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp171.555.668.757,00** dan **Rp444.094.273.140,00**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 73,363,622,899	Rp 128,432,986,664	-42.88%
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	Rp 4,910,000	Rp -	0.00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan		Rp 12,467,720	
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	Rp 1,238,000		
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 34,844,000	Rp 39,258,198	0.00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 14,339,979,684	Rp 16,550,061,543	-13.35%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 50,794,161,822	Rp 92,364,166,536	-45.01%
Belanja Modal Lainnya	Rp 26,290,590,750	Rp 195,913,256,485	-86.58%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp 1,333,817,709	Rp 5,865,976,704	0.00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 166,163,164,864</b>	<b>Rp 439,178,173,850</b>	<b>-62.16%</b>
Belanja Modal Perlatan dan Mesin BLU	Rp 3,188,136,023	Rp 3,520,550,790	-9.44%
Belanja Modal Linnya BLU	Rp 2,204,367,870	Rp 1,395,691,000	57.94%
<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>Rp 5,392,503,893</b>	<b>Rp 4,916,241,790</b>	<b>9.69%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 142,500	0.00%
<b>Jumlah Belanja Total</b>	<b>Rp 171,555,668,757</b>	<b>Rp 444,094,273,140</b>	<b>-61.37%</b>

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **61,37%** dibandingkan realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penurunan realisasi belanja modal secara umum disebabkan karena anggaran belanja modal yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, selain itu karna adanya kebijakan penurunan kebutuhan belanja TIK pada DJPb dan ditambah dengan pemotongan karena *automatic adjustmen* sebesar 48 miliar pada TA 2022.

### B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Rp73.404.654.899,00

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp73.404.654.899,00** dan **Rp128.484.712.582,00**. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **42,87%** dibandingkan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penurunan terjadi karena telah tersedianya peralatan dan mesin yang memadai khususnya untuk penanganan Pandemi COVID-19 dan terbatasnya pagu anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin pada satker vertikal DJPb.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 73,363,662,899	Rp 128,432,986,664	-42.88%
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	Rp 4,910,000		
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	Rp 1,238,000		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp 12,467,720	0.00%
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 34,844,000	Rp 39,258,198	-11.24%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 73,404,654,899</b>	<b>Rp 128,484,712,582</b>	<b>-42.87%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0.00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 73,404,654,899</b>	<b>Rp 128,484,712,582</b>	<b>-42.87%</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Rp65.134.141.506,00

### B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp65.134.141.506,00** dan **Rp108.914.085.579,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **72,19%** dibandingkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan karena penurunan pembangunan gedung lingkup DJPb.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 14,339,979,684	Rp 16,550,061,543	-13.35%
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bang	Rp 50,794,161,822	Rp 92,364,166,536	-45.01%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 65,134,141,506</b>	<b>Rp 108,914,228,079</b>	<b>-40.20%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 142,500	0.00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 65,134,141,506</b>	<b>Rp 108,914,085,579</b>	<b>-40.20%</b>

### B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya  
Rp27.624.408.459,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp27.624.408.459,00** dan **Rp201.779.233.189,00**. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami

penurunan sebesar **86,31%** dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran TA 2021 yang mana terdapat pengadaan Lisensi Perangkat Lunak Peningkatan Kapasitas Infrastruktur SAKTI Tahun 2021.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	Rp 26,290,590,750	Rp 195,913,256,485	-86.58%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp 1,333,817,709	Rp 5,865,976,704	0.00%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 27,624,408,459</b>	<b>Rp 201,779,233,189</b>	<b>-86.31%</b>
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 27,624,408,459</b>	<b>Rp 201,779,233,189</b>	<b>-86.31%</b>

**B.5.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU**

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU  
Rp3.188.136.023,00*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp3.188.136.023,00** dan **Rp3.520.550.790,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **9,44%** dibandingkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penurunan realisasi disebabkan karena penurunan pengadaan peralatan dan mesin dalam rangka menunjang penerapan pelaksanaan *Flexible Working Space* (FWS) di BLU.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 3,188,136,023	Rp 3,520,550,790	-9.44%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 3,188,136,023</b>	<b>Rp 3,520,550,790</b>	<b>-9.44%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0.00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 3,188,136,023</b>	<b>Rp 3,520,550,790</b>	<b>-9.44%</b>

**B.5.6 Belanja Modal Lainnya- BLU**

*Belanja Modal Lainnya- BLU Rp2.204.367.870,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp2.204.367.870,00** dan **Rp1.395.691.000,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar **57.94%** dibandingkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan terjadi dikarenakan belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan laptop dan scanner serta belanja modal lainnya berupa pengadaan *software* untuk keperluan BPDPKS. Pengadaan laptop dilakukan dalam rangka

menunjang penerapan pelaksanaan Flexible Working Space (FWS) melalui mekanisme Activity Based Workplace (ABW) dan Work From Home (WFH) untuk mendorong work life balance, produktivitas kerja, fleksibilitas lokasi kerja, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan teknologi serta melaksanakan adaptasi sistem kerja dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman dari COVID-19.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya-BLU	Rp 2,204,367,870	Rp 1,395,691,000	57.94%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 2,204,367,870</b>	<b>Rp 1,395,691,000</b>	<b>57.94%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 2,204,367,870</b>	<b>Rp 1,395,691,000</b>	<b>57.94%</b>



## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp7.721.142,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp7.721.142,00** dan **Rp0,00**. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan keuangan. Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022	
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	Rp	7,721,142
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>7,721,142</b>

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp5.882.390.135,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp5.882.390.135,00** dan **Rp1.308.243.930,00**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berasal dari pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor dan GUP-Kartu Kredit Pemerintah yang belum dibayarkan ke Bank Penerbit KKP. Saldo Kas Lainnya BLU tersebut merupakan retur belanja yang belum terselesaikan proses pembayarannya kembali s.d. bulan Desember 2022 sebesar **Rp202.268.576,00** dan uang masuk ke rekening BDPKS yang harus dikembalikan sebesar **Rp683.323.781,00**. Retur tersebut terjadi karena kesalahan input nama/nomor rekening penerima, rekening penerima tutup atau rekening penerima *inactive* sehingga tertolak oleh sistem pembayaran.

Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	4,842,284,230
Kas lainnya di BLU	Rp	1,040,105,905
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>5,882,390,135</b>

Kas pada BLU  
Rp24.557.304.394.286,00

### C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp24.557.304.394.286,00** dan **Rp26.523.886.036.073,00**. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas tunai (yang sudah disahkan BUN maupun yang belum disahkan) dan kas pada rekening Bank yang berada pada Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit, Pusat Investasi Pemerintah dan BPD Lingkungan Hidup.

Keterangan	31 Desember 2022
Kas dan Bank BLU	Rp 1,526,704,394,286
Setara Kas Lainnya - BLU	Rp 23,030,600,000,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24,557,304,394,286</b>

Rincian per satker Kas pada badan layanan umum disajikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022
<b>Kas dan Bank - BLU</b>	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 1,206,778,730,202
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp 58,846,477,286
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp 261,079,186,798
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1,526,704,394,286</b>
<b>Setara kas Lainnya - BLU</b>	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 21,899,000,000,000
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp 1,131,600,000,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 23,030,600,000,000</b>
<b>Total</b>	<b>Rp 24,557,304,394,286</b>

Investasi Jangka Pendek-  
BLU  
Rp3.057.426.608.776,00

### C.4 Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp3.057.426.608.776,00** dan **Rp1.365.253.308.776,00**. Investasi Jangka Pendek – BLU merupakan pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil dan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Investasi dapat dicairkan/dikonversi dalam bentuk uang dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan
- Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum terdiri dari:

- BPDPKS yang melakukan pembelian Surat Utang Negara (SUN) *tradeable* pada bulan Februari 2020 dengan seri FR0076, FR0080, FR0082 dan FR0083 dengan Saldo penempatan **Rp508.406.776.776,00** melalui Bank Rakyat Indonesia sebagai bank kustodian. Kemudian pada bulan Agustus 2022, BPDPKS melakukan pembelian SUN *tradeable* kembali seri FR0091 dan

FR0093 dengan nilai penempatan Rp285.348.300.000,00 dan pada bulan Desember 2022 melakukan pembelian SBN tradeable seri FR0070 dan FR0077 dengan nilai penempatan Rp206.825.000.000,00 melalui Bank Rakyat Indonesia sebagai bank kustodian sehingga total SBN yang dimiliki menjadi Rp1.000.580.076.776,00. Atas penempatan tersebut, dicatat sebagai SUN *available for sale*. Deposito dengan jangka waktu s.d 6 bulan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 ditempatkan pada BRI. Per 31 Desember 2022, nilai SUN seri FR0070, FR0077, FR0080, dan FR0082 mengalami penurunan dari harga perolehannya, secara keseluruhan, Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum BDPKS berupa pembelian Surat Berharga Negara sudah mencapai keuntungan sebesar 0,42 persen dengan nominal sebesar Rp4.159.023.398,00

- b. Pusat Investasi Pemerintah yang menempatkan deposito pada Bank yaitu Mandiri pada 19 Mei 2021 sebesar Rp342.738.613.000,00; BRI pada 19 Mei 2021 sebesar Rp514.107.919.000,00; BRI pada 27 Mei 2022 sebesar Rp120.207.500.000,00; dan BTN pada 27 Mei 2022 sebesar Rp79.792.500.000,00.

*Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
BPDP Kelapa Sawit	2,000,580,076,776	508,406,776,776
Pusat Investasi Pemerintah	1,056,846,532,000	856,846,532,000
<b>Jumlah</b>	<b>3,057,426,608,776</b>	<b>1,365,253,308,776</b>

### C.5 Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

*Belanja Dibayar Dimuka  
Rp1.559.968.031.629,00*

Saldo Belanja Dibayar Di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.559.968.031.629,00 dan Rp1.976.945.174.391,00. Belanja di bayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Rekapitulasi Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> )	Rp 1,557,868,953,830
Belanja Modal yang Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> )	Rp 2,099,077,799
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1,559,968,031,629</b>

### C.6 Uang Muka Belanja (*prepayment*)

Uang Muka Belanja  
(*prepayment*)  
Rp1.019.845.910,00

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp1.019.845.910,00** dan **Rp2.820.864.145,00**. Uang Muka Belanja merupakan pembayaran dimuka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Transaksi uang muka belanja pada Ditjen Perbendaharaan merupakan transaksi persekot gaji hasil reklasifikasi akun Belanja Pegawai dibayar dimuka (*prepaid*). Pengertian dari Persekot Gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai yang dipindahkan/ dimutasi untuk kepentingan dinas. Pedoman pembayaran persekot gaji sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor SE-125/A/621/1095 tanggal 3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji bagi Pegawai Negeri. Sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan PER-41/PB/2016 tanggal 19 Oktober 2016, maka transaksi Uang Muka Belanja (*prepayment*) hanya pada satker Kantor Pusat DJPb.

### C.7 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih  
harus diterima  
Rp457.355.338.948,00

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp457.355.338.948,00** dan **Rp321.356.092.117,00**. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rekapitulasi Saldo Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2022
BPD Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 123,487,459,403
Pusat Investasi Pemerintah	Rp 18,544,307,936
BPD Lingkungan Hidup	Rp 315,319,780,609
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jawa Tengah	Rp 3,791,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 457,355,338,948</b>

Pendapatan yang masih harus diterima pada BLU BPDKS merupakan pendapatan jasa layanan perbankan BLU yang sudah menjadi hak BPDKS tetapi hingga 31 Desember 2022 belum diterima serta Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU berupa pendapatan bunga deposito dengan jangka waktu jatuh tempo s.d. 3 bulan sebesar **Rp105.945.383.178,00** dengan rincian pendapatan bunga deposito yang

- masih harus diterima dari Bank Mega sebesar Rp14.231.083.333,00, BJB sebesar Rp17.213.287.671,00, BNI sebesar Rp10.603.698.630,00, BRI sebesar Rp26.663.888.888,00, BSI sebesar Rp150.684.931,00, BTN sebesar Rp25.404.657.534,00 dan Bank DKI sebesar Rp11.678.082.191,00;
- b. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU lainnya berupa pendapatan kupon dari penempatan obligasi Surat Utang Negara (SUN) tradeable seri FR0070, FR0076, FR0080, FR0082, FR0083, FR0091 dan FR0093 dengan nilai sebesar Rp14.983.028.595,00 dan kurang bayar jasa giro pada rekening Bank Mandiri sebesar Rp2.491.309.617,00; dan BRI sebesar Rp983.760,00.
  - c. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu berupa kelebihan pembayaran insentif dan uang saku Dewan Pengawas dan Direktur Utama sebesar Rp66.754.253,00.

Pendapatan yang masih harus diterima pada BLU PIP merupakan pendapatan bunga tagihan pembiayaan UMi sebesar Rp14.112.558.206,00. serta jasa layanan perbankan sebesar Rp1.625.083.128,00 yang belum diterima BLU PIP sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2022. serta pendapatan lain-lain BLU yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp2.806.666.602,00.

Sedangkan pendapatan yang masih harus diterima pada BLU BPD LH merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan perbankan dan bunga FDB yang merupakan hak tagih atas bunga/bagi hasil sejak awal perjanjian pembiayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp315.319.780.609,00.

### C.8 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak  
Rp412.966.823,00*

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp412.966.823,00** dan **Rp270.582.742,00**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari Piutang PNBPN sebesar Rp128,456,441,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp284.510.382,00. Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2022	
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau	Rp	117,540,595
KPPN Tangerang	Rp	10,915,846
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>128,456,441</b>

Rekapitulasi Saldo Piutang Lainnya disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2022	
Kampus DJPb	Rp	242,470,912
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	Rp	115,000
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan	Rp	499,419
KPPN Ruteng	Rp	41,425,051
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>284,510,382</b>

### C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang Bukan  
Pajak defisit  
Rp129.878.993,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp129.878.993,00** dan **Rp129.167.073,00**. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	Rp -	05%	Rp -
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 129,878,993	100%	Rp 129,878,993
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>Rp 129,878,993</b>		<b>Rp 129,878,993</b>

### C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR  
Rp12.000.000,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp12.000.000,00** dan **Rp46.999.200,00**. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

### C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Bagian

Lancar TP/TGR defisit  
Rp60.000,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp60.000,00** dan **Rp234.996,00**.

Penyisihan piutang tak tertagih – Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

### C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan  
Operasional BLU Rp0,00

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp58.500.000,00**.

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih –Piutang dari  
Kegiatan Operasional  
BLU Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp0,00** dan **Rp292.500,00**.

### C.14 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan  
Non Operasional BLU  
Rp0,00

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp58.500.000,00**.

### C.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih –Piutang dari  
Kegiatan Non  
Operasional BLU Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar defisit **Rp0,00** dan **Rp292.500,00**.

## Persediaan

Rp17.374.861.469,00

**C.16 Persediaan**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp17.374.861.469,00** dan **Rp19.810.188.939,00**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2022	
Barang Konsumsi	Rp	16,980,555,095
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp	394,306,374
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>17,374,861,469</b>

Persediaan TA 2022 senilai Rp93.554.045,00 dalam kondisi rusak dan Persediaan dalam kondisi usang senilai Rp1.628.971.520.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi persediaan yang rusak dan usang, persediaan rusak dan usang akan dilakukan penghapusan pada tahun 2023. Terdapat 4 (empat) Satker Lingkup DJPb yang sudah mengajukan usulan penghapusan persediaan per 26 April 2023, yaitu Kantor Pusat DJPb, KPPN Curup, KPPN Bima, dan KPPN Lhokseumawe. Satker yang telah terbit SK Penghapusan pada tahun 2023 yaitu KPPN Curup, KPPN Bima. Data penghapusan persediaan rusak dan usang Lingkup DJPb disajikan pada tabel berikut:

No	Satker	Jumlah (Unit)	Nilai
1	Kantor Pusat DJPb	440	Rp1.210.674.990
2	Kantor Pusat DJPb	4.324	Rp158.648.200
3	KPPN Curup	11.346	Rp61.423.750
4	KPPN Bima	2	Rp90.000
5	KPPN Lhoksumawe	94	Rp6.012.400

### C.17 Dana Bergulir

Dana Bergulir

Rp1.332.605.202.696,00

Saldo Dana Bergulir Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp1.332.605.202.696,00** dan **Rp1.388.002.223.013,00**. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Saldo Dana Bergulir ini merupakan milik satuan kerja BLU BPD Lingkungan Hidup.

### C.18 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Panjang

Non Permanen Lainnya

Rp6.640.289.050.977,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp6.640.289.050.977,00** dan **Rp5.496.601.629.976,00**. Investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Saldo Investasi Jangka Panjang ini merupakan milik satuan kerja Pusat Investasi Pemerintah yang berupa penyaluran dana bergulir kepada Lembaga Penyalur/*Linkage* untuk pembiayaan ultra mikro yang dijamin dengan piutang secara fidusia. Terdapat selisih Rp27 karena pembulatan yang tercatat dalam aplikasi SAKTI. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada Satker Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

LKBB / Linkage	31 Desember 2022
Pegadaian	Rp 370,183,713,979
PNM	Rp 5,679,395,929,103
Koperasi Syariah Annisa	Rp 160,000,000
KSPPS Bhakti Huria Syariah	Rp 600,000,000
KSPPS Mandiri Sejahtera	Rp 1,266,666,667
KSP Karya Baitul Mandiri	Rp 17,833,333,333
Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia	Rp 28,643,678,161
LKMA Mojo Agung	Rp 175,000,000
LKMA Tani Makmur	Rp 375,000,000
PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH (Syariah)	Rp 1,840,000,000
KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI (Syariah)	Rp 700,000,000
Kopdit Pelangi Kasih	Rp 180,000,000
Koperasi Al Manar	Rp 500,000,000
KSPPS RAYA BANDA MADANI	Rp 14,000,000,000
BAV	Rp 524,435,729,761
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6,640,289,051,004</b>

### C.19 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir  
Diragukan Tertagih  
defisit  
Rp167.148.325.297,00

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp167.148.325.297,00** dan **Rp98.621.228.223,00**. Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih ini merupakan milik satuan kerja BLU BPD Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Dana Bergulir	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	Rp 825,184,055,686	0.5%	Rp 4,125,920,278
Kurang Lancar	Rp 32,055,222,083	10%	Rp 3,205,522,208
Diragukan	Rp 7,873,873,034	50%	Rp 3,936,936,517
Macet	Rp 155,871,326,873	100%	Rp 155,871,326,873
Lunas Pokok	Rp (716,049,632)	-	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>Rp 1,020,268,428,044</b>		<b>Rp 167,139,705,877</b>

Selain itu, atas beberapa piutang yang macet tersebut, telah dilakukan pengajuan penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebanyak 158 Debitur dengan nilai pokok **Rp60.634.327.008,00** dengan rincian nilai pokok **Rp42.440.967.250,00**, bunga **Rp17.619.926.225** dan denda **Rp578.433.532,00** oleh satker BLU BPD Lingkungan Hidup. Dana DNS dalam keadaan macet sebagai penambah akumulasi penyisihan piutang tak tertagih dan pengurang ekuitas yang dicatat sesuai dengan Nota Dinas Direktur APK nomor ND-1102/PB.6/2022 tanggal 9 November 2022.

### C.20 Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen  
BLU Bentuk Tagihan  
Diragukan Tertagih  
defisit  
Rp33.201.445.255,00

Saldo Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih Per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar defisit **Rp33.201.445.255,00** dan **Rp34.959.337.208,00**. Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum diragukan tertagih merupakan estimasi penyisihan tidak tertagih atas penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada penyalur maupun *linkage*. Saldo ini merupakan milik satuan kerja BLU PIP dengan rincian penyisihan dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2022 sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Investasi	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	Rp 6,640,289,051,004	0.5%	Rp 33,201,445,255
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp -	100%	Rp -
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>Rp 6,640,289,051,004</b>		<b>Rp 33,201,445,255</b>

### C.21 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan TP/TGR  
Rp1.907.443.863,00

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp1.907.443.863,00** dan **Rp2.062.714.669,00**. Tuntutan Perbendaharaan

adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Rekapitulasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

No	Satker	31 Desember 2022	
1	Kantor Pusat DJPb	Rp	1,878,443,863
2	KPPN Cirebon	Rp	29,000,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>1,907,443,863</b>

### C.22 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih - TP/TGR  
defisit  
Rp1.639.612.264,00

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp1.639.612.264,00** dan **Rp2.021.919.669,00**. Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Tagihan Penjualan Angsuran yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	Rp 29,000,000	0.5%	Rp 145,000
Kurang Lancar	Rp 265,529,554	10%	Rp 26,552,955
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 1,612,914,309	100%	Rp 1,612,914,309
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>Rp 1,907,443,863</b>		<b>Rp 1,639,612,264</b>

### C.23 Tanah

Tanah

Rp9.072.828.813.486,00

Saldo aset tetap tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp9.072.828.813.486,00** dengan kuantitas **1,722,925m<sup>2</sup>** dan **Rp9.302.751.404.486,00** dengan kuantitas **1,732,013m<sup>2</sup>**. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
Tanah	1,732,013	9,302,751,404,486	47,902	333,603,660,628	56,990	563,526,251,628	1,722,925	9,072,828,813,486
TANAH PERSIL	1,702,630	9,259,411,677,486.00	46,737	329,720,499,628	56,990	563,526,251,628	1,692,377	9,025,605,925,486.00
TANAH NON PERSIL	22,390	30,675,826,000.00	1,165	3,883,161,000	-	-	23,555	34,558,987,000.00
LAPANGAN	6,993	12,663,901,000.00	-	-	-	-	6,993	12,663,901,000.00

### C.24 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp1.636.721.890.276,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp1.636.721.890.276,00** dan **Rp1.638.971.189.833,00**. Mutasi Peralatan dan Mesin per tanggal pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JAN 2022		BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Peralatan dan Mesin	168,902	1,638,971,189,833	9,599	121,632,459,394	13,617	123,861,798,951	164,794	1,636,721,890,276
ALAT BANTU	559	57,308,669,881	20	5,578,855,726	38	4,324,871,527	541	58,562,654,080
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1,240	176,867,987,561	45	10,801,591,500	86	5,962,652,201	1,199	181,706,926,860
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	188	290,591,684	7	13,246,186	11	11,777,423	184	292,060,427
ALAT BENGKEL BERMESIN	25	2,039,880,259	4	9,335,250	-	-	29	2,049,225,506
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	56	131,111,886	2	3,269,000	1	800,250	57	133,580,636
ALAT UKUR	476	1,337,042,845	7	17,611,500	6	16,500,000	477	1,338,154,445
ALAT KANTOR	31,004	125,615,712,555	576	4,648,159,468	1,731	8,247,308,389	29,849	122,016,563,634
ALAT RUMAH TANGGA	96,884	278,478,013,314	6,253	28,654,694,437	6,087	14,979,841,003	97,050	292,152,866,746
ALAT STUDIO	4,428	109,436,388,389	421	15,594,540,918	386	9,615,868,029	4,463	115,215,062,278

URAIAN	SALDO PER 1 JAN 2022		BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
ALAT KOMUNIKASI	1,316	5,894,128,021	52	226,972,100	102	295,714,289	1,266	5,825,385,832
PERALATAN PEMANCAR	105	30,232,402,101	28	5,969,567,500	21	7,359,763,537	112	28,842,206,064
ALAT KEDOKTERAN	154	563,202,895	13	61,286,800	15	63,142,000	152	561,327,695
ALAT KESEHATAN UMUM	6	11,403,000	2	7,778,080	-	-	8	19,181,080
UNIT ALAT LABORATORIUM	-	-	9	23,853,328	9	23,853,328	-	-
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	-	9	45,810,000	9	45,810,000	-	-
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	-	15	146,345,358	15	146,345,358	-	-
KOMPUTER UNIT	19,355	246,442,085,390	1,481	24,958,447,230	3,643	45,712,308,069	17,193	225,688,224,551
PERALATAN KOMPUTER	13,005	603,670,510,930	535	24,662,244,133	1,439	26,759,556,098	12,101	601,573,198,965
SUMUR	4	172,326,000	-	-	-	-	4	172,326,000
ALAT PELINDUNG	10	10,450,000	-	-	-	-	10	10,450,000
ALAT SAR	19	98,310,000	-	-	-	-	19	98,310,000
ALAT KERJA PENERBANGAN	-	-	12	55,838,000	12	55,838,000	-	-
PERALATAN OLAH RAGA	68	370,964,045	12	113,223,430	-	-	80	484,187,475

Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak sesuai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan telah direklasifikasi ke kode barang yang sesuai. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

### C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp2,061,188,950,999,00** dan

Gedung dan Bangunan  
Rp 2,061,188,950,999,-

**Rp2.010.588.866.751,00.** Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>4,095</b>	<b>2,010,588,866,751</b>	<b>51</b>	<b>74,650,203,752</b>	<b>80</b>	<b>24,050,119,504</b>	<b>4,066</b>	<b>2,061,188,950,999</b>
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	913	1,422,019,875,933,00	19	41,931,063,704	25	12,930,599,904	907	1,451,020,339,733,00
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2,981	550,542,611,736,00	32	31,557,286,227	55	11,074,119,600	2,958	571,025,778,363,00
TUGU/TANDA BATAS	201	38,026,379,082,00	-	1,161,853,821	-	45,400,000	201	39,142,832,903,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

### C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp1.114.536.000,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp1.114.536.000,00** dan **Rp12.814.117.196,00**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JALAN IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1,478,784</b>	<b>12,814,117,196</b>	<b>2</b>	<b>1,304,772,000</b>	<b>11,992</b>	<b>13,004,353,196</b>	<b>1,466,794</b>	<b>1,114,536,000</b>
Jalan dan Jembatan	1,478,002	6,102,384,000	1	246,129,000	11,821	5,868,634,000	1,466,782	478,879,000
JALAN	1,478,525	5,708,382,000	1	246,129,000	11,818	5,474,642,000	1,466,708	478,879,000
JEMBATAN	77	393,992,000	-	-	3	393,992,000	74	-
Irigasi	67	3,274,789,442	1	1,058,643,000	61	4,198,615,442	7	133,818,000
BANGUNAN AIR IRIGASI	67	135,892,000	-	1,058,643,000	6	1,171,258,000	3	26,979,000
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	1	27,092,000	-	-	1	27,092,000	-	-
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	20	1,355,755,000	-	-	20	1,355,755,000	-	-
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	27	1,198,072,000	-	-	26	1,193,401,000	1	4,671,000
BANGUNAN AIR KOTOR	11	554,330,442	-	-	8	452,151,442	3	102,189,000
Jaringan	119	3,436,941,754	-	-	119	2,926,103,794	6	508,838,000
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	5	126,754,250	-	-	13	128,754,250	-	-
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	5,048,000	-	-	1	5,048,000	-	-
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	2	130,961,800	-	-	2	130,961,800	-	-
INSTALASI GARDU LISTRIK	6	746,444,000	-	-	5	263,225,000	1	483,219,000
INSTALASI PENGAMAN	1	27,850,000	-	-	1	27,850,000	-	-
INSTALASI LAIN	10	988,677,100	-	-	10	988,677,100	-	-
JARINGAN AIR MINUM	4	70,316,700	-	-	7	42,681,700	2	27,635,000
JARINGAN LISTRIK	98	1,273,586,304	-	-	98	1,273,586,304	-	-
JARINGAN TELEPON	11	40,352,000	-	-	11	40,352,000	-	-

Terjadi penurunan yang signifikan terhadap aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Penurunan tersebut akibat dari tindak lanjut dari hasil identifikasi Jalan Irigasi dan Jaringan. Hasil dari hasil identifikasi Jalan Irigasi dan Jaringan yaitu terdapat beberapa nup IJ yang salah pengklasifikasian kode barang yang harusnya masuk ke Gedung dan Bangunan tetapi malah masuk ke Jalan Irigasi dan Jaringan. Atas hasil identifikasi tersebut, telah dilakukan reklasifikasi aset dari IJ ke Gedung dan Bangunan. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

### C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya  
Rp12.056.073.376,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp12.056.073.376,00** dan **Rp11.878.464.671,00**. Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi sebesar **Rp10.675.172.282,00**

dan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar **Rp1.380.901.094,00**. Aset Tetap Renovasi adalah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik satuan kerja. Mutasi transaksi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>5.802</b>	<b>11.878.464,671</b>	<b>106</b>	<b>5.851.334,875</b>	<b>165</b>	<b>5.473.728,170</b>	<b>5.743</b>	<b>12.056.073,376</b>
Aset Tetap Renovasi	30	10.675.172,282	64	5.451.340,625	64	5.451.340,625	30	10.675.172,282
PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	-	-	54	3.284.941,400	54	3.284.941,400	-	-
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	26	5.033.694,839	9	2.067.399,225	9	2.067.399,225	26	5.033.694,839
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	2	144.028,750	-	-	-	-	2	144.028,750
ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	5.497.418,708	1	99.000,000	1	99.000,000	2	5.497.418,708
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>5.772</b>	<b>1.203.292,389</b>	<b>42</b>	<b>199.994,250</b>	<b>101</b>	<b>22.385,645</b>	<b>5.713</b>	<b>1.380.901,094</b>
BAHAN PERUSTAKAAN TERCETAK	5.604	720.954,224	-	-	95	10.371,980	5.509	720.954,224
KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	75	106.200,000	32	127.095,000	2	145.780	105	233.140,000
BARANG BERCORAK KESEMAN	87	291.199,115	10	72.699,250	4	11.807,815	93	352.230,550
ALAT BERCORAK KEBUDUKYAN	6	65.928,403	-	-	-	-	6	65.928,403

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

### C.28 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp13.133.398.275,00** dan **Rp1.154.066.062,00**. Saldo konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp13.133.398.275,00

URAIAN	1 JANUARI 2022	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	PER 31 DESEMBER 2022
	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>1.154.066.062</b>	<b>62.089.771.525</b>	<b>50.110.439.312</b>	<b>13.133.398.275</b>
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	-	1.150.988,600	1.150.988,600	-
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	321.484,546	60.431.154,754	47.619.241,025	13.133.398,275
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	832.581,516	507.628,171	1.340.209,687	-

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.29 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing defisit **Rp1.866.450.361.632,00** dan **Rp1.706.493.328.697,00**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap defisit  
Rp1.866.450.361.632,00

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 1,605,885,012,805	Rp 1,355,846,825,558	Rp 250,038,187,247.00
2	Gedung dan Bangunan	Rp 2,018,572,290,967	Rp 506,107,728,184	Rp 1,512,464,562,783.00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 12,795,797,196	Rp 601,430,841	Rp 12,194,366,355.00
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 11,955,079,126	Rp 113,185,500	Rp 11,841,893,626.00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>Rp 3,649,208,180,094</b>	<b>Rp 1,862,669,170,083</b>	<b>Rp 1,786,539,010,011.00</b>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

### C.30 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud  
Rp846.281.903.677,00

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp846.281.903.677,00** dan **Rp817.986.939.307,00**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Penyusutan Aset Tak Berwujud berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 berlaku mulai TA 2016. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Software	Rp 372,679,933,752
2	Lisensi	Rp 473,557,080,925
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 44,889,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 846,281,903,677</b>

Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	1 JANUARI 2022		MUTASI				PER 31 DESEMBER 2022	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
<b>ASET TAK BERWUJUD</b>	<b>7,795</b>	<b>817.986.939.307</b>	<b>4</b>	<b>28.524.586.730</b>	<b>2</b>	<b>245.122.360</b>	<b>7,793</b>	<b>846.479.382.677</b>
Software	356	370.475.565.882	3	2.443.990.230	1	239.622.360	359	372.679.933.752
ASET TAK BERWUJUD	356	370.475.565.882	3	2.443.990.230	1	239.622.360	359	372.679.933.752
Lisensi	7.429	447.466.484.425	3	26.090.596.500	-	-	7.432	473.557.080.925
ASET TAK BERWUJUD	7.429	447.466.484.425	3	26.090.596.500	-	-	7.432	473.557.080.925
Aset Tak Berwujud Lainnya	1	44.889.000	-	-	-	-	1	44.889.000
ASET TAK BERWUJUD	1	44.889.000	-	-	-	-	1	44.889.000

Pada TA 2022, terdapat software dan lisensi dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Tidak Digunakan pada DJPb senilai Rp26.440.305.992,- belum dihentikan dari penggunaan/operasional. Atas kondisi tersebut, aset tersebut dirusakberatkan setelah Sensus BMN 2019, karena sudah expired/takedown serta akan dihentikan penggunaannya di periode selanjutnya dan diusulkan penghapusannya. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara.

### C.31 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Dana Kelolaan Badan  
Layanan Umum  
Rp7.118.197.617.793,00

Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp7.118.197.617.793,00** dan **Rp5.129.978.846.011,00**. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2022 berasal dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, yaitu dana

yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU. Rekapitulasi Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Satker BLU	31 Desember 2022
1	BPD Lingkungan Hidup	Rp 3,761,115,108,284
2	Pusat Investasi Pemerintah	Rp 3,357,082,509,509
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 7,118,197,617,793</b>

### C.32 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain

Rp25.462.113.898,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp25.462.113.898,00** dan **Rp24.540.225.420,00**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dalam proses penghapusan dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap. Mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	1 JANUARI 2022		MUTASI				PER 31 DESEMBER 2022	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>2.841</b>	<b>24.540.225.420</b>	<b>10.972</b>	<b>81.279.964.662</b>	<b>10.542</b>	<b>80.358.076.184</b>	<b>3.271</b>	<b>25.462.113.898</b>
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	2.838	24.337.247.020	10.972	81.279.964.662	10.541	80.352.576.184	3.269	25.264.635.498
ALAT BANTU	12	246.992.837	29	1.896.015.107	35	2.076.343.944	6	66.664.000
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	25	1.156.087.501	85	5.234.222.201	100	5.654.170.201	10	736.139.501
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	3.358.740	10	8.437.130	9	7.062.130	3	4.733.790
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	4.635.000	1	800.250	1	800.250	3	4.635.000
ALAT UKUR	-	-	6	16.500.000	5	14.850.000	1	1.650.000
ALAT KANTOR	600	3.162.873.766	1.530	7.344.774.977	1.416	6.859.906.772	714	3.647.741.971
ALAT RUMAH TANGGA	1.580	4.393.845.809	4.929	11.193.809.561	4.765	10.866.825.127	1.744	4.720.830.243
ALAT STUDIO	58	6.480.995.342	301	4.528.982.583	286	4.622.505.654	73	6.387.472.271
ALAT KOMUNIKASI	216	422.331.335	65	169.404.289	61	169.462.477	220	422.273.147
PERALATAN PEMANGAR	1	1.700.000	7	10.862.100	8	12.562.100	-	-
ALAT KEDOKTERAN	-	-	2	1.875.200	1	1.675.200	1	200.000
KOMPUTER UNIT	106	3.015.078.689	2.849	32.604.749.447	2.728	31.440.594.229	227	4.179.233.907
PERALATAN KOMPUTER	210	4.044.598.113	1.049	9.495.973.804	1.037	9.096.042.429	222	4.444.529.488
PERALATAN OLAH RAGA	1	982.000	-	-	1	982.000	-	-
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	605.726.000	5	3.748.563.000	8	3.944.309.000	3	409.980.000
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	13	742.585.888	37	4.972.441.593	43	5.535.727.481	7	179.300.000
INSTALASI LAIN	-	-	2	36.640.000	2	36.640.000	-	-
JARINGAN LISTRIK	1	13.397.000	-	-	-	-	1	13.397.000
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	-	59	3.899.855	29	1.969.625	30	1.930.230
KARTOGRAFI NASKAH DAN LUKISAN	-	-	2	145.750	2	145.750	-	-
BARANG BERCDRAK KESENIAN	4	42.059.000	4	11.067.015	4	10.001.015	4	43.925.000
<b>Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional</b>	<b>3</b>	<b>202.978.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2</b>	<b>197.478.400</b>
ASET TAK BERWUJUD	3	202.978.400	-	-	1	5.500.000	2	197.478.400

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara.

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya defisit  
Rp582.035.565.260,00

### C.33 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp582.035.565.260,00** dan **Rp525.797.608.468,00**. Rekapitulasi akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Software	Rp 372,679,933,752	Rp 368,804,952,730	Rp 3,874,981,022
Lisensi	Rp 473,557,080,925	Rp 188,133,426,121	Rp 285,423,654,804
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 846,237,014,677</b>	<b>Rp 556,938,378,851</b>	<b>Rp 289,298,635,826</b>
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 44,813,142,854	Rp 24,899,708,010	Rp 19,913,434,844
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 197,478,400	Rp 197,478,400	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 45,010,621,254</b>	<b>Rp 25,097,186,410</b>	<b>Rp 19,913,434,844</b>
<b>Total</b>	<b>Rp 891,247,635,931</b>	<b>Rp 582,035,565,261</b>	<b>Rp 309,212,070,670</b>

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp21.556.184.910,00

### C.34 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp21.556.184.910,00** dan **Rp3.606.523.743.224,00**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rekapitulasi Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp 306,095,000
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 15,391,572,100
3	Belanja Modal yang masih harus dibayar	Rp -
4	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Rp -
5	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Rp -
6	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 4,840,706,630
7	Dana Pihak Ketiga	Rp -
8	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	Rp 897,231,766
<b>Total</b>		<b>Rp 21,435,605,496</b>

Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

### C.35 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang Kelebihan  
Pembayaran  
Pendapatan Rp0,00*

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp0,00** dan **Rp31.307.914,00**. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan utang akibat kelebihan potong pengembalian persekot gaji/uang muka belanja pegawai pada Kantor Pusat DJPb.

### C.36 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan Diterima di  
Muka  
Rp1.505.831.273,00*

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.505.831.273,00** dan **Rp1.968.318.378,00**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan diterima dimuka pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

### C.37 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN  
Rp7.721.142,00*

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp7.721.142,00** dan **Rp0,00**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari

KPPN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

### C.38 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek  
Lainnya  
Rp22.232.325,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp22.232.325,00** dan **Rp12.369.075,00**. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pajak tersebut yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

### C.39 Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN

Utang Jangka Panjang  
BLU kepada BUN  
Rp15.091.091.871.466,00

Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp15.091.091.871.466,00** dan **Rp12.014.582.699.000,00**. Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan kewajiban atas penerimaan Dana Kelolaan dari BA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Rincian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Satker BLU	31 Desember 2022
BPD Lingkungan Hidup	Rp 5,091,091,871,466
Pusat Investasi Pemerintah	Rp 10,000,000,000,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15,091,091,871,466</b>

### C.40 Ekuitas

Ekuitas  
Rp40.653.782.064.617,00

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp40.653.782.064.617,00** dan **Rp38.057.945.123.283,00**.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### Pendapatan PNBP

Rp36.218.862.875.413,00

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp36.218.862.875.413,00** dan **Rp72.916.068.314.437,00**. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari layanan yang dikendalikan oleh pemerintah, dan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. PNBP pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri dari:

Jenis Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Pendapatan Investasi	Rp 248,166,567,502	Rp 248,819,689,785	(0.26)
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 34,715,185,248,903	Rp 71,643,064,954,957	(51.54)
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	Rp 12,899,080,777	Rp 290,115,621	-
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	Rp 71,485,033,447	Rp 7,363,097,606	-
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Rp 1,165,508,058,454	Rp 1,009,001,065,457	15.51
Pendapatan Lain-lain BLU	Rp 2,082,015,800	Rp 2,820,647,160	(26.19)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp 102,233,000	Rp 217,038,750	(52.90)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp 2,866,536,915	Rp 3,081,575,739	(6.98)
Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp (4,138,760)	(100.00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 476,100,615	Rp 1,395,970,183	(65.89)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp 92,000,000	Rp 18,297,939	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 36,218,862,875,413</b>	<b>Rp 72,916,068,314,437</b>	<b>(50.33)</b>

Realisasi Pendapatan PNBP sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **50,33%** dibandingkan realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penurunan pendapatan secara signifikan disebabkan turunnya pendapatan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit. Penurunan pendapatan secara signifikan disebabkan turunnya pendapatan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU, yaitu Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini disebabkan karena pelarangan sementara ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) oleh Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached dan Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* yang berlaku mulai 28 April s.d. 22 Mei 2022. Larangan sementara Ekspor CPO tersebut dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia setelah sempat mengalami kelangkaan cukup lama mulai awal tahun 2022 disertai harganya yang mengalami peningkatan sangat signifikan.

Selain itu, perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, dan berlaku mulai tanggal 1 November 2022 dimana tarif tertinggi sebesar USD 240/MT untuk pengenaan harga CPO sama dengan atau lebih dari USD 800/ton atau lebih rendah dibandingkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022 dengan tarif tertinggi sebesar USD 375/MT untuk pengenaan harga CPO sama dengan atau lebih dari USD 750/ton sehingga sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (424138) sebesar Rp34.715.185.248.903,00 atau 107,18 persen dari estimasi pendapatannya.

## D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai  
Rp419.768.971.328,00

Saldo Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp419.768.971.328,00** dan **Rp610.708.180.838,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 164,723,555,220	Rp 343,989,975,550	(52.11)
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	Rp -	Rp (108,565,676)	(100.00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 2,775,114	Rp 5,720,308	(51.49)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp -	Rp (69,984)	(100.00)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 10,437,707,996	Rp 22,389,537,332	(53.38)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp -	Rp (4,540,992)	(100.00)
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 3,065,884,940	Rp 6,415,247,766	(52.21)
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	Rp -	Rp (961,070)	(100.00)
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 9,833,890,000	Rp 19,515,140,000	(49.61)
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	Rp -	Rp (10,400,184)	(100.00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 1,491,560,000	Rp 2,638,560,000	(43.47)
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 454,219,505	Rp 1,123,995,697	(59.59)
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 8,676,278,340	Rp 18,129,089,860	(52.14)
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	Rp -	Rp (796,620)	(100.00)
Beban Uang Makan PNS	Rp 54,375,920,120	Rp 59,367,852,950	(8.41)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	Rp -	Rp (6,400,750)	(100.00)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp 39,875,000	Rp 64,725,000	(38.39)
Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp -	Rp (6,055,000)	-
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp 713,440,000	Rp 1,306,000,000	(45.37)
Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp -	Rp (5,700,000)	-
Beban Tunjangan Umum PNS	Rp 6,102,955,000	Rp 13,041,070,000	(53.20)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	Rp -	Rp (233,395,000)	(100.00)
Beban Uang Lembur	Rp 25,951,668,950	Rp 22,605,854,300	14.80
Pengembalian Beban Uang Lembur	Rp -	Rp (3,467,350)	(100.00)
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	Rp 133,899,241,143	Rp 100,495,764,701	33.24
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 419,768,971,328</b>	<b>Rp 610,708,180,838</b>	<b>(31.27)</b>

### D.3 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp19.128.041.784,00** dan **Rp22.060.897.998,00**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Beban Persediaan*  
Rp19.128.041.784,00

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	Rp 19,128,041,784	Rp 22,060,897,998	(13.29)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>Rp 19,128,041,784</b>	<b>Rp 22,060,897,998</b>	<b>(13.29)</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp33.418.804.649.147,00** dan **Rp55.198.191.964.635,00**. Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Beban Barang dan Jasa*  
Rp33.418.804.649.147,00

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	Rp 114,243,287,287	Rp 108,224,908,756	5.56
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	Rp -	Rp (7,884,418)	(100.00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 1,994,818,898	Rp 2,468,260,502	(19.18)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 31,261,450,750	Rp 29,423,150,000	6.25
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp -	Rp (4,342,500)	(100.00)
Beban Barang Operasional Lainnya	Rp 23,754,396,492	Rp 19,420,123,456	22.32
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1,467,554,020	Rp 5,147,370,964	(71.49)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	Rp -	Rp (40,000)	100.00
Beban Bahan	Rp 27,693,763,791	Rp 18,856,178,746	46.87
Beban Honor Output Kegiatan	Rp 4,911,410,000	Rp 6,900,406,000	(28.82)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	Rp -	Rp (38,895,000)	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 2,005,660,712	Rp 5,824,669,191	(65.57)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Rp 473,593,979	Rp -	100.00
Beban Langganan Listrik	Rp 33,263,490,243	Rp 30,513,729,296	9.01
Pengembalian Beban Langganan Listrik	Rp -	Rp (6,250,296)	(100.00)
Beban Langganan Telepon	Rp 3,824,921,337	Rp 4,350,915,427	(12.09)
Pengembalian Beban Langganan Telepon	Rp -	Rp -	100.00
Beban Langganan Air	Rp 2,760,990,267	Rp 2,671,915,593	3.33

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Pengembalian Beban Langganan Air		Rp (1,966,560)	
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 1,635,775,957	Rp 1,385,639,432	18.05
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp -	Rp (234,400)	(100.00)
Beban Jasa Konsultan	Rp 6,105,452,000	Rp 2,005,225,000	204.48
Beban Sewa	Rp 3,722,133,142	Rp 1,411,053,970	163.78
Beban Jasa Profesi	Rp 4,556,837,750	Rp 3,616,552,329	26.00
Pengembalian Beban Jasa Profesi	Rp -	Rp (5,200,433)	(100.00)
Beban Jasa Lainnya	Rp 40,723,438,353	Rp 25,750,138,037	58.15
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 840,437,404	Rp 4,443,084,305	(81.08)
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp (19,900,000)	100.00
Beban Barang - BLU	Rp 9,477,893,256	Rp 8,196,861,663	15.63
Beban Jasa - BLU	Rp 53,109,668,396	Rp 39,017,632,928	36.12
Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 32,986,289,742,163	Rp 54,871,923,219,040	(39.88)
Beban Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	Rp 64,427,184,472	Rp 6,010,207,865	100.00
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 133,466,478	Rp 381,962,743	(65.06)
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 127,282,000	Rp 323,942,599	(60.71)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 9,530,400	(100.00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 33,418,804,649,147</b>	<b>Rp 55,198,191,964,635</b>	<b>(39.46)</b>

Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **39,46%** dibandingkan realisasi per 31 Desember 2021. Di dalam Beban Barang dan Jasa tersebut terdapat beban untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp3.133.243.741,00**. Rincian beban untuk penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	31-Dec-22
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1,467,554,020
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 564,503,839
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 841,337,404
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,873,395,263</b>
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 133,466,478
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 127,282,000
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 260,748,478</b>
Pengembalian Beban	Rp 900,000
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 3,133,243,741</b>

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan  
Rp239.957.908.760,00

Saldo Beban pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp239.957.908.760,00** dan **Rp210.155.946.012,00**. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 51,575,003,978	Rp 40,148,372,777	28.46
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp (8,500)	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp 2,000,000	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 3,583,097,194	Rp 2,924,641,866	22.51
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp -	Rp (900)	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 182,507,000,682	Rp 165,519,411,325	10.26
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp (250,000)	0.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp 756,971,682	Rp 835,378,056	(9.39)
Beban Pemeliharaan - BLU	Rp 1,535,835,224	Rp 726,401,388	111.43
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 239,957,908,760</b>	<b>Rp 210,155,946,012</b>	<b>14.18</b>

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas  
Rp167.593.547.085,00

Saldo Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp167.593.547.085,00** dan **Rp118.827.992.075,00**. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	Rp 84,261,164,215	Rp 67,537,196,776	24.76
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	Rp -	Rp (15,203,800)	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 3,651,358,000	Rp 3,084,211,000	18.39
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp -	Rp (1,388,000)	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 33,230,000,755	Rp 16,554,608,106	100.73
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp -	Rp (2,110,000)	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 22,407,246,809	Rp 18,088,087,861	23.88
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp -	Rp (38,780,000)	100.00
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	Rp 1,406,957,906	Rp -	100.00
Beban Perjalanan - BLU	Rp 22,636,819,400	Rp 13,621,370,132	66.19
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 167,593,547,085</b>	<b>Rp 118,827,992,075</b>	<b>41.04</b>

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar **41.04%** dibandingkan realisasi per 31 Desember 2021 dikarenakan kegiatan perjalanan dinas setelah pandemi COVID-19, seperti *capacity building* pada satker lingkup DJPb sudah dilakukan dengan normal sesuai dengan tatanan *new normal* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp298.675.373.107,00

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp298.675.373.107,00** dan **Rp299.942.033.624,00**. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian Beban dan Penyusutan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 147,764,727,471	Rp 154,456,696,390	(4.33)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 95,742,643,688	Rp 93,887,406,052	1.98
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp 79,937,565	Rp 786,806,508	(89.84)
Beban Penyusutan Irigasi	Rp 6,272,367	Rp 122,677,440	(94.89)
Beban Penyusutan Jaringan	Rp 12,834,442	Rp 66,081,029	(80.58)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp 2,830,000	Rp 5,660,000	(50.00)
Beban Amortisasi Software	Rp 9,056,049,641	Rp 13,400,408,150	(32.42)
Beban Amortisasi Lisensi	Rp 45,799,845,528	Rp 37,077,488,559	23.52
Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		Rp -	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp 210,232,405	Rp 138,809,496	51.45
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>Rp 298,675,373,107</b>	<b>Rp 299,942,033,624</b>	<b>(0.42)</b>

### D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan  
Piutang Tak tertagih  
Rp48.805.993.969,00

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp48.805.993.969,00** dan defisit **Rp26.320.943.845,00**. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban penyisihan piutang PNBPN	Rp 7,489,859	Rp 117,479,356	(93.62)
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp 292,500	100.00
BLU			
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Rp (84,160,695)	Rp (26,832,740)	213.65
Beban Penyisihan Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	Rp 50,639,834,696	Rp (8,730,032,969)	(680.06)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp 722,062	Rp 700,490	100.00
Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	Rp (1,757,891,953)	Rp 34,959,337,208	100.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 48,805,993,969</b>	<b>Rp 26,320,943,845</b>	<b>85</b>

### D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional Surplus  
Rp96.211.263.310,00

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar surplus **Rp96.211.263.310,00** dan surplus **Rp8.016.334.554,00**. Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan

beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turunan)%
<b>Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 4,600,313,586	Rp 4,646,736,479	(1.00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp (7,364,724,713)	Rp (33,102,034,877)	(77.75)
<b>Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya	Rp 100,363,623,208	Rp 41,698,075,421	140.69
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (1,387,948,771)	Rp (5,226,442,469)	(73.44)
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>Rp 96,211,263,310</b>	<b>Rp 8,016,334,554</b>	<b>1,100.19</b>

Rincian Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turunan)%
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>4,600,313,586</b>	<b>4,646,736,479</b>	<b>-1.00</b>
Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	Rp 30,335,674	Rp -	100.00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 2,476,184,882	Rp 2,928,593,129	(15.45)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp 2,093,793,030	Rp 1,718,143,350	21.86
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>7,364,724,713</b>	<b>33,102,034,877</b>	<b>-77.75</b>
Beban Kerugian Pelepasan Aset	Rp 7,364,724,713	Rp 33,102,034,877	(77.75)
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>100,363,623,208</b>	<b>41,698,075,421</b>	<b>140.69</b>
Penerimaan Kembali Belanja Barang/BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 99,637,531,993	Rp 41,548,808,106	139.81
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	Rp 277,144,640	Rp 9,250,000	2,896.16
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 331,282,395	Rp 85,340,271	288.19
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 116,929,180	Rp 39,734,193	194.28
Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp -	Rp (2,188,094)	(100.00)
Penerimaan Kembali Modal Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Rp -	Rp 876,650	(100.00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Rp 735,000	Rp -	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp -	Rp 16,254,295	(100.00)
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>1,387,948,771</b>	<b>5,226,442,469</b>	<b>-73.44</b>
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp -	Rp 17,974,620	(100.00)
Beban Persediaan Rusak/Usang	Rp 1,387,948,771	Rp 5,206,451,554	(73.34)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Rp -	Rp 2,016,295	(100.00)

Surplus/Defisit LO Rp  
1.702.339.653.543,00

#### D.10 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing surplus sebesar **Rp1.702.339.653.543,00** dan defisit sebesar **Rp16.437.876.689.964,00**. Pos Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional serta Pos Luar Biasa.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal*  
*Rp38.057.945.123.283,00*

Saldo Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp38.057.945.123.283,00** dan **Rp22.580.761.526.507,00**.

### E.2 Surplus/Defisit LO

*Surplus/Defisit LO Defisit*  
*Rp1.702.339.653.543,00*

Saldo Surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah surplus sebesar **Rp1.702.339.653.543,00** dan surplus sebesar **Rp16.437.876.689.964,00**. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas Reklasifikasi*  
*Rp117.846.300,00*

Saldo Koreksi atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar defisit **Rp117.846.300,00** dan **Rp0,00**. Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

### E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Tetap*  
*Non Revaluasi*  
*Rp212.827.655.997,00*

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp212.827.655.997,00** dan surplus sebesar **Rp55.889.280.288,00**. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan yang bukan dikarenakan revaluasi aset tetap. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi juga merupakan imbas dari Koreksi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang dilakukan pada TA 2022. Daftar Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

**E.5 Lain-lain***Lain-lain**Rp19.078.537.695,00*

Saldo Lain-lain untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar defisit **Rp19.078.537.695,00** dan surplus **Rp242.169.762.255,00**. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang, koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Saldo Lain-lain pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa Koreksi Lainnya.

**E.7 Transaksi Antar Entitas***Transaksi Antar Entitas surplus**Rp1.125.285.635.183,00*

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar surplus **Rp1.125.285.635.183,00** dan **Rp1.258.752.135.731,00**. Rincian Transaksi Antar Entitas sebagai berikut.

Uraian Akun	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 1,159,123,565,190	Rp 1,551,560,066,375
Diterima dari Entitas Lain	Rp (14,079,954,743)	Rp (28,578,576,968)
Transfer Keluar	Rp (64,855,459,022)	Rp (43,920,649,797)
Transfer Masuk	Rp 45,081,248,658	Rp 37,405,154,497
Pengesahan Hibah Langsung	Rp 16,235,100	Rp 4,781,870,162
Setoran Surplus BLU	Rp -	Rp (2,780,000,000,000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1,125,285,635,183</b>	<b>Rp (1,258,752,135,731)</b>

Penjelasan akun-akun Transaksi Antar Entitas:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto belanja;
2. Diterima dari Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto PNBPN namun tidak termasuk realisasi PNBPN BPDP Kelapa sawit dan BPD Lingkungan Hidup;
3. Transfer Keluar merupakan nilai transaksi transfer keluar BMN dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
4. Transfer Masuk merupakan nilai transaksi transfer masuk BMN dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
5. Pengesahan Hibah Langsung sebesar **Rp16.235.100,00** merupakan nilai realisasi pada satuan kerja KPPN Tarakan.

### **E.8 Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir*

*Rp40.653.782.064.617,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp40.653.782.064.617,00** dan **Rp38.057.945.123.283,00**.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 Penyajian Laporan Keuangan

- **Penerapan Gaji Terpusat**

Pada tanggal 6 September 2022, Satuan Kerja Kantor Pusat DJPb melakukan revisi pengurangan pagu belanja pegawai. Revisi tersebut akibat dari penerapan pembayaran gaji terpusat melalui Satker Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Sehingga, mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji induk pegawai DJPb dilaksanakan melalui Satker Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

- **Identifikasi atas Aset Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pada bagian klasifikasi aset tetap terdapat penjelasan sebagai berikut:

- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi dan jaringan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan tindaklanjut sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kembali ketepatan klasifikasi aset JIJ yang telah disajikan pada Neraca Laporan Keuangan BA 015 dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.
- Apabila terdapat aset JIJ yang teridentifikasi tidak sesuai dengan kode barang yang seharusnya, aset JIJ tersebut akan direklasifikasi ke aset yang seharusnya.
- Melakukan revaluasi kembali realisasi Belanja Pemeliharaan Jaringan untuk memastikan realisasi tersebut telah sesuai dengan kriteria pembebanan/peruntukan akun pemeliharaan dan bukan pengeluaran yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset (mengingat realisasi belanja modal JIJ tidak ada Batasan nilai kapitalisasi).

- **Persediaan dengan kondisi rusak dan usang pada DJPb**

Pada Laporan Keuangan Tingkat UAPPA E1 DJPb TA 2022, terdapat persediaan kondisi rusak dan usang pada DJPb masing-masing sebesar Rp93.554.045,- dan Rp1.628.971.520,-. Persediaan dalam kondisi rusak dan usang tersebut akan dihapuskan secara bertahap pada TA 2023. Sebagai tambahan informasi sampai dengan Laporan Keuangan Audited ini terbit, terdapat 4 (empat) Satker Lingkup DJPb yang sudah mengajukan usulan penghapusan di TA 2023 yaitu Kantor Pusat DJPb, KPPN Curup, KPPN Bima, dan KPPN Lhokseumawe. Penghapusan atas persediaan rusak dan usang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

- **Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Berat dan Sudah Tidak Digunakan pada DJPb**

Pada Laporan Keuangan Tingkat UAPPA E1 DJPb TA 2022, terdapat 2049 unit aset Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Berat dan Sudah Tidak Digunakan pada DJPb belum dihentikan dari penggunaan/operasional senilai Rp53.783.765.591,- dengan rincian pada Satker Kantor Pusat DJPb sebesar Rp53.083.257.591,- dan Kanwil DJPb Prov Sumsel sebesar Rp700.508.000,-. Atas hasil identifikasi terhadap Aset Tetap dengan kondisi rusak berat TA 2022, aset tersebut akan dilakukan tindak lanjut pada TA 2023 dengan rincian:

No	Satker	Uraian	Nilai	Tindak Lanjut
1	Kampus DJPb	Kendaraan Operasional	238.638.000	Unit akan dilakukan perubahan kondisi kembali di periode pencatatan selanjutnya
2	Kampus DJPb	Kendaraan Operasional Jabatan	3.363.000.000	Unit masih akan digunakan sebagai Kendaraan Operasional dan akan dilakukan transfer keluar ke Kantor Vertikal yang kekurangan Kendaraan Operasional, serta akan dilakukan perubahan kondisi kembali di periode pencatatan selanjutnya
3	Kampus DJPb	Sepeda Motor	59.009.700	Unit akan dihentikan penggunaannya di periode selanjutnya, kemudian diusulkan penghapusannya
4	Kampus DJPb	Rumah Negara	702.940.948	Akan dilakukan renovasi dan perubahan kondisi di

				periode pencatatan selanjutnya
5	Kampus DJPb	Rumah Negara	3.420.117.469	Rumah Negara dirusakberatkan sejak tahun 2016 dan akan dilakukan renovasi serta perubahan kondisi di periode pencatatan selanjutnya
6	Kampus DJPb	Software dan lisensi	26.440.305.992	Aset tersebut sudah dirusakberatkan pada Sensus BMN 2019 karena sudah <i>expired/takedown</i> serta akan dihentikan penggunaannya di periode selanjutnya dan diusulkan penghapusannya
7	Kampus DJPb	Peralatan dan Mesin	18.859.245.482	Masih harus dilakukan identifikasi lebih lanjut dan inventarisi. Proses Inventarisasi akan dilaporkan dalam kegiatan Sensus BMN 2023
8	Kanwil DJPb Prov Sumatera Selatan	Rumah Negara	700.508.000	Akan dilakukan renovasi serta perubahan kondisi di periode pencatatan selanjutnya

- **Aset Tetap Tanah dan Bangunan pada DJPb yang Bersengketa dan dikuasai Pihak Lain**

Terdapat Aset Tetap Tanah dan Bangunan pada DJPb yang Bersengketa dan dikuasai Pihak Lain yaitu pada satker berikut:

1. Satker Kanwil DJPb Prov Jawa Timur

- a. Tanah Negara di Jalan Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur memiliki aset berupa tanah yang terletak di Jalan Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya seluas 8880 m2 yang hingga saat ini tanah tersebut bermasalah karena pernah digugat di pengadilan oleh pihak lain. Adapun beberapa penjelasan mengenai permasalahan tersebut sebagai berikut:

- 1) Penguasaan fisik tanah oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dilakukan sejak tahun 1986 dan permohonan hak tahun 1998;
- 2) Perolehan tanah didapat dari 2 pembelian yaitu :

- a) Jual Beli dengan Pak Sumaji Darmo Suwito seluas 5000 m<sup>2</sup>. Bukti pembelian tanah berupa Sertifikat hak milik No. 20 /Menanggal 1978 milik Sumaji Darmo Suwito. Copy Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dari Sumaji ke Kanwil DJA Surabaya tanggal 31 Maret 1986 ( surat pernyataan dibawah tangan – saksi : Lurah Wonocolo dan pegawai kecamatan Wonocolo). Berdasarkan berkas-berkas yang ada, jula beli ini tidak ada masalah.
- b) Jual beli dengan Mariyatin B. Suradi seluas 4575 m<sup>2</sup>. Bukti pembelian tanah berupa :
- Kuitansi pembelian dan Surat Pernyataan Pembayaran dari Drs. Nurdin E. Wantogia (Kepala Bagian Umum) mewakili Kanwil DJA Surabaya sebesar Rp 82.350.000,- (mengetahui Camat Wonocolo)
  - Copy Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dari Mariyatin ke Kanwil DJA Surabaya tanggal 31 Maret 1986 (surat pernyataan dibawah tangan – saksi: Lurah Wonocolo dan pegawai kecamatan Wonocolo)
  - Surat keterangan tanah dari Kantor Dinas Luar Tingkat I Surabaya Timur/Selatan Nomor KET-196/WPJ.06/KI.3311/1986 tanggal 17 Juni 1986 yang menerangkan petok D nomor 244 persil 28 SII seluas 0,360 Ha seluruhnya mutasi ke 734 a.n Ny. Mariyatin B. Suradi.
- c) Dari 2 tanah tersebut dilakukan penggabungan menjadi 1 sertifikat yaitu Sertifikat Hak Pakai No.14/Kelurahan Dukuh Menanggal tanggal 31 Maret 1998, surat ukur tanggal 27 Pebruari 1998 No.02/1998, luas 8.880 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Anggaran.
- d) Atas penerbitan sertifikat tersebut, pada tanggal 28 September 2011 Hajjah Aminah yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal 85 RT.001/RW.003 Surabaya, melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (selaku tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (selaku tergugat II) di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan alasan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.14/Kelurahan Dukuh Menanggal, surat ukur tanggal 27 Pebruari 1998 No.02/1998, luas 8.880 m<sup>2</sup> atas

nama Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Anggaran berdiri di atas tanah miliknya yaitu tanah bekas hak yayasan Petok D Nomor 446 Persil 28 S.II seluas 6.530 M2.

- e) Dalam proses persidangan, Pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Dirjen Anggaran up. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur tidak merupakan “Pihak Tergugat” dalam perkara dimaksud.
- f) Berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.100/G/2011/ PTUN.sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 69/B/2012/ PT.TUN.SBY Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 469.K/TUN/2012 (fotocopy terlampir) diputuskan bahwa Sertifikat Hak Pakai No.14/Kelurahan Dukuh Menanggal, surat ukur tanggal 27 Pebruari 1998 No.02/1998, luas 8.880 m2 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Anggaran dinyatakan dibatalkan.
- g) Atas permasalahan tersebut telah kami laporkan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan surat nomor : S-71/WPB.16/BG.0103/2014 tanggal 8 Januari 2014 hal Laporan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Negara atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Anggaran beserta Dokumen Perolehan/riwayat tanah dimaksud.
- h) Berdasarkan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana dalam surat Nomor : S-818/SJ/2014 tanggal 25 Maret 2014, disebutkan bahwa putusan PTUN tersebut tidak ada amar yang menyatakan bahwa tanah dimaksud adalah milik penggugat (Hajjah Aminah) dan juga tidak terdapat perintah kepada BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat, oleh sebab itu diarahkan agar DJPb menyurati BPN yang isinya memohon agar diterbitkan kembali SHP atas nama 13 DJPb/Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI (karena terdapat perubahan organisasi).
- i) Menindaklanjuti arahan tersebut kami bersurat ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dengan surat nomor : S-1127/WPB.16/BG.0103/2014 tanggal 30 April 2014 yang isinya

bermohon kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur agar menerbitkan kembali Sertifikat Hak Pakai atas tanah/asset, seluas 8.880 m<sup>2</sup> di Kelurahan Dukuh Menanggal, surat ukur tanggal 27 Februari 1998 No.02/1998, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RI, namun kenyataannya sampai dengan sekarang pihak Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur belum memberikan jawaban atas permohonan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

j) Beberapa upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur yaitu :

- 1) Berkoordinasi dengan perangkat daerah setempat yaitu dengan RT dan Lurah Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya dengan memberikan penjelasan bahwa tanah tersebut masih milik Kementerian Keuangan RI c.q Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan permohonan bantuan kerja sama untuk pencegahan preventif apabila ada pihakpihak yang akan menguasai tanah tersebut.
- 2) Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Surabaya I dalam rangka permohonan sertipikat kembali.

b. Tanah Negara di Jalan Masjid No.22, Asemrowo, Surabaya

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur memiliki aset berupa tanah yang terletak di Jalan Masjid no.22, Asemrowo, Surabaya seluas 328 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Pakai No.08/Kelurahan Asemrowo tanggal 31 Maret 1998, surat ukur tanggal 27 Februari 1998 No.9/1998 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan RI.

- 1) Tanah negara tersebut diperuntukan untuk rumah dinas, penghuni awal rumah dinas tersebut adalah pegawai a.n Drs. FE. Sumarau dengan surat izin penghunian No.01/SIP/1982 tanggal 25 Februari 1982.
- 2) Pada tahun 2000 terdapat gugatan dari Nadji dengan perkara perdata No.434/PDT.G/2000/PN.SBY. Dalam pokok perkara penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan.
- 3) Berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- 4) Pada tahun 2001 penggugat mengajukan banding sesuai surat PN Surabaya Nomor :

W10.D.04.PA.03.01.3487/01/434/Pdt.G/2000/Pn.Sby. Namun sampai saat ini Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai relas putusan banding tersebut.

- 5) Sudah dilakukan upaya untuk permintaan relas putusan banding atas perkara No.434/PDT.G/2000/PN.SBY ke Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-4101/WPB.16/2021 tanggal 15 Desember 2021, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari PN Surabaya.
  - 6) Saat ini rumah sudah dibangun bangunan baru dan sisa bangunan rumah negara hanya terdapat dibagian belakang.
  - 7) Dihuni pihak lain sudah cukup lama. Keterangan dari RW setempat terdapat pengusiran oleh pihak lain yang menempati rumah tersebut.
  - 8) Sudah dilakukan pendekatan persuasif untuk pembuktian namun penghuni rumah tersebut tidak datang.
  - 9) Mengirimkan surat pemberitahuan ke Kelurahan Asemrowo bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat sesuai Surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Nomor : S-1461/WPB.16/BG.0103/2019 tanggal 8 Mei 2019.
  - 10) Upaya lain yg sudah dilakukan adalah berkoordinasi dengan Biro Advokasi untuk dapat memberikan solusi penyelesaian permasalahan tanah tersebut.
- c. Tanah Negara di Jalan Sekolahan No.9, Asemrowo, Surabaya
- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur memiliki aset berupa tanah yang terletak di Jalan Sekolahan no.9, Asemrowo, Surabaya seluas 322 m2 dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Pakai No.02/Kelurahan Asemrowo tanggal 31 Maret 1998, surat ukur tanggal 27 Februari 1998 No.7/1998 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan RI. Adapun beberapa penjelasan mengenai permasalahan tersebut sebagai berikut :
- 1) Tanah negara tersebut diperuntukan untuk rumah dinas, penghuni awal rumah dinas tersebut adalah pegawai a.n Moch. Saleh dengan surat izin penghunian No.253-16-18 tanggal 15 April 1975.
  - 2) Pada tahun 2016 terdapat gugatan dari H. Abdullah Ansori dengan perkara perdata No.267/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam pokok perkara penggugat adalah pemilik sah atas tanah.

- 3) Putusan tingkat pertama dan banding dimenangkan pihak lawan, namun pada putusan kasasi dan Peninjauan Kembali dimenangkan Kemenkeu.
- 4) Permasalahannya adalah rumah dinas sudah dijadikan satu dengan rumah dinas penggugat sehingga dalam eksekusi tidak memungkinkan kembalinya rumah seperti semula.
- 5) Eksekusi rumah dinas tersebut sesuai dengan putusan MA mempunyai dampak sosial mengingat penggugat adalah tokoh masyarakat yang berpengaruh dari suku tertentu.
- 6) Berkoordinasi dengan Biro Advokasi selaku pemegang wewenang dalam proses litigasi
- 7) Langkah Awal dalam rangka eksekusi, Biro Advokasi telah bersurat ke Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Surat Kepala Biro Advokasi Nomor S-78/SJ.4/2022 tanggal 27 Oktober 2022 hal Permohonan Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Perdata Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. Nomor 165/Pdt/2017/PT.Sby jo. Nomor 855 K/Pdt/2018 jo. Nomor 988 PK/Pdt/2020.
- 8) Kepala Biro Advokasi telah bersurat ke Sekretaris Ditjen Perbendaharaan hal Permintaan Nama Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus terkait Aanmaning ke PN Surabaya sesuai Nota Dinas Kepala Biro Advokasi Nomor ND-274/SJ.4/2023 tanggal 6 April 2023 hal Permintaan Nama Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus terkait Aanmaning Perkara Perdata Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. Nomor 165/Pdt/2017/PT.Sby jo. Nomor 855 K/Pdt/2018 jo. Nomor 988 PK/Pdt/2020.

## 2. Satker Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Atas Aset Tanah Milik Kanwil DJPb Sumatera Selatan Ex KBN Palembang telah diambil langkah-langkah oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan terhadap aset Tanah seluas 32.010 m<sup>2</sup> senilai Rp235.115.242.000 di Lorok Pakjo Palembang:

- 1) Melakukan rapat koordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Kanwil BPN Provinsi BPN Sumatera Selatan dan Kantor Pertanahan Kota Palembang sesuai surat Undangan nomor UND-49/WPB.07/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil rapat ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan melakukan tindak lanjut permohonan pemblokiran/tidak memproses sertifikat tanah atas aset bermasalah melalui surat kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan surat nomor S-1003/WPB.07/2021 tanggal 08 September 2021 hal Permohonan tidak memproses sertifikat aset bermasalah pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan.

- 2) Rapat Koordinasi Penyelesaian Aset Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang dikuasai pihak lain dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 dengan peserta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan beserta jajarannya, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Lurah Lorok Pakjo beserta perangkat (Ketua RW 11 dan Ketua RT 36), dengan Kesimpulan rapat antara lain:
  - a) Terdapat 3 Sertifikat Hak Pakai Kanwil DJPb Sumsel dengan kondisi 6 bangunan rumah dinas dimana 4 bangunan ditempati dan 2 bangunan kosong serta tanah lapang dan telah ditindaklanjuti pemasangan Plang Tanah dan Rumah Milik Kementerian Keuangan. Cq Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
  - b) Kepala Lurah dan perangkat desa bersedia untuk melakukan asistensi kepada Kanwil DJPb Sumsel jika akan mengadakan audiensi dengan masyarakat sekitar.
- 3) Melakukan rapat one on one meeting melalui zoom meeting dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 02 Maret 2023 terkait tanah bermasalah pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil rapat antara lain:
  - a) Kantor pusat DJPb, berdasarkan arahan biro hukum meminta Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan untuk tidak melakukan gugatan/langkah hukum terlebih dahulu terhadap warga yang menguasai aset tanah tersebut;
  - b) Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan diharapkan melakukan koordinasi yang intens dengan Badan Pertanahan setempat terkait pemblokiran penerbitan sertifikat oleh warga.

- c) Apabila ada warga yang melakukan gugatan/Langkah hukum maka akan kita hadapi secara hukum.
- 4) Melakukan audiensi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 Maret 2023 yang dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil sebagai berikut:
  - a) Surat Permohonan blokir disertai lampiran bidang-bidang aset yang akan diajukan pembokiran (S-552/WPB.07/2023 tanggal 17 Maret 2023, terlampir) dan telah ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (1054/16.71-HP.02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, terlampir)
  - b) Pengajuan Permohonan SKPT atas bidang-bidang aset yang telah diblokir.

## F.2 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perubahan Postur Anggaran

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada segala bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dampak pengelolaan keuangan tersebut termasuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, penghapusan sampai dengan penatausahaan BMN. Laporan Barang Pengguna merupakan dokumen yang mencerminkan hasil kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu tercermin pada pembukuan dan penyajian akun BMN. Kegiatan pengadaan barang dan jasa, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, RKBMN, PNBPN dari penjualan, kegiatan stock opname dan kegiatan lainnya mengalami penurunan sebagai trade off dari kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial, PSBB dan *work from home*. Untuk mengatasi permasalahan COVID-19 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut diterjemahkan kedalam beberapa peraturan teknis agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan belanja

dan pendapatan keuangan negara. Peraturan teknis yang terkait yaitu surat Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Nomor S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 hal Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa darurat COVID 19. Surat dimaksud mengatur uraian belanja, penjelasan uraian belanja, nama barang, dan mata anggaran terkait realisasi barang tersebut;
2. Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutahiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID 19. Surat dimaksud menginformasikan hal-hal yang belum diatur dan beberapa perubahan atas surat S-308/PB/2020;
3. Panduan Teknis Edisi 28 Tentang Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat (Pantek 28); dan
4. Panduan Teknis Edisi 29 Tentang Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi khusus (Pantek 29).

Peran Pengguna Anggaran dan lingkungannya yaitu agar penyajian pelaporan keuangan dapat akurat dan akuntabel. Implementasi peran tersebut yaitu mendukung agar pembukuan dan penyajian data pada Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan Surat Dirjen Perbendaharaan dan panduan teknis tersebut. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir terdapat beberapa isu yang mengemuka diantaranya yaitu dampak COVID-19 pada kegiatan penyerapan anggaran dan risiko penyajian yang belum tepat pada Laporan Keuangan.

### **F.3 Pencapaian Program Prioritas Nasional**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan III dengan rincian sebagai berikut.

1. PN I : Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pagu Anggaran PN I adalah Rp92.274.153.000 dan total realisasi sebesar Rp87.838.297.724. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN I antara lain sebagai berikut:

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Implemen SAKTI secara nasional	Rp15.397.339.000	Rp15.258.569.562	99.10	Satker	10.000	26.224	262.24
2	Penajaman Metode Analytical BLU	Rp1.073.162.000	Rp1.069.011.500	99.61	Satker	40	62	155
3	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup	Rp8.691.597.000	Rp5.094.293.953	58.61	Debitur	5.000	1939	38.78
4	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup	Rp66.054.515.000	Rp65.378.867.823	98.98	Rupiah	244 M	244 M	100
5	Pengembangan Sistem Layanan Platform pembayaran pemerintah	Rp1.057.540.000	Rp1.037.554.886	98.11	Sistem Informasi	1	1	100
Jumlah		Rp92.274.153.000	Rp87.838.297.724	95.19				

## 2. PN III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pagu Anggaran PN III adalah Rp24.235.976.000 dan total realisasi sebesar Rp23.479.908.097. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN I antara lain sebagai berikut:

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Penguatan Uji Dampak Pembiayaan Umi	Rp1.943.218.000	Rp1.934.376.945	99.55	Rekomendasi	2	2	100
2	Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial	Rp280.300.000	Rp279.108.576	99.57	Rekomendasi	1	1	100
3	Pendanaan untuk Usaha mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Umi	Rp22.012.458.000	Rp21.266.422.576	96.61	Usaha Mikro	2.000.000	2.010.709	100.54
Jumlah		Rp24.235.976.000	Rp23.479.908.097	96.88				

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan



# LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 08

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN PERBENDAHARAAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 13/05/23 4:58 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424136	Pendapatan Investasi	316,617,053,000	212,890,810,827	0	212,890,810,827	67.24
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	32,390,547,000,000	34,715,185,248,903	0	34,715,185,248,903	107.18
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	2,000,000,000	4,023,291,037	0	4,023,291,037	201.16
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241</b>	<b>32,709,164,053,000</b>	<b>34,932,099,350,767</b>	<b>0</b>	<b>34,932,099,350,767</b>	<b>106.8</b>
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum					
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	40,000,000,000	71,485,033,447	0	71,485,033,447	178.71
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4242</b>	<b>40,000,000,000</b>	<b>71,485,033,447</b>	<b>0</b>	<b>71,485,033,447</b>	<b>178.71</b>
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	158,182,000,000	1,073,094,199,995	0	1,073,094,199,995	678.39
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	99,798,661,210	0	99,798,661,210	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	608,657,277	0	608,657,277	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249</b>	<b>158,182,000,000</b>	<b>1,173,501,518,482</b>	<b>0</b>	<b>1,173,501,518,482</b>	<b>741.87</b>
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	17,000,000	102,233,000	0	102,233,000	601.37
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	30,335,674	0	30,335,674	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2,019,007,000	2,476,184,882	0	2,476,184,882	122.64
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	816,000,000	2,093,793,030	0	2,093,793,030	256.59
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,417,493,000	2,426,826,581	26,567,771	2,400,258,810	99.29
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251</b>	<b>5,269,500,000</b>	<b>7,129,373,167</b>	<b>26,567,771</b>	<b>7,102,805,396</b>	<b>134.79</b>
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	166,092,939	0	166,092,939	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257</b>	<b>0</b>	<b>166,092,939</b>	<b>0</b>	<b>166,092,939</b>	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 08

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN PERBENDAHARAAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 13/05/23 4:58 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	25,000,000	476,100,615	0	476,100,615	1904.4
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258</b>	<b>25,000,000</b>	<b>476,100,615</b>	<b>0</b>	<b>476,100,615</b>	<b>1,904.4</b>
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	205,000,000	333,195,712	0	333,195,712	162.53
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	95,000,000	116,929,180	0	116,929,180	123.08
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1,476,000,000	4,436,052,418	0	4,436,052,418	300.55
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2,750,000,000	1,388,743,887	31,965,404	1,356,778,483	49.34
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	92,000,000	0	92,000,000	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259</b>	<b>4,526,000,000</b>	<b>6,366,921,197</b>	<b>31,965,404</b>	<b>6,334,955,793</b>	<b>139.97</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42</b>	<b>32,917,166,553,000</b>	<b>36,191,224,390,614</b>	<b>58,533,175</b>	<b>36,191,165,857,439</b>	<b>109.95</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>32,917,166,553,000</b>	<b>36,191,224,390,614</b>	<b>58,533,175</b>	<b>36,191,165,857,439</b>	<b>109.95</b>

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENGEMBALIAN BELANJA; LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 08

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN PERBENDAHARAAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 13/05/23 5:38 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	290,898,126,000	165,431,435,000	165,431,434,320	38,842,500	165,392,591,820	99.98	38,843,180
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,832,000	2,811,000	2,810,136	26,070	2,784,066	99.04	26,934
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	22,683,019,000	10,501,266,000	10,501,265,768	79,652	10,501,186,116	100	79,884
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	6,447,408,000	3,088,147,000	3,088,146,514	738,846	3,087,407,668	99.98	739,332
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	19,590,450,000	9,836,030,000	9,836,030,000	2,140,000	9,833,890,000	99.98	2,140,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,025,840,000	1,491,560,000	1,491,560,000	0	1,491,560,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	883,936,000	454,220,000	454,219,505	0	454,219,505	100	495
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	16,324,730,000	8,676,279,000	8,676,278,340	0	8,676,278,340	100	660
511129	Belanja Uang Makan PNS	114,362,650,000	56,274,242,000	54,577,732,970	6,856,800	54,570,876,170	96.97	1,703,365,830
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	52,800,000	40,025,000	40,025,000	150,000	39,875,000	99.63	150,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1,100,000,000	714,560,000	714,560,000	1,120,000	713,440,000	99.84	1,120,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,637,021,000	6,110,805,000	6,110,805,000	7,850,000	6,102,955,000	99.87	7,850,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>489,011,812,000</b>	<b>262,621,380,000</b>	<b>260,924,867,553</b>	<b>57,803,868</b>	<b>260,867,063,685</b>	<b>99.35</b>	<b>1,754,316,315</b>
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	23,596,717,000	26,458,897,000	25,952,004,300	3,120,350	25,948,883,950	98.07	510,013,050
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>23,596,717,000</b>	<b>26,458,897,000</b>	<b>25,952,004,300</b>	<b>3,120,350</b>	<b>25,948,883,950</b>	<b>98.08</b>	<b>510,013,050</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>512,608,529,000</b>	<b>289,080,277,000</b>	<b>286,876,871,853</b>	<b>60,924,218</b>	<b>286,815,947,635</b>	<b>99.24</b>	<b>2264329365</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	107,452,621,000	114,807,650,000	114,243,903,503	10,012,876	114,233,890,627	99.5	573,759,373
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,604,929,000	2,202,452,000	1,998,168,528	910,000	1,997,258,528	90.68	205,193,472
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	32,440,031,000	31,478,946,000	31,261,520,750	70,000	31,261,450,750	99.31	217,495,250
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21,399,624,000	24,080,541,000	23,761,989,986	1,283,144	23,760,706,842	98.67	319,834,158
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,351,865,000	1,483,817,000	1,467,554,020	0	1,467,554,020	98.9	16,262,980
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>170,249,070,000</b>	<b>174,053,406,000</b>	<b>172,733,136,787</b>	<b>12,276,020</b>	<b>172,720,860,767</b>	<b>99.24</b>	<b>1,332,545,233</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	28,880,950,000	29,158,307,000	27,693,773,791	10,000	27,693,763,791	94.98	1,464,543,209
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,544,990,000	4,961,982,000	4,944,525,000	33,115,000	4,911,410,000	98.98	50,572,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,581,245,000	2,035,587,000	2,006,211,113	550,401	2,005,660,712	98.53	29,926,288
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	480,642,000	474,463,979	0	474,463,979	98.71	6,178,021
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>37,007,185,000</b>	<b>36,636,518,000</b>	<b>35,118,973,883</b>	<b>33,675,401</b>	<b>35,085,298,482</b>	<b>95.86</b>	<b>1,551,219,518</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,922,639,000	17,793,674,000	17,668,411,138	0	17,668,411,138	99.3	125,262,862
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,100,036,000	572,821,000	564,503,839	0	564,503,839	98.55	8,317,161

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 08

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN PERBENDAHARAAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 13/05/23 5:38 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	18,022,675,000	18,366,495,000	18,232,914,977	0	18,232,914,977	99.27	133,580,023
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	31,184,611,000	33,298,379,000	32,935,109,943	38,625,552	32,896,484,391	98.79	401,894,609
522112	Belanja Langganan Telepon	4,414,776,000	3,878,072,000	3,801,264,274	1,542,012	3,799,722,262	97.98	78,349,738
522113	Belanja Langganan Air	2,570,179,000	2,958,828,000	2,893,263,373	0	2,893,263,373	97.78	65,564,627
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,083,564,000	1,752,905,000	1,680,842,259	5,863,328	1,674,978,931	95.55	77,926,069
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,130,440,000	7,651,930,000	6,105,452,000	0	6,105,452,000	79.79	1,546,478,000
522141	Belanja Sewa	4,217,126,000	4,012,442,000	3,748,963,550	0	3,748,963,550	93.43	263,478,450
522151	Belanja Jasa Profesi	7,267,262,000	4,754,601,000	4,557,971,250	1,133,500	4,556,837,750	95.84	197,763,250
522191	Belanja Jasa Lainnya	66,851,963,000	45,899,832,000	41,081,409,265	115,500,000	40,965,909,265	89.25	4,933,922,735
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8,292,629,000	936,242,000	841,337,404	900,000	840,437,404	89.77	95,804,596
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	132,012,550,000	105,143,231,000	97,645,613,318	163,564,392	97,482,048,926	92.87	7,661,182,074
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45,933,439,000	51,759,594,000	51,581,788,950	9,000,972	51,572,787,978	99.64	186,806,022
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,820,761,000	3,621,782,000	3,583,197,194	100,000	3,583,097,194	98.93	38,684,806
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240,056,377,000	183,045,822,000	182,511,932,537	1,215,855	182,510,716,682	99.71	535,105,318
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	288,810,577,000	238,427,198,000	237,676,918,681	10,316,827	237,666,601,854	99.69	760,596,146
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	59,287,950,000	85,629,873,000	84,269,997,518	8,833,303	84,261,164,215	98.4	1,368,708,785
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,565,845,000	3,908,819,000	3,652,248,000	890,000	3,651,358,000	93.41	257,461,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,571,472,000	33,808,603,000	33,234,590,755	4,590,000	33,230,000,755	98.29	578,602,245
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,283,084,000	22,663,338,000	22,409,046,809	1,800,000	22,407,246,809	98.87	256,091,191
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	103,708,351,000	146,010,633,000	143,565,883,082	16,113,303	143,549,769,779	98.33	2,460,863,221
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	375,000,000	1,415,526,000	1,406,957,906	0	1,406,957,906	99.39	8,568,094
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242</b>	375,000,000	1,415,526,000	1,406,957,906	0	1,406,957,906	99.39	8,568,094
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	127,662,599,000	142,869,549,000	133,899,241,143	0	133,899,241,143	93.72	8,970,307,857
525112	Belanja Barang	12,377,425,000	11,597,948,000	9,295,209,503	0	9,295,209,503	80.15	2,302,738,497
525113	Belanja Jasa	43,203,196,000	53,609,572,000	50,184,304,088	0	50,184,304,088	93.61	3,425,267,912
525114	Belanja Pemeliharaan	1,780,169,000	2,195,185,000	1,535,835,224	0	1,535,835,224	69.96	659,349,776
525115	Belanja Perjalanan	24,217,179,000	27,138,740,000	22,636,819,400	0	22,636,819,400	83.41	4,501,920,600
525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	5,737,450,257,000	36,184,173,419,000	36,164,055,179,838	0	36,164,055,179,838	99.94	20,118,239,162
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1,445,000,000	651,800,000	603,914,790	0	603,914,790	92.65	47,885,210
525151	Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	6,302,134,000	64,825,964,000	64,427,184,472	0	64,427,184,472	99.38	398,779,528
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	486,200,000	194,450,000	133,466,478	0	133,466,478	68.64	60,983,522

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 08

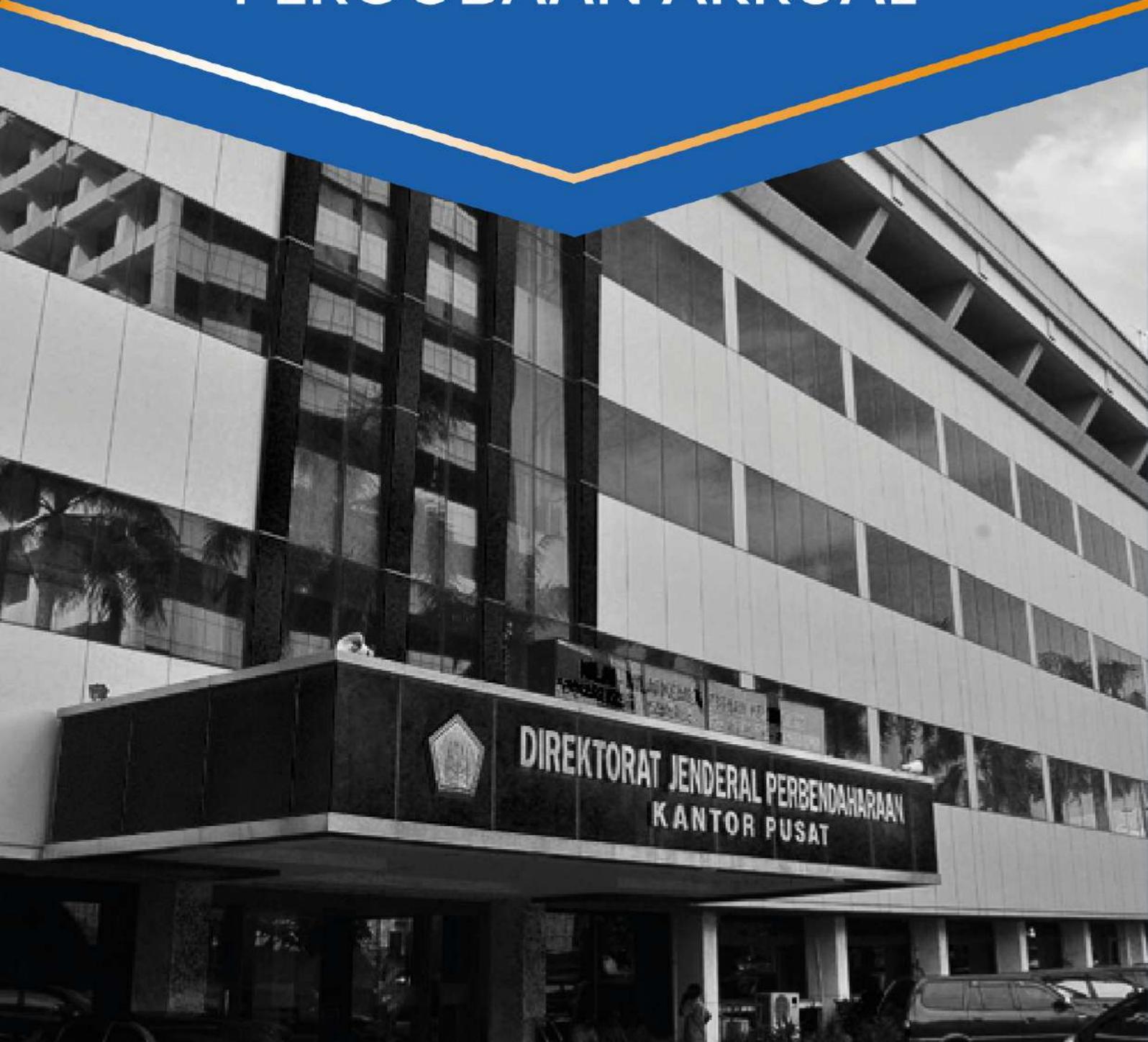
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN PERBENDAHARAAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 13/05/23 5:38 PM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	648,025,000	164,144,000	127,282,000	0	127,282,000	77.54	36,862,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	5,955,572,184,000	36,487,420,771,00	36,446,898,436,93	0	36,446,898,436,93	99.89	40,522,334,064
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,705,757,592,000	37,207,473,778,00	37,153,278,835,57	235,945,943	37,153,042,889,62	99.85	54430888373
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,208,409,000	73,588,599,000	73,363,622,899	0	73,363,622,899	99.69	224,976,101
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	4,915,000	4,910,000	0	4,910,000	99.9	5,000
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	1,250,000	1,238,000	0	1,238,000	99.04	12,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	34,844,000	34,844,000	0	34,844,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	61,208,409,000	73,629,608,000	73,404,614,899	0	73,404,614,899	99.69	224,993,101
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,514,082,000	14,424,200,000	14,339,979,684	0	14,339,979,684	99.42	84,220,316
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	42,185,311,000	50,932,361,000	50,794,161,822	0	50,794,161,822	99.73	138,199,178
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	53,699,393,000	65,356,561,000	65,134,141,506	0	65,134,141,506	99.66	222,419,494
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	26,290,600,000	26,290,590,750	0	26,290,590,750	100	9,250
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	1,335,504,000	1,333,817,709	0	1,333,817,709	99.87	1,686,291
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	27,626,104,000	27,624,408,459	0	27,624,408,459	99.99	1,695,541
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	3,306,536,000	3,506,711,000	3,188,136,023	0	3,188,136,023	90.92	318,574,977
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1,104,855,000	2,398,855,000	2,204,367,870	0	2,204,367,870	91.89	194,487,130
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	4,411,391,000	5,905,566,000	5,392,503,893	0	5,392,503,893	91.31	513,062,107
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	119,319,193,000	172,517,839,000	171,555,668,757	0	171,555,668,757	99.44	962170243
	JUMLAH BELANJA	7,337,685,314,000	37,669,071,894,00	37,611,711,376,18	296,870,161	37,611,414,506,01	99.85	57,657,387,981

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan

# NERACA PERCOBAAN KAS DAN NERACA PERCOBAAN AKRUAL



## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 14/05/23 12:01 PM

Tgl Cetak : 14/05/23 6:03 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	7,721,142	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,842,284,230	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	1,040,105,905	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	1,526,704,394,286	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	23,030,600,000,000	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	3,057,426,608,776	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	1,557,868,953,830	0
0.0	114115	Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	2,099,077,799	0
0.0	114211	Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	1,019,845,910	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	457,355,338,948	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	128,456,441	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	284,510,382	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	12,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	128,456,441
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	1,422,552
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	60,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,980,555,095	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	394,306,374	0
0.0	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	1,332,605,202,696	0
0.0	121632	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen	6,640,289,050,977	0
0.0	123112	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga	0	149,261,062,919
0.0	123113	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya	0	17,887,262,378
0.0	123332	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0	33,201,445,255
0.0	131111	Tanah	9,072,828,813,486	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,636,741,890,276	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,061,188,950,999	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	479,879,000	0
0.0	134112	Irigasi	133,819,000	0
0.0	134113	Jaringan	500,838,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	10,675,172,282	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,380,901,094	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	13,133,398,275	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,355,866,825,559
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	509,869,862,014
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	445,097,251
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	24,125,526
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	131,265,782

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 14/05/23 12:01 PM

Tgl Cetak : 14/05/23 6:03 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	113,185,500
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1,907,443,863	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	1,639,612,264
0.0	162151	Software	372,679,933,752	0
0.0	162161	Lisensi	473,557,080,925	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	44,889,000	0
0.0	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	7,118,197,617,793	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	25,264,635,498	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	197,478,400	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	24,899,708,009
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	368,804,952,730
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	188,133,426,121
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	197,478,400
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	306,095,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	15,389,932,100
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,841,991,730
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	0	1,018,166,080
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	1,505,831,273
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	7,721,142
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	22,232,325
0.0	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	0	15,091,091,871,466
0.0	311315	Penyesuaian SAL BLU	0	796,696,346
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,159,123,565,190
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	14,079,954,743	0
0.0	313211	Transfer Keluar	64,855,459,022	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	45,081,248,658
0.0	391111	Ekuitas	0	38,057,945,123,283
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	212,827,655,997	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	19,875,234,041	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	16,235,100
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	117,846,300
3.0	424136	Pendapatan Investasi	0	248,166,567,502
3.0	424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	0	34,715,185,248,903
3.0	424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	0	12,899,080,777
3.0	424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	71,485,033,447
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,165,508,058,454

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 14/05/23 12:01 PM

Tgl Cetak : 14/05/23 6:03 PM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	99,637,531,993
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	2,082,015,800
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	102,233,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	30,335,674
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,476,184,882
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,093,793,030
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,866,536,915
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	277,144,640
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	476,100,615
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	331,282,395
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	116,929,180
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	92,000,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	735,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	164,723,555,220	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2,775,114	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	10,437,707,996	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	3,065,884,940	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,833,890,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,491,560,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	454,219,505	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	8,676,278,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	54,375,920,120	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	39,875,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	713,440,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,102,955,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	25,951,668,950	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	114,243,287,287	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,994,818,898	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	31,261,450,750	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	23,754,396,492	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,467,554,020	0
3.0	521211	Beban Bahan	27,693,763,791	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,911,410,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,005,660,712	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	473,593,979	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	33,263,490,243	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,824,921,337	0

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 14/05/23 12:01 PM

Tgl Cetak : 14/05/23 6:03 PM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,760,990,267	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,635,775,957	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	6,105,452,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,722,133,142	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,556,837,750	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	40,723,438,353	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	840,437,404	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51,575,003,978	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3,583,097,194	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182,507,000,682	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	84,261,164,215	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,651,358,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33,230,000,755	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22,407,246,809	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,406,957,906	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	133,899,241,143	0
3.0	525112	Beban Barang	9,477,893,256	0
3.0	525113	Beban Jasa	53,109,668,396	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	1,535,835,224	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	22,636,819,400	0
3.0	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	32,986,289,742,163	0
3.0	525151	Beban Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	64,427,184,472	0
3.0	525152	Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	133,466,478	0
3.0	525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	127,282,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	147,764,727,471	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	95,742,643,688	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	79,937,565	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	6,272,367	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	12,834,442	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2,830,000	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	9,056,049,641	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	45,799,845,528	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	210,232,405	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	19,128,041,784	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	756,971,682	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	7,489,859	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	722,062	0
3.0	594632	Beban Penyisihan Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	50,639,834,696	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 14/05/23 12:01 PM

Tgl Cetak : 14/05/23 6:03 PM

Halaman : 5

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	594822	Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	0	1,757,891,953
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	84,160,695
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	7,364,724,713	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	1,387,948,771	0
JUMLAH			<b>93,353,538,669,549</b>	<b>93,353,538,669,549</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

# NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 14/05/23 12:01 PM

Tgl Cetak : 14/05/23 6:03 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	37,611,414,506,019
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	36,191,165,857,439	0
3.0	424136	Pendapatan Investasi	0	212,890,810,827
3.0	424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	0	34,715,185,248,903
3.0	424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	0	4,023,291,037
3.0	424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	71,485,033,447
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,073,094,199,995
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	99,798,661,210
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	608,657,277
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	102,233,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	30,335,674
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,476,184,882
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,093,793,030
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,426,826,581
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	166,092,939
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	476,100,615
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	333,195,712
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	116,929,180
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,436,052,418
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,388,743,887
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	92,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	165,431,434,320	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,810,136	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10,501,265,768	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3,088,146,514	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,836,030,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,491,560,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	454,219,505	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	8,676,278,340	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	54,577,732,970	0
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	40,025,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	714,560,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,110,805,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	25,952,004,300	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	114,243,903,503	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,998,168,528	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31,261,520,750	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 14/05/23 12:01 PM

Tgl Cetak : 14/05/23 6:03 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,761,989,986	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,467,554,020	0
3.0	521211	Belanja Bahan	27,693,773,791	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,944,525,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,006,211,113	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	474,463,979	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17,668,411,138	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	564,503,839	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	32,935,109,943	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,801,264,274	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,893,263,373	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,680,842,259	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	6,105,452,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,748,963,550	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,557,971,250	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	41,081,409,265	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	841,337,404	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51,581,788,950	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3,583,197,194	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182,511,932,537	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	84,269,997,518	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,652,248,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33,234,590,755	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22,409,046,809	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,406,957,906	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	133,899,241,143	0
3.0	525112	Belanja Barang	9,295,209,503	0
3.0	525113	Belanja Jasa	50,184,304,088	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	1,535,835,224	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	22,636,819,400	0
3.0	525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	36,164,055,179,838	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	603,914,790	0
3.0	525151	Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	64,427,184,472	0
3.0	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	133,466,478	0
3.0	525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	127,282,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73,363,622,899	0
3.0	532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	4,910,000	0
3.0	532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	1,238,000	0

# NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 14/05/23 12:01 PM

Tgl Cetak : 14/05/23 6:03 PM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	34,844,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,339,979,684	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	50,794,161,822	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	26,290,590,750	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1,333,817,709	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	3,188,136,023	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	2,204,367,870	0
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	26,567,771	0
3.1	425991	Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	31,965,404	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	38,842,500
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	26,070
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	79,652
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	738,846
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,140,000
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	6,856,800
3.1	511135	Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	150,000
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	1,120,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	7,850,000
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	3,120,350
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	10,012,876
3.1	521114	Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	910,000
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	70,000
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,283,144
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	10,000
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	33,115,000
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	550,401
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	38,625,552
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	1,542,012
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	5,863,328
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	1,133,500
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	115,500,000
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	900,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	9,000,972
3.1	523119	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	100,000
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,215,855
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	8,833,303
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	890,000

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 14/05/23 12:01 PM

Tgl Cetak : 14/05/23 6:03 PM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	4,590,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,800,000
JUMLAH			<b>73,802,935,766,794</b>	<b>73,802,935,766,794</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan

# TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK



Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan

# DAFTAR SALDO REKENING PEMERINTAH



**DAFTAR REKENING  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PERIODE 31 DESEMBER 2022**

KL	BA	kdkwl	kdsaktor	Nama Satker	No Rek	Jenis Rok	Nama Rekening	Nama Bank	Nomor Surat Izin	Tanggal Surat Izin Rekening	Saldo	Keterangan
015	08	-	439165	KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (KSAP)	8100134391651000	BPG	BPG 019 KSAP	Mandiri KCP KPNK Jakarta II	S-150/WPB.12/KP.02/2020	10-Jan-20	0,00	Nihil
015	08	-	439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	8100124391711000	BPG	BPG 019 SPAN	Mandiri KCP KPNK Jakarta II	S-4378/WPB.12/KP.0204/2019	14-6-2019	0,00	0,00
015	08	-	527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	650015270101000	BPG	BPG 019 KANTOR PUSAT DIPB	BRI KC JAKARTA VETERAN	S-1607/WPB.12/KP.0204/2019	20-Mar-19	0,00	0,00
015	08	-	527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0000010015084647	RKK	RKK DITJEN PERBENDAHARAAN	BNI	-	-	218.433.200	-
015	08	-	527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	032901004183307	RKK	RKK DIJEN PERBENDAHARAAN	BRI	-	-	214.024.542	-
015	08	-	527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	1030020030009	RKK	RKK DIJEN PERBENDAHARAAN	Mandiri	-	-	1.001.916.000	-
015	08	-	527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	1190005673940	RPL	RPL 019 DIPBN UTK TUKIN	Bank Mandiri	S-6226/MK.5/2015	24-Jul-15	0,00	0,00
015	08	-	615081	KOMITE INVESTASI PEMERINTAH	8100126150811000	BPG	BPG 019 KIP	-	-	-	0,00	-
015	08	001	527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	8100255275561000	BPG	BPG 001 KANWIL DIPB ACEH	PT. BANK SYARIAH INDONESIA	S-1186/WPB.12/KP.02/2021	23-Aug-21	0,00	0,00
015	08	001	527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	1057908073	RPL	RPL 001 PS KANWIL DIPB ACEH UTK TUKIN	PT. BANK SYARIAH INDONESIA	000365	23-Jun-21	0,00	0,00
015	08	001	527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	8100255275601000	BPG	BPG 001 KPPN BANDA ACEH	PT. BANK SYARIAH INDONESIA	S-1186/WPB.12/KP.02/2021	23 August 2021	0,00	Nihil
015	08	001	527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	1054944329	RPL	RPL 001 KPPN BANDA UTUK TUKIN	PT. BSI KCP SIMPANG SURABAYA	000342/2001	14 June 2021	0,00	Nihil
015	08	001	527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MELULABOH	8100255275771000	BPG	BPG 003 KPPN MELULABOH	BANK SYARIAH INDONESIA KCP MELULABOH	S-1541/WPB.12/KP.02/2020	6-Mar-20	4.186.400	-
015	08	001	527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MELULABOH	714293977	RPL	RPL 003 PS KPPN MELULABOH	BANK SYARIAH INDONESIA KCP MELULABOH	S-341/WPB.01/KP.03/2020	20-Ago-20	0,00	0,00
015	08	001	527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	8100255275811000	BPG	BPG 002 KPPN LANGSA	BANK SYARIAH INDONESIA	ND-4827/WPB.01/KP.04/2020	16-Nov-20	0,00	-
015	08	001	527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	1166116666	RPL	RPL 002 KPPN LANGSA UTK PS TUKIN	BANK SYARIAH INDONESIA	S-450/WPB.01/KP.04/2020	7/16/2020	0,00	0,00
015	08	001	527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	8100255275981000	BPG	BPG 074 KPPN TAPAKTUAN	BANK SYARIAH INDONESIA	S-384/WPB.01/KP.05/2020	15 July 2020	28.720.000	Perjalan pindah pejabat pegawai yang dibayarkan di tahun 2023 karena belum SPMT pada tahun 2022
015	08	001	527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	1054842666	RPL	RPL 074 PS KPPN TAPAKTUAN UTK TUKIN	BRI SYARIAH KCP TAPAKTUAN	S-77/WPB.01/KP.05/2021	21 July 2021	0,00	Nihil
015	08	001	527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKE SULEMAWE	8100255276031000	BPG	BPG 089 KPPN LHOKE SULEMAWE	BANK SYARIAH INDONESIA KCP LHOKE SULEMAWE	S-7377/WPB.12/KP.02/2021	23-Ago-21	0,00	-
015	08	001	527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKE SULEMAWE	772020128	RPL	RPL 089 PS KPPN LSW UTK TKPKN	BANK SYARIAH INDONESIA KCP LHOKE SULEMAWE	S-1145/WPB.01/KP.02/2020	20-Jul-20	0,00	0,00
015	08	001	527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	8100255276101000	BPG	BPG 105 KPPN KUTACANE	BANK SYARIAH INDONESIA KCP KUTACANE	S-1186/WPB.12/KP.02/2021	23-Aug-21	0,00	0,00
015	08	001	527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	1054829317	RPL	RPL 105 KPPN KUTACANE	BANK SYARIAH INDONESIA KCP KUTACANE	S-176/WPB.01/KP.06/2021	13-Jul-21	0,00	0,00
015	08	001	527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	8100255276241000	BPG	BPG 122 KPPN TAKENGON	BANK SYARIAH MANDIRI KCP TAKENGON	S-1541/WPB.12/KP.02/2020	3-Ago-20	0,00	0,00
015	08	001	527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	7142864295	RPL	RPL122 PS KPPN TAKENGON UTK TKPKN	BANK SYARIAH MANDIRI KCP TAKENGON	S-393/WPB.01/KP.07/2020	17-Jul-20	0,00	0,00
015	08	002	451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	650014515621000	BPG	BPG 123 KPPN MEDAN II	BRI KC JAKARTA VETERAN	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	002	451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	005301004357305	RPL	RPL 123 KPPN MEDAN II UTK PS TKPKN	BRI CABANG PUTRI HIAJU MEDAN	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	002	527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	650015276451000	BPG	BPG 023 KANWIL DIPB SUMUT	BRI KC JAKARTA VETERAN	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	622,600	-
015	08	002	527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	005301004358301	RPL	RPL 123 KANWIL PROV. SUMUT UTK TKPKN	BRI CABANG PUTRI HIAJU MEDAN	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	0,00
015	08	002	527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	650015276521000	BPG	BPG 123 KPPN MEDAN I	BRI KC JAKARTA VETERAN	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	002	527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	005301004356309	RPL	RPL 123 KPPN MEDAN I UTK PS TKPKN	BRI KC PUTRI HIAJU MEDAN	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	002	527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANGSIANTAR	650015276661000	BPG	BPG 005 KPPN PEMATANGSIANTAR	BRI KC JAKARTA VETERAN	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	16.690.400	Perjalan pindah pejabat pegawai yang dibayarkan di tahun 2023 karena belum SPMT pada tahun 2022
015	08	002	527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANGSIANTAR	011301001817302	RPL	RPL 005 KPPN PEMATANGSIANTAR UTK PS TKPKN	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cab. Pematangsiantar	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	0,00
015	08	002	527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPULJAN	650015276701000	BPG	BPG 006 KPPN PADANGSIDEMPULJAN	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.-PADANG SIDEMPULJAN	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	43.194.000	Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Pejabat Eselon IV
015	08	002	527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPULJAN	7145337784	RPL	RPL006 KPPN PADANGSIDEMPULJAN PStPKN	PT.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG SIDEMPULJAN	000006/006	16-Sep-20	0,00	Nihil
015	08	002	527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	650015276871000	BPG	BPG 007 KPPN GUNUNG SITOLI	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG GUNUNG SITOLI	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	3.199.600	Perjalan pindah pejabat pegawai yang dibayarkan di tahun 2023 karena belum SPMT pada tahun 2022
015	08	002	527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	017601001272308	RPL	RPL 007 KPPN GUNUNG SITOLI UTK PS TKPKN	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG GUNUNG SITOLI	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	002	527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI	650015276911000	BPG	BPG 076 KPPN TB. BALAI	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG TANJUNGBALAI	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	0,00	0,00
015	08	002	527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI	015401000874307	RPL	RPL 076 KPPN TANJUNGBALAI PS TKPKN	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG TANJUNGBALAI	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	002	527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	650015277091000	BPG	BPG 075 KPPN RANTAU PRAPAT	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG RANTAU PRAPAT	S-205/WPB.02/KP.08/2019	20-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	002	527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	022801001431301	RPL	RPL 075 KPPN RANTAU PRAPAT	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	002	527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	9890015277131000	BPG	BPG 106 KPPN SIBOLGA	BNI CABANG SIBOLGA	S-1211/WPB.02/KP.09/2019	18-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	002	527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0000001061061089	RPL	RPL 106 KPPN SIBOLGA UTK PS TKPKN	BNI CABANG SIBOLGA	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	002	527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	650015277341000	BPG	BPG 119 KPPN SIDIKALANG	BRI KC JAKARTA VETERAN	S-136/WPB.03/KP.10/2019	19-Ago-19	4.155.200	-
015	08	002	527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	01940100860303	RPL	RPL 119 KPPN SIDIKALANG UTK PS TKPKN	BRI CAB. SIDIKALANG	S-984/PB.1/2017	2-Feb-17	0,00	0,00
015	08	002	527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	650015277411000	BPG	BPG 124 KPPN TEBING TINGGI	BRI KC JAKARTA VETERAN	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	36.043.200	Uang Pindah Pegawai
015	08	002	527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	028301000795302	RPL	RPL 124 KPPN TEBING TINGGI UTK PS TKPKN	BANK BRI CABANG TEBING TINGGI	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	0,00
015	08	002	527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	650015277551000	BPG	BPG 125 KPPN BALIGE	BRI CABANG BALIGE	S-233/WPB.02/KP.11/2019	20-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	002	527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	013401001174306	RPL	RPL 125/KPPN BALIGE UTK PS TKPKN	BRI CABANG BALIGE	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	003	527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	650015277761000	BPG	BPG 010 KANWIL DIPB SUMBAR	PT BRI (PERSERO) TBK - KCP KHATIB SULAIMAN	S-494/WPB.03/KP.01/2019	20-Mar-19	24.626.400	Uang Pindah Pegawai
015	08	003	527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	069601000408303	RPL	RPL 010 KANWIL PROV SUMBAR UTK PS TKPKN	PT BRI (PERSERO) TBK - KCP KHATIB SULAIMAN	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	003	527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	650015277801000	BPG	BPG 010 KPPN PADANG	BRI CABANG JAKARTA VETERAN	S-482/WPB.03/KP.01/2019	19-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	003	527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	005801003090307	RPL	RPL 010 KPPN PADANG UTK PS TKPKN	BRI CABANG PADANG	S-984/PB.1/2017	25-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	003	527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	650015277971000	BPG	BPG 011 KPPN BUKITTINGGI	BRI KC JAKARTA VETERAN	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	0,00	0,00
015	08	003	527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	001501001614306	RPL	RPL 011 KPPN BUKITTINGGI UTK PENAMPUNGAN SEMENTARA	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG BUKITTINGGI	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	0,00
015	08	003	527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SILUJUNJUNG	650015278021000	BPG	BPG 077 KPPN SILUJUNJUNG	BRI KC JAKARTA VETERAN	S-186/WPB.03/KP.0503/2019	20-Ago-19	0,00	0,00
015	08	003	527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SILUJUNJUNG	027101000942306	RPL	RPL 077 KPPN SILUJUNJUNG UTK PENAMPUNGAN SEMENTARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - SILUJUNJUNG	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	0,00
015	08	003	527813	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	650015278131000	BPG	BPG 090 KPPN SOLOK	BRI KC SOLOK	S-680/WPB.03/KP.090/2019	20-Mar-19	0,00	0,00
015	08	003	527813	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	009101001653308	RPL	RPL 090 KPPN SOLOK	BRI KC SOLOK	S-560/MK.55/2017	16-Jan-17	0,00	0,00
015	08	003	527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	650025278231000	BPG	BPG 091 KPPN LUBUK SIKAPING	BRI Cabang Jakarta Veteran	S-75/WPB.03/KP.091/2019	19-Mar-19	1.600.000	-
015	08	003	527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	026901001291309	RPL	RPL 091 KPPN LUBUK SIKAPING UTK PS TKPKN	BRI Cabang Lubuk Sikaping	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	0,00
015	08	003	634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	650016344091000	BPG	BPG 142 KPPN PAINAN	BRI KC JAKARTA VETERAN	S-080/WPB.03/KP.0603/2019	19-Mar-19	24.312.000	Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Pejabat Pegawai
015	08	003	634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	027001001455308	RPL	RPL 142 KPPN PAINAN UTK PENAMPUNGAN SEMENTARA TKPKN	BRI KC Painan	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	004	527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	9890015278441000	BPG	BPG 008 KPPN PEKANBARU	BNI KC PECEONGBAN	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	0,00	0,00
015	08	004	527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	00000000506234548	RPL	RPL 008 KPPN PEKANBARU UTK PS TKPKN	BNI Cabang Pekanbaru	S-560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	004	527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	9890015278651000	BPG	BPG 092 KPPN RENGAT	BNI CABANG PECEONGBAN	S-118/WPB.04/KP.0303/2019	19-Mar-19	11.040.000	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Uang Perjalanan Dinas Pindah an Sisa Aftonitas, S.E.)
015	08	004										

KL	BA	kdwlw	kdsatkor	Nama Satker	No Rek	Jenis Rek	Nama Rekening	Nama Bank	Nomor Surat Izin	Tanggal Surat Izin Rekening	Saldo	Keterangan
015	08	006	527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	8100125279751000	BPG	BPG 109 KPPN Baturaja	Bank Mandiri Kc Baturaja	S170/WPB.07/KP.0204/2019	20 March 2019	0,00	Nihil
015	08	006	527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	00080100958301	RPL	RPL 109 KPPN BATURAJA UTK PS TKPPN	Bank BRI Kc Baturaja	S399/WPB.07/KP.0204/2018	10-Apr-18	0,00	Nihil
015	08	006	634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	8100126345301000	BPG	BPG 144 KPPN LAHAT	BANK MANDIRI Kc Lahat	S149/WPB.07/KP.0530/2015	13 Februari 2015	0,00	Nihil
015	08	006	634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	00400010224304	RPL	RPL 144 KPPN LAHAT UTK PS TKPPN	BANK BRI Kc Lahat	S560/MK.05/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	006	648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	8100126487791000	BPG	BPG 160 KPPN SEKAYU	BANK MANDIRI CABANG SEKAYU	ND-695/PB.3/2019	12-Jun-19	0,00	Nihil
015	08	006	648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	1130011715764	RPL	RPL 160 KPPN SEKAYU UTK PS TKPPN	BANK MANDIRI CABANG SEKAYU	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	007	528011	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	810012528011000	BPG	BPG 017 KANWIL DITJEN LAMPUNG	BANK MANDIRI KCP CUT MUTIA	S1912/WPB.08/KP.0104/2019	17-Jun-19	0,00	-
015	08	007	528011	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	1140012347988	RPL	RPL 017 KANWIL PROV LAMPUNG UTK PS TKPPN	BANK MANDIRI KCP CUT MUTIA	S560/PKM.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	007	528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	8100125280151000	BPG	BPG 017 KPPN BANDAR LAMPUNG	PT BANK MANDIRI KC JAKARTA Plaza Mandiri	S1911/WPB.08/KP.0104/2019	17 June 2019	0,00	-
015	08	007	528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	1140012347996	RPL	RPL 017 KPPN BANDAR LAMPUNG UTK PS TKPPN	PT. BANK MANDIRI KC CUT Meutia	S560/MK.05/2017	16 January 2017	0,00	-
015	08	007	528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	650015280221000	BPG	BPG 116 KPPN KOTABUMI	BRI KC JAKARTA VETERAN	S1166/ WPB.08/KP.0304/2019	20-Mar-19	35,404,000	-
015	08	007	528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	015001009781308	RPL	RPL 116 KPPN KOTABUMI UTK PS TKPPN	BRI KC KOTABUMI	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	007	528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	8100125280361000	BPG	BPG 126 KPPN METRO	BANK MANDIRI KCP METRO	S396/WPB.08/ KP.0204/2019	16-Jan-19	0,00	-
015	08	007	528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	1140012347640	RPL	RPL126 KPPN METRO UTK PS TKPPN	BANK MANDIRI KCP METRO	S560/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	-
015	08	007	634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	9890016345721000	BPG	BPG 145 KPPN LIWA	BNI KC PECEANONGAN	ND-299/PB.3/2019	13 March 2019	0,00	-
015	08	007	634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	1140001458880	RPL	RPL 145 KPPN LIWA UTK PS TKPPN	BANK MANDIRI KCP LIWA	S24/WPB.08/KP.04/2019	14 January 2019	0,00	-
015	08	008	445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	650014453711000	BPG	BPG 181 KPPN MUKOMUKO	BRI KC MUKOMUKO	S169/WPB.09/KP.03/2019	18 March 2019	0,00	-
015	08	008	445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	110101000582308	RPL	RPL 181 KPPN MUKOMUKO UTK PS TKPPN	BRI KC MUKOMUKO	S560/MK.5/2017	25 January 2017	0,00	-
015	08	008	528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	8100125287851000	BPG	BPG 016 KPPN BENGKULU	BANK MANDIRI KC BENGKULLU A.YANI	ND-695/PB.3/2019	12 June 2019	0,00	-
015	08	008	528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	1790001012733	RPL	RPL 016 KPPN BENGKULU UTK PS TKPPN	BANK MANDIRI KC BENGKULLU A.YANI	S560/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	-
015	08	008	528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	650015287921000	BPG	BPG 121 KPPN MANNA	BANK BRI KC MANNA	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	0,00	-
015	08	008	528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	015001008131306	RPL	RPL 121 KPPN MANNA UTK PS TKPPN	BANK BRI KC MANNA	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	008	613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	8100126137501000	BPG	BPG 016 KANWIL DITJEN BENGKULU	BANK MANDIRI CABANG S. PARMAN	S203/WPB.09/KP.0104/2018	24 January 2018	0,00	-
015	08	008	613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	17900010128103	RPL	RPL 016 KANWIL PROV BENGKULU UTK TKPPN	BANK MANDIRI CABANG S. PARMAN	S560/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	-
015	08	008	634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	650026346081000	BPG	Bpg 146 KPPN Curup	BANK BRI KC CURUP	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-21	66,020,000	Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Pejabat Pengawas
015	08	008	634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	010801002194306	RPL	RPL 146 KPPN CURUP UTK PS TKPPN	BANK BRI KC CURUP	S984/PB.1/2017	25-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	009	527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	8100125279541000	BPG	BPG 015 KPPN PANGKAL PINANG	BANK MANDIRI CABANG PANGKALPINANG	ND-695/PB.3/2019	12-Jun-19	0,00	-
015	08	009	527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	006300101949300	RPL	RPL 015 KPPN PANGKAL PINANG UTK PS TKPPN	BANK BRI KC PANGKALPINANG	S3081/WPB.10/KP.015/2016	24-Nov-16	0,00	-
015	08	009	527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	650015279821000	BPG	BPG 107 KPPN TANJUNG PANDAN	Bank BRI KC TANJUNGPANDAN	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	009	527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	013100101211305	RPL	RPL 107 KPPN TANJUNG PANDAN UTK PS TKPPN	BANK BRI KC TANJUNGPANDAN	S1152/WPB.10/KP.02/2019	20-Mar-19	0,00	-
015	08	009	634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	8100126342561000	BPG	BPG 015 KANWIL DITJEN BABEL	Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang	ND-695/PB.3/2019	12-Jun-19	3,766,000	Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Pejabat Pengawas
015	08	009	634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	006301001948304	RPL	RPL 015 KANWIL PROV BABEL UTK PS TKPPN	Bank BRI KC Pangkalpinang	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	010	527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	650025271621000	BPG	BPG 020 KPPN Serang	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang	S381/WPB.11/KP.0104/2019	20-Mar-19	0,00	-
015	08	010	527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	008401003077033	RPL	RPL 020 KPPN SERANG UTK PS TKPPN	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang	S984/PB.1/2017	25-Jan-17	0,00	-
015	08	010	634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	650016342601000	BPG	BPG 020 KANWIL DITJEN BANTEN	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang	S382/WPB.11/KP.0104/2019	20-Mar-19	0,00	-
015	08	010	634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	008401003076307	RPL	RPL 020 KANWIL PROV BANTEN UTK PS TKPPN	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang	S984/PB.1/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	010	634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	650016346331000	BPG	BPG 127 KPPN TANGERANG	PT. Bank Rakyat Indonesia KC Jakarta Veteran	S279/WPB.11/KP.02/2019	20-Mar-19	0,00	-
015	08	010	634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	7106153242	RPL	RPL 127 KPPN TANGERANG UTK PS TKPPN	Bank Syariah Mandiri	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	010	648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	650016487831000	BPG	BPG 161 KPPN RBST	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Rangkasbitung	S180/WPB.11/KP.0303/2019	20-Mar-19	0,00	-
015	08	010	648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0680010016651308	RPL	RPL 161 KPPN RANGKAS BITUNG UTK PS TKPPN	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Rangkasbitung	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	011	15114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	8100120151141000	BPG	BPG 019 KPPN JAKARTA VI	PT. BANK MANDIRI KC JAKARTA GAMBRIR	S1586/WPB.12/KP.06/2019	19-Mar-19	0,00	-
015	08	011	15114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	1190008493055	RPL	RPL 019 KPPN JAKARTA VI UTK PS TKPPN	PT. BANK MANDIRI KC JAKARTA GAMBRIR	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	011	15115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	650010151151000	BPG	BPG 019 KPPN JAKARTA VII	PT Bank Rakyat Indonesia Kc Oستا	S1609/WPB.12/KP.02/2019	20-Mar-19	0,00	-
015	08	011	15115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	034001002350306	RPL	RPL 019 KPPN JAKARTA VII UTK PS TKPPN	PT Bank Rakyat Indonesia Kc Oستا	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	011	15116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	8100120151161000	BPG	BPG 019 KPPN KHUSUS PENERIMAAN	Mandiri Kk Jkt KPPN	S3214/WPB.12/KP.0204/2019	18-Jun-19	0,00	-
015	08	011	15116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	103000842922	RPL	RPL 019 KPPN KHUSUS PENERIMAAN UTK PS TKPPN	Mandiri Kk Jkt KPPN	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	011	15117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	650010151171000	BPG	BPG 019 KPPN KHUSUS INVESTASI	PT. Bank Rakyat Indonesia Kc Jakarta Veteran	S1602/WPB.12/KP.0204/2019	20-Mar-19	0,00	-
015	08	011	15117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	05070100030308	RPL	RPL 019 KPPN INVESTASI UTK PS TKPPN	PT. Bank Rakyat Indonesia Kc Jakarta Veteran	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	011	527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	650015270271000	BPG	BPG 019 KANWIL DITJEN JAKARTA	PT. Bank Rakyat Indonesia Kc Veteran	S1585/WPB.12/KP.0204/2019	19-Mar-19	0,00	-
015	08	011	527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	034001002351302	RPL	RPL 019 KANWIL PROV DKI JKT UTK PS TKPPN	PT. Bank Rakyat Indonesia Kc Jakarta Oستا	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	011	527021	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	650025270211000	BPG	BPG 019 KPPN JAKARTA I	PT. Bank Rakyat Indonesia Kc Veteran	S1582/WPB.12/KP.0204/2019	19-Mar-19	0,00	-
015	08	011	527021	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	124301000021300	RPL	RPL 019 KPPN JAKARTA I UTK PS TKPPN	Bank BRI	S984/PB.1/2017	25-Jan-17	0,00	-
015	08	011	527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	8100125270481000	BPG	BPG 019 KPPN JAKARTA II	Mandiri KCP KPN Jkt 2	S3162/WPB.12/KP.0204/2019	16-Jan-19	0,00	-
015	08	011	527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	103000842161	RPL	RPL 019 KPPN JAKARTA II UTK PS TKPPN	Mandiri KCP KPN Jkt 2	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	011	527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	650015270521000	BPG	BPG 019 KPPN JAKARTA III	Bank BRI Kc Oستا	S1608/WPB.12/KP.0204/2019	16-Jan-19	0,00	-
015	08	011	527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	034001002349305	RPL	RPL 019 KPPN JAKARTA III UTK PS TKPPN	Bank BRI Kc Oستا	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	011	531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	650015312931000	BPG	BPG 019 KPPN JAKARTA IV	BRI KC Jakarta Veteran	S1587/WPB.12/KP.0204/2019	19-Mar-19	0,00	-
015	08	011	531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	124301000022306	RPL	RPL 019 KPPN JAKARTA IV UTK PS TKPPN	BRI KC KPPN Jakarta I	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	011	579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	650015793301000	BPG	BPG 019 KPPN JAKARTA V	BRI KC Jakarta Veteran	S1612/WPB.12/KP.0204/2019	16-Jan-19	0,00	-
015	08	011	579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	1010001395555	RPL	RPL 019 KPPN JAKARTA V UTK PS TKPPN	Mandiri Kc. Keboayan Lama	S4126/WPB.12/KP.0204/2018	13-Jul-18	0,00	-
015	08	011	613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	8100126138111000	BPG	BPG 019 KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	Bank Mandiri	S1601/WPB.12/KP.0204/2019	20-Mar-19	0,00	-
015	08	011	613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	103000842906	RPL	RPL 019 KPPN KPH UTK PS TKPPN	Bank Mandiri	S178/WPB.12/KP.0610/2017	31-Jan-17	0,00	-
015	08	012	451511	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	650014515111000	BPG	BPG 022 KPPN BANDUNG II	BRI KC JAKARTA VETERAN	ND-299/PB.3/2019	19 March 2019	0,00	-
015	08	012	451511	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	03540100301301	RPL	RPL 022 KPPN BANDUNG II UTK PS TKPPN	BRI Cabang Bandung Narijan	S560/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	-
015	08	012	527004	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0150010021790302	RPL	RPL 022 KANWIL DITJEN JAWA BARAT	BRI Cabang Asia Afrika Bandung	S1584/WPB.13/KP.0104/2019	13 March 2019	0,00	-
015	08	012	527004	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	002050102363303	RPL	RPL 022 KANWIL PROV JABAR UTK PS TKPPN	BRI Cabang Asia Afrika Bandung	S560/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	-
015	08	012	527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	650015271021000	BPG	BPG 022 KPPN BANDUNG I	BRI Cabang Bandung Narijan	S559/WPB.13/KP.0104/2019	19 March 2019	0,00	-

KL	BA	kd/wl	ksd/sktr	Nama Sdkter	No Rek	Jenis Rek	Nama Rekening	Nama Bank	Nomor Surat Izin	Tanggal Surat Izin Rekening	Saldo	Keterangan
015	08	013	527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	650025273221000	BPG	BPG 097 KPPN PATI	Bank Rakyat Indonesia Kc Pati	5/259/WPB.14/KP.04/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	013	527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	006601002101305	RPL	RPL 097 KPPN PATI UTK PS TKPN	Bank Rakyat Indonesia Kc Pati	5/560/MK/5/2017	16 January 2017	0,00	NHIL
015	08	013	527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	9800015273361000	BPG	BPG 129 KPPN KUDUS	Bank Negara Indonesia Kc Kudus	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	013	527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	0000000096382654	RPL	RPL 129 KPPN KUDUS UTK PS TKPN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 KUDUS	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	013	527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	650015273401000	BPG	BPG 115 KPPN MAGELANG	Bank Rakyat Indonesia Kc Jakarta Veteran	ND-135/WPB/14/KP.09/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	013	527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	153301000026301	RPL	RPL 115 KPPN MAGELANG UTK PS TKPN	BRI CAB MAGELANG	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	013	527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	8100125273571000	BPG	BPG 118 KPPN TEGAL	Bank Mandiri Kc Tegal A. R. Hakim	ND-695/PB.3/2019	12-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	013	527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	1390066006060	RPL	RPL 118 PS KPPN TEGAL UTK TKPN	Bank Mandiri Kc Tegal A.R. Hakim	5/984/PB.1/2017	25-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	013	527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	9800015273611000	BPG	BPG 130 KPPN CILACAP	BNI KC PECEANONGAN	5/047/WPB.14/KP.15/2019	18-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	013	527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	000000005926426	RPL	RPL 130 KPPN CILACAP UTK PS TKPN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BNI CABANG CILACAP	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	013	634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	9800016347221000	BPG	BPG 148 KPPN KLATEN	BNI KC PECEANONGAN	ND-299/PB.3/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	013	634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	000000005767236	RPL	RPL 148 KPPN KLATEN UTK PS TKPN	BRI Cabang Blitar	5/066/WPB.14/KP.148/2016	19-Feb-16	0,00	NHIL
015	08	013	648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	650015488051000	BPG	BPG 162 KPPN SRAGEN	PT. BRI KC Jakarta Veteran	5/112/WPB.14/KP.110/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	013	648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	014001001435301	RPL	RPL 162 KPPN SRAGEN UTK PS TKPN	PT. BRI KC Sragen	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	013	648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	650016488121000	BPG	BPG 163 KPPN PURWODADI	BRI KC Jakarta Veteran	5/146/WPB.14/KP.13/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	013	648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	007601002369304	RPL	RPL 163 KPPN PURWODADI UTK PS TKPN	Bank Rakyat Indonesia Purwodadi	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	013	648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	650016488261000	BPG	BPG 164 KPPN BANJARNEGARA	Bank Rakyat Indonesia Banjarnegara	5/32/WPB.14/KP.1403/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	013	648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	000401001276305	RPL	RPL 164 KPPN BANJARNEGARA UTK PS TKPN	Bank Rakyat Indonesia Banjarnegara	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	014	497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	650014975871000	BPG	BPG 176 KPPN WATES	BRI KC Jakarta Veteran	5/173/WPB.15/KP.03/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	014	497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	015201000804304	RPL	RPL 176 KPPN WATES UTK PS TKPN	BRI KC WATES	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	014	527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	650015273991000	BPG	BPG 030 KPPN YOGYAKARTA	BRI CABANG YOGYAKARTA KATAMSO	5/522/KPN.1202/2022	23-Mar-22	0,00	NHIL
015	08	014	527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	1370012911760	RPL	RPL 030 KPPN YOGYAKARTA UTK PS TKPN	MANDIRI CABANG YOGYAKARTA KATAMSO	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	014	634277	KANWIL DIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	8100126342771000	BPG	BPG 030 KANWIL DIJEN YOGYAKARTA	MANDIRI CABANG YOGYAKARTA KATAMSO	5/1355/WPB.15/KP.01.04/2019	17-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	014	634277	KANWIL DIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	1370012965001	RPL	RPL 030 KANWIL DIJEN YOGYAKARTA	MANDIRI CABANG YOGYAKARTA KATAMSO	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	014	634782	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	81001527347821000	BPG	BPG 149 KPPN WONOSARI	BRI KC JAKARTA VETERAN	ND-353/WPB.14/KP.0204/2019	19-Feb-16	0,00	NHIL
015	08	014	634782	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	015301001378300	RPL	RPL 149 KPPN WONOSARI UTK PS TKPN	BRI CABANG WONOSARI	5/984/PB.3/2017	25-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	8100124515531000	BPG	BPG 031 KPPN SURABAYA II	MANDIRI KCP SBY DARMO RAYA	5/1222/WPB.16/KP.0104/2019	17-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	1420015495640	RPL	RPL 031 KPPN SURABAYA II UTK PS TKPN	MANDIRI KCP SBY DARMO RAYA	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527411	KANWIL DIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	8100125274111000	BPG	BPG 031 KANWIL DIJEN JATIM	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK - MANDIRI SURABAYA NIAGA	5/1202/WPB.16/KP.0104/2019	17-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	527411	KANWIL DIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	1400016219587	RPL	RPL 031 KANWIL DIJEN JATIM UTK PS TKPN	BANK MANDIRI CABANG NIAGA SURABAYA	5/560/MK/5/2017	16-Jan-19	0,00	NHIL
015	08	015	527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	8100125274251000	BPG	BPG 031 KPPN SURABAYA I	MANDIRI CABANG SURABAYA NIAGA	5/1206/WPB.16/KP.0104/2019	17-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	1400016211336	RPL	RPL 031 KPPN SURABAYA I UTK PS TKPN	MANDIRI CABANG SURABAYA NIAGA	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	8100125274321000	BPG	BPG 032 KPPN MALANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KC Jakarta Plaza Mandiri	5/659/WPB.16/KP.04/2019	14-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	1440016405356	RPL	RPL 032 KPPN MALANG UTK PS TKPN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KCP MALANG MERDEKA	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	650015274461000	BPG	BPG 034 KPPN KEDIRI	PT. BRI (Persero) Cabang Kediri	5/240/WPB.16/KP.08.04/2019	22-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	015	527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	003301003484807	RPL	RPL 034 KPPN KEDIRI UTK PS TKPN	PT. BRI (Persero) Cabang Kediri	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527459	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	8100125274591000	BPG	BPG 035 KPPN MADIUN	BANK MANDIRI CABANG MADIUN	5/9542/WPB.16/KP.0704/2019	19-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	527459	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	1710020376802	RPL	RPL 035 KPPN MADIUN UTK PS TKPN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK BANK MANDIRI CABANG MADIUN	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	650015274671000	BPG	BPG 035 KPPN BONDOWOSO	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK BONDOWOSO	5/321/WPB.16/KP.0604/2019	23-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	1430074477447	RPL	RPL 035 KPPN BONDOWOSO	BANK MANDIRI KCP BONDOWOSO	5/166/WPB.16/KP.06/2020	12-Feb-20	0,00	NHIL
015	08	015	527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	650015274711000	BPG	BPG 036 KPPN PAMEKASAN	BRI KC JAKARTA VETERAN	5/145/WPB.16/KP.036/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	015	527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	006101002803305	RPL	RPL 036 KPPN PAMEKASAN UTK PENEMPATAN PS TKPN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK-PAMEKASAN	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	650015274881000	BPG	BPG 073 KPPN BOJONEGORO	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	5/382/WPB.16/KP.1203/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	015	527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	001101002049304	RPL	RPL 073 KPPN BOJONEGORO UTK PS TKPN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BOJONEGORO	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	650015274921000	BPG	BPG 100 KPPN BANYUWANGI	BRI KC JAKARTA VETERAN	5/405/WPB. 16/KP. 1303/2019	18-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	015	527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	000701002141301	RPL	RPL 100 KPPN BANYUWANGI UTK PS TKPN	BRI KC BANYUWANGI	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	8100125275001000	BPG	BPG 098 KPPN MOJOKERTO	PT. BANK MANDIRI KC JAKARTA PLAZA MANDIRI	5/279/WPB.16/KP.10/2019	10-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	005501001843305	RPL	RPL 098 KPPN MOJOKERTO UTK PS TKPN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MOJOKERTO	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	650015275141000	BPG	BPG 099 KPPN PACITAN	BRI KC JAKARTA VETERAN	5/482/WPB.16/KP.15/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	015	527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	006701000163301	RPL	RPL 099 KPPN PACITAN UTK PS TKPN	BRI	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	650015275211000	BPG	BPG 131 KPPN JEMBER	BRI KC JAKARTA VETERAN	5/363/WPB.16/KP.11/2019	23-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	015	527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	002101001905306	RPL	RPL 131 KPPN JEMBER UTK PS TKPN	BRI	5/560/MK/5/2017	16-Jan-19	0,00	NHIL
015	08	015	634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	8100126348601000	BPG	BPG 150 KPPN BLITAR	Bank Mandiri Cabang Blitar	5/322/WPB.16/KP.0901/2019	13-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	1710002574922	RPL	RPL 150 KPPN BLITAR UTK PS TKPN	Bank Mandiri Cabang Blitar	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	015	648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	8100126488301000	BPG	BPG 165 KPPN SIDOARJO	BANK MANDIRI CABANG SIDOARJO	5/934/WPB. 16/KP. 0304/2019	18-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	1410015744105	RPL	RPL 165 KPPN SIDOARJO UTK PS TKPN	BANK MANDIRI	5/1103/MK. 5/2016	30-Dec-16	0,00	NHIL
015	08	015	648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	8100126488891000	BPG	BPG 166 KPPN TUBAN	Bank Mandiri Cabang Tuban	5/283/WPB.16/KP.1401/2019	18-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	015	648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	1780009098133	RPL	RPL 166 KPPN TUBAN UTK PS TKPN	Bank Mandiri Cabang Tuban	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	016	528057	KANWIL DIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	650015280571000	BPG	BPG 042 KANWIL DIJEN KALBAR	Bank BRI Cabang Barito Pontianak	5/1147/WPB.17/KP.0104/2019	20-Mar-19	139,174,400	-
015	08	016	528057	KANWIL DIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	007101002773809	RPL	RPL 042 KANWIL DIJEN KALBAR UTK PS TKPN	Bank BRI Cabang Barito Pontianak	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	016	528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	8100125280611000	BPG	BPG 042 KPPN PONTIANAK	Bank Mandiri Cabang Ngarai Rai Pontianak	5/2542/WPB.17/KP.0140/2019	14-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	016	528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	1460010355852	RPL	RPL 042 KPPN PONTIANAK UTK PS TKPN	Bank Mandiri Cabang Ngarai Rai Pontianak	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	016	528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	8100125280781000	BPG	BPG 079 KPPN SINTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SINTANG	5/125/WPB.17/KP.05/2019	25-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	016	528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	02401001208306	RPL	RPL 079 KPPN SINTANG UTK PS TKPN	BANK BRI CABANG SINTANG	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	016	528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	9800015280821000	BPG	BPG 054 KPPN KETAPANG	BRI CAB. KETAPANG, KALBAR	ND-299/PB.3/2019	19-Mar-19	0,00	NHIL
015	08	016	528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	1460010355753	RPL	RPL 054 KPPN KETAPANG UTK PS TKPN	MANDIRI CAB. KETAPANG, KALBAR	5/61/WPB.16/KP.094/2017	27-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	016	528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	8100125280991000	BPG	BPG 093 KPPN SINGKAWANG	BANK MANDIRI	ND-695/PB.3/2019	12-Jun-19	44.411,000	Uang Pelaiaran Pindah
015	08	016	528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	00890100921309	RPL	RPL 093 KPPN SINGKAWANG UTK PS TKPN	BANK BRI	5/560/MK/5/2017	16-Jan-17	0,00	NHIL
015	08	016	528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	650015281041000	BPG	BPG 117 KPPN PUTUSSIBAU	BRI KC JAKARTA VETERAN	5/55/WPB.17/KP.06/2019	18 March 2019	0,00	NHIL
015	08	016	528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	030501001579303	RPL	RPL 117 KPPN PUTUSSIBAU UTK PS TKPN	BRI Cabang Putussibau	5/560/MK/5/2017	16 January 2017	0,00	NHIL
015	08	016	648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGALU	8100126488931000	BPG	BPG 167 KPPN SANGGALU	BANK MANDIRI CABANG SANGGALU	5/358/WPB.17/KP.03/2019	14-Jun-19	0,00	NHIL
015	08	016	648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGALU	146001035727							

KL	BA	kd/kw	ksdsatko	Nama Satker	No Rek	Jenis Rek	Nama Rekening	Nama Bank	Nomor Surat Izin	Tanggal Surat Izin Rekening	Saldo	Keterangan
015	08	030	528544	KANWIL DIPTEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	036801002132301	RPL	RPL 037 KANWIL PROV BALI UTK PS TKPKN	PT. BRI (Persero) Cab. Renon	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA DENPASAR	650015285511000	BPG	BPG 017 KPPN DENPASAR	PT. BRI (Persero) Cab. Renon	5/414/WPB.22/KP.0104/2019	19 March 2019	0,00	Nihil
015	08	030	528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA DENPASAR	036801002131802	RPL	RPL 037 KPPN DENPASAR UTK PS TKPKN	PT. BRI (Persero) Cab. Renon	5/984/PB.1/2017	25 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	528505	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA SINGARAJA	650015285051000	BPG	BPG 132 KPPN SINGARAJA	BRI Cabang Singaraja	ND-299/PB.3/2019	13 March 2019	0,00	Nihil
015	08	030	528505	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA SINGARAJA	008001001254303	RPL	RPL 132 KPPNSINGARAJA UTK PS TKPKN	BANK RAKYAT INDONESIA	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA AMLAPURA	650016350451000	BPG	BPG 154 KPPN AMLAPURA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK. CABANG AMLAPURA	5/77/WPB. 21/KP.03/2019	18 March 2019	0,00	Nihil
015	08	030	635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA AMLAPURA	024101001332301	RPL	RPL 154 KPPN AMLAPURA UTK PS TKPKN	BANK RAKYAT INDONESIA	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	021	528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA MATARAM	8100125285861000	BPG	BPG 038 KPPN MATARAM	BPG 038 KPPN MATARAM	5/707 /WPB.23/KP.01/2019	17 June 2019	0,00	Nihil
015	08	021	528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA MATARAM	1610003699640	RPL	RPL 038 KPPN MATARAM UTK PS TKPKN	PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	021	528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA BIMA	9890015285901000	BPG	BPG 071 KPPN BIMA	PT. BANK NEGARA INDONESIA	299/PB.3/2019	19 March 2019	0,00	Nihil
015	08	021	528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA BIMA	0000000506234821	RPL	RPL 071 KPPN BIMA UTK PS TKPKN	PT. BANK NEGARA INDONESIA	5/600/KM.05/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	021	528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA SUMBAWA BESAR	9800015286081000	BPG	BPG 101 KPPN SUMBAWA BESAR	BNI KCP Pecenongan	ND-695/PB.3/2019	13 March 2019	0,00	Nihil
015	08	021	528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA SUMBAWA BESAR	0000000050801134	RPL	RPL 101 KPPN SUMBAWA BESAR	BNI CABANG SUMBAWA BESAR	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	021	613785	KANWIL DIPTEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	650016137851000	BPG	BPG 038 KANWIL DIPB NTB	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. - BANK BRI CAB MATARAM	5/292/WPB. 23/KP.01/2019	20-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	021	613785	KANWIL DIPTEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0052001020983304	RPL	RPL 038 KANWIL PROV NTB UTK PS TKPKN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. - BANK BRI CAB MATARAM	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	021	648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA SELONG	8100126488471000	BPG	BPG 169 KPPN SELONG	BANK MANDIRI KCP SELONG	5/246/WPB.23/KP.03/2019	18-Jun-19	0,00	Nihil
015	08	021	648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA SELONG	1610003667552	RPL	RPL 169 KPPN SELONG UTK PS TKPKN	BANK MANDIRI KCP SELONG	5/600/MK.05/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	022	528629	KANWIL DIPTEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	8100125286291000	BPG	BPG 039 KANWIL DIPB PROV. NTT	BANK MANDIRI KUPANG URIP SUMOHARJO	5/134/WPB.24/KP.01/2019	27-Jun-19	0,00	Nihil
015	08	022	528629	KANWIL DIPTEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1810000059650	RPL	RPL 039 KANWIL PROV NTT UTK PS TKPKN	BANK MANDIRI KUPANG URIP SUMOHARJO	BR-125/KPN.2402/2022	9-Feb-22	0,00	Nihil
015	08	022	528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA KUPANG	8100125286331000	BPG	BPG 039 KPPN KUPANG	BANK MANDIRI KUPANG URIP SUMOHARJO	5/1/WPB.24/KP.0101/2019	25-Jun-19	0,00	Nihil
015	08	022	528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA KUPANG	1810000059643	RPL	RPL 039KPPN KUPANG UTK PS TKPKN	BANK MANDIRI KUPANG URIP SUMOHARJO	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	022	528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA ENDE	000015286401000	BPG	BPG 040 KPPN Ende	BRI CABANG ENDE	5/220/WPB.24/KP.06/2019	18-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	022	528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA ENDE	0024010010242302	RPL	RPL 040 KPPN ENDE UTK PS TKPKN	BRI CABANG ENDE	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	022	528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA WAINANGUPU	650015286541000	BPG	BPG 041 KPPN WAINANGUPU	BRI KC WAINANGUPU	5/155/WPB.24/KP.0201/2019	19-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	022	528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA WAINANGUPU	981001403998420	RPL	RPL 041 KPPN WAINANGUPU	BRI KC WAINANGUPU	5/342/WPB.25/KP.02/2019	20-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	022	528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA RUTENG	9800015286611000	BPG	BPG 111 KPPN RUTENG	BNI KC Pecenongan	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	022	528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA RUTENG	00000005056728648	RPL	RPL 111 KPPN RUTENG UTK PS TKPKN	BNI KC Ende	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	022	652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA ATAMBUIA	9800016524531000	BPG	BPG 172 KPPN ATAMBUIA	BNI KC Pecenongan	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	69.735.200	Perjudin Mutasi Es IV
015	08	022	652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA ATAMBUIA	00000000505819878	RPL	RPL 172 KPPN ATAMBUIA UTK PS TKPKN	BNI KCP Atambua	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	022	662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA LARANTUKA	650016627701000	BPG	BPG 174 KPPN LARANTUKA	BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LARANTUKA	5/118/WPB.24/KP.05/2019	20 March 2019	0,00	Nihil
015	08	022	662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA LARANTUKA	024601001031303	RPL	RPL 174 KPPN LARANTUKA UTK PS TKPKN	BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LARANTUKA	5/600/MK.5/2017	16 January 2016	0,00	Nihil
015	08	023	451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA MAKASSAR II	650014515781000	BPG	BPG 136 KPPN MAKASSAR II	BRI CAB. MAKASSAR A YANI	5/341/WPB.25/KP.02/2019	20 March 2019	68.720.000	-
015	08	023	451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA MAKASSAR II	005001002956305	RPL	RPL 136 KPPN MAKASSAR II UTK PS TKPKN	BRI CAB. SINIAI	5/1182/MK.05/2017	20 December 2017	0,00	-
015	08	023	497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA SINIAI	650014975931000	BPG	BPG 177 KPPN SINIAI	BRI CAB. SINIAI	5/96/WPB.25/KP.06/2019	21 March 2019	0,00	Nihil
015	08	023	497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA SINIAI	025801001395300	RPL	RPL 177 KPPN SINIAI UTK PS TKPKN	BRI CAB. SINIAI	5/1182/MK.05/2017	20 December 2017	0,00	Nihil
015	08	023	528366	KANWIL DIPTEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	650015283661000	BPG	BPG 136 KANWIL DIPB SULSEL	BRI CAB. MAKASSAR A YANI (0050)	5/344/WPB.25/KP.02/2019	20-Mar-19	99.885.000	Perjudin Mutasi Es IV
015	08	023	528366	KANWIL DIPTEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	00501002956307	RPL	RPL 054 KANWIL DIPB PROV SULSEL UTK PS TKPKN	BRI CAB. MAKASSAR A YANI (0050)	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	023	528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA MAKASSAR I	650015283701000	BPG	BPG 136 KPPN MAKASSAR I	BRI CAB. MAKASSAR A YANI	5/342/WPB.25/KP.02/2019	20-Mar-19	9.720.000	Perjudin Mutasi Es IV
015	08	023	528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA MAKASSAR I	005001002957301	RPL	RPL 054 KPPN MAKASSAR I UTK PS TKPKN	BRI CAB. MAKASSAR A YANI	5/984/PB.3/2017	25-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	023	528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA PARE PARE	650015283871000	BPG	BPG 057 KPPN PAREPARE	BRI CAB. PAREPARE	5/360/WPB.25/KP.0304/2019	22-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	023	528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA PARE PARE	006401001006300	RPL	RPL057 KPPN PAREPARE UTK PS TKPKN	BRI CAB. PAREPARE	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	023	528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA BANTAENG	650015283911000	BPG	BPG 056 KPPN BANTAENG	BRI CAB. BANTAENG	5/149/WPB.24/KP.0504/2019	19-Mar-19	9.602.000	Perjudin Mutasi Es IV
015	08	023	528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA BANTAENG	024001001358303	RPL	RPL 056 KPPN BANTAENG UTK TKPKN	BRI CAB. BANTAENG	5/600/MK.05/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	023	528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA PALOPO	650015284091000	BPG	BPG KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA PALOPO	BRI CAB. PALOPO	5/423/WPB.25/KP.04/2019	4-Jul-19	32.496.000	Uang SPD Mutasi Eselon 4
015	08	023	528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA PALOPO	018701001320302	RPL	RPL 058 KPPN PALOPO UTK PS TKPKN	BRI CAB. PALOPO	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	023	528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA WATAMPONE	8100125284201000	BPG	BPG 055 KPPN WATAMPONE	BANK MANDIRI CABANG WATAMPONE	5/206/WPB.25/KP.08/2019	18-Jun-19	0,00	-
015	08	023	528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA WATAMPONE	1700001441421	RPL	RPL 055KPPN WATAMPONE UTK PS TKPKN	BANK MANDIRI CABANG WATAMPONE	5/984/PB.1/2017	25-Jan-17	0,00	-
015	08	023	635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA BENTENG	650016351201000	BPG	BPG 155 KPPN BENTENG	BRI KC Jakarta Veteran	5/76/WPB.25/KP.07/2019	19 March 2019	79.800.000	Perjudin Mutasi Es IV
015	08	023	635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA BENTENG	025701000992290	RPL	RPL 155 KPPN BENTENG UTK PS TKPKN	BRI KC Benteng Selayar	5/984/PB.1/2017	25 January 2017	0,00	Nihil
015	08	023	648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA MAKALE	650015283701000	BPG	BPG 170 KPPN MAKALE	BRI KC BANTAPAD	5/156/WPB.25/KP.0903/2019	19 March 2019	44.640.000	-
015	08	023	648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA MAKALE	023201000895307	RPL	RPL 170 KPPN MAKALE	BRI KC BANTAPAD	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	024	528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA PALLU	8100125283101000	BPG	BPG 051 KPPN PALLU	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC JKT PLAZA MANDIRI	5/542/WPB.27/KP.0104/2019	19-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	024	528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA PALLU	1510007627869	RPL	RPL 051 KPPN PALLU UTK PS TKPKN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC PALLU SAM RATULIANGI	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	024	528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA LUWUK	8100125283241000	BPG	BPG 053 KPPN LUWUK	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC JKT PLAZA MANDIRI	5/360/WPB.26/KP.03/2019	13-Jun-19	0,00	Nihil
015	08	024	528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA LUWUK	1510007625822	RPL	RPL 053 KPPN LUWUK UTK PS TKPKN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC LUWUK	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	024	528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA POSO	8100125283311000	BPG	BPG 052 KPPN POSO	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC JKT PLAZA MANDIRI	5/635/WPB.27/KP.02/2019	13-Jun-19	0,00	Nihil
015	08	024	528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA POSO	1510007630558	RPL	RPL 052 KPPN POSO	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC POSO	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	024	528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA TOLI TOLI	8100125283451000	BPG	BPG 082 KPPN TOLITOLI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC JKT PLAZA MANDIRI	5/249/WPB.27/KP.0403/2019	20-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	024	528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA TOLI TOLI	1510007626366	RPL	RPL 082 KPPN TOLI-TOLI UTK PS TKPKN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC TOLITOLI	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	024	611807	KANWIL DIPTEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	8100126138071000	BPG	BPG 051 KANWIL DIPB SULTEG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC JKT PLAZA MANDIRI	5/661/WPB.27/KP.0104/2019	19 March 2019	178.770.000	Uang Perjudin Pindah
015	08	024	611807	KANWIL DIPTEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1510007627414	RPL	RPL 051 KANWIL PROV SULTEG UTK PS TKPKN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC PALLU SAM RATULIANGI	5/600/MK.5/2017	26 January 2017	0,00	Nihil
015	08	025	528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA KENDARI	8100125284411000	BPG	BPG 060 KPPN KENDARI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC PALLU MESIJD AGUNG KENDARI	5/075/WPB.28/KP.0104/2019	13 January 2019	62.280.000	-
015	08	025	528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA KENDARI	000016609055	RPL	RPL 060 KPPN KENDARI UTK PS TKPKN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. - KC PALLU MESIJD AGUNG KENDARI	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	025	528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA BALI BAU	650015284551000	BPG	BPG102 KPPN BAUBAU	PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Baubau	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	19.808.000	Perjudin mutasi Es IV
015	08	025	528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE GARA BALI BAU	032601001							

KL	BA	kodwil	ksadsat	Nama Satker	No Rek	Jenis Rek	Nama Rekening	Nama Bank	Nomor Surat Izin	Tanggal Surat Izin Rekening	Saldo	Keterangan
015	08	039	652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	030001001177305	RPL	RPL 173 KPPN MASOHI UTK PS TKPKN	BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MASOHI	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	528662	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	8100125286621000	BPG	BPG 063 KANWIL DJPB PAPUA	MANDIRI KC JKT PLAZA MANDIRI	5/908/WPB.34/KP/01/2019	18 June 2019	0,00	Nihil
015	08	030	528662	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	1540013994581	RPL	RPL 063 KANWIL PROV. PAPUA UTK PS TKPKN	BANK MANDIRI KC JAYAPURA AHMAD YANI	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	8100125286961000	BPG	BPG 063 KPPN JAYAPURA	MANDIRI KC JKT PLAZA MANDIRI	5/916/WPB.34/KP/01/2019	18 June 2019	0,00	Nihil
015	08	030	528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	1540013995224	RPL	RPL 063 KPPN JAYAPURA UTK PS TKPKN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - JAYAPURA	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	8100125287011000	BPG	BPG 064 KPPN BIAK	MANDIRI KC JKT PLAZA MANDIRI	5/193/WPB.34/KP/03/2019	20 June 2019	145,012.000	Uang Perjudin Mutasi Eselon 4
015	08	030	528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	1540013991868	RPL	RPL 064 KPPN BIAK UTK PS TKPKN	MANDIRI KC BIAK	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	8100125287431000	BPG	BPG 068 KPPN MERAUKE	MANDIRI KC JKT PLAZA MANDIRI	5/356/WPB.34/KP/02/2019	17 June 2019	81,880.000	Uang Perjudin Mutasi Eselon 4
015	08	030	528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	1540013996537	RPL	RPL 068 KPPN MERAUKE UTK PS TKPKN	MANDIRI KC MERAUKE	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	650015287501000	BPG	BPG 085 KPPN NABIRE UTK PS TKPKN	BRI	5/100/WPB.34/KP/05/2019	20 March 2019	9,709.600	Uang SPD Mutasi Eselon 4
015	08	030	528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	068701000799304	RPL	RPL 085 KPPN NABIRE UTK PS TKPKN	BRI	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	528754	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	8100125287541000	BPG	BPG 113 KPPN WAMENA	MANDIRI KC JKT PLAZA MANDIRI	5/344/WPB.34/KP/06/2019	17 June 2019	62,120.000	Uang Mutasi Pegawai Eselon IV
015	08	030	528754	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	1540013994656	RPL	RPL 113 KPPN WAMENA UTK PS TKPKN	MANDIRI KC WAMENA	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	8100125390491000	BPG	BPG 138 KPPN SERUI	MANDIRI KC JKT PLAZA MANDIRI	5/198/WPB.34/KP/04/2019	17 June 2019	4,416.000	mutasi eselon 4
015	08	030	539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	1540013995158	RPL	RPL 138 KPPN SERUI UTK PS TKPKN	MANDIRI KC SERUI	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	030	613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	8100126138321000	BPG	BPG 141 KPPN TIMIKA	MANDIRI KC JKT PLAZA MANDIRI	5/327/WPB.34/KP/07/2019	17 June 2019	103,812.000	Mutasi Eselon 4
015	08	030	613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	1540013997014	RPL	RPL141 KPPN TIMIKA UTK PS TKPKN	MANDIRI KC TIMIKA	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	031	325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	650013252371000	BPG	BPG 009 KANWIL DJPB KEPRI	BRI Cabang Tanjungpinang	5/0412/WPB.05/KP.01/2019	23 March 2019	117,476.000	Uang Perjudin Mutasi E54
015	08	031	325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	214701000159302	RPL	RPL 009 KANWIL PROV. KEPRI UTK PS TKPKN	BRI Cabang Tanjungpinang	5/600/MK.5/2017	16 January 2017	0,00	Nihil
015	08	031	527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	9890015278511000	BPG	BPG 009 KPPN TANJUNGPINANG	BNI Cabang Tanjungpinang	5/0411/WPB.05/KP.01/2019	20 Mar-19	40,180.000	Uang Pindah Pejabat Es 4
015	08	031	527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0000000050833916	RPL	RPL 009 KPPN TANJUNGPINANG UTK PS TKPKN	BNI Cabang Tanjungpinang	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	031	539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	9890015390321000	BPG	BPG 137 KPPN BATAM	BNI Cabang 0989-Pecenongan	5/14/WPB.05/KP.02/2019	20 Mar-19	97,478.000	Uang Mutasi Pegawai Eselon IV
015	08	031	539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	506191885	RPL	RPL 137 KPPN BATAM UTK PS TKPKN	BNI Cabang 0245-Batam	5/984/PB.1/2017	25-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	032	40249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	650013402491000	BPG	BPG 178 KANWIL DJPB SULBAR	BRI KC JAKARTA VETERAN	5/0359/WPB.26/KP.01/2019	21-Mar-19	101,254.000	Perjudin Mutasi Es IV
015	08	032	40249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	8100125402491000	BPG	BPG 178 KANWIL DJPB SULBAR UTK PS TKPKN	BRI Cabang Jakarta	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	032	451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMULIU	650014516041000	BPG	BPG 178 KPPN MAMULIU	BRI KC JAKARTA VETERAN	5/0332/WPB.26/KP.01/2019	20-Mar-19	38,931.000	Uang Perjudin Pejabat Eselon IV
015	08	032	451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMULIU	02180100257301	RPL	RPL 178 KPPN MAMULIU UTK PS TKPKN	BRI Cabang MAMULIU	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	032	528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	650015284131000	BPG	BPG 059 KPPN MAJENE	BRI KC JAKARTA VETERAN	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	032	528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	004701001035305	RPL	RPL 059 KPPN MAJENE UTK PS TKPKN	BRI Cabang Majene	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	033	330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	8100123301711000	BPG	BPG 065 KANWIL DJPB PAPUA BARAT	MANDIRI CABANG MANOKWARI	ND-695/PB.3/2019	12-Jun-19	0,00	Nihil
015	08	033	330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	160000123764	RPL	RPL 065 KANWIL PROV. PAPUA BARAT UTK PS TKPKN	MANDIRI CABANG MANOKWARI	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	033	528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	8100125287181000	BPG	BPG 065 KPPN MANOKWARI	MANDIRI CABANG MANOKWARI	5/431/WPB.33/KP/01/2019	18-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	033	528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	160000121492	RPL	RPL 065 KPPN MANOKWARI UTK PS TKPKN	MANDIRI CABANG MANOKWARI	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	033	528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	650025287221000	BPG	BPG 066 KPPN SORONG	BRI Cabang Sorong	5/386/WPB.33/KP.0204/2019	20-Mar-19	0,00	Nihil
015	08	033	528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	01001002081306	RPL	RPL 066 KPPN SORONG UTUK PS TKPKN	BRI Cabang Sorong	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	033	528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	8100125287391000	BPG	BPG 067 KPPN FAKFAK	MANDIRI CABANG FAKFAK	5/200/WPB.33/KP/03/2019	13-Jun-19	14,112.000	Uang Perjudi Mutasi Pejabat Eselon IV
015	08	033	528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	160000212321	RPL	RPL 067 KPPN FAKFAK UTUK PS TKPKN	MANDIRI CABANG FAKFAK	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	034	528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	650015282351000	BPG	BPG 048 KPPN TARAKAN	BRI KC JAKARTA VETERAN	5/372/WPB.21/KP.02/2019	14-Agu-19	43,820.000	Perjudin Mutasi Es IV
015	08	034	528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	018301001108306	RPL	RPL 048 KPPN TARAKAN UTU PS TKPKN	BRI KC JAKARTA VETERAN	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	034	634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	8100126349911000	BPG	BPG 152 KPPN NUNUKAN	MANDIRI CABANG NUNUKAN	5/151/WPB.21/KP.03/2019	19-Mar-19	55,160.000	Perjudin Mutasi Es IV
015	08	034	634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	1480014512002	RPL	RPL 152 KPPN NUNUKAN UTK PS TKPKN	MANDIRI CABANG NUNUKAN	5/600/MK.5/2017	16-Jan-17	0,00	Nihil
015	08	034	662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	650026627881000	BPG	BPG 185 KANWIL DJPB KALTARA	KCP Tanjung Selor	ND-299/PB.3/2019	13-Mar-19	104,564.000	Perjudin Mutasi Es IV
015	08	034	662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	148007785551	RPL	RPL 185 PS KANWIL DPB PROV. KALTARA UTU TUKIN	KCP Tanjung Selor	5/008/WPB.21/KP.185/2018	4-Nov-18	0,00	Nihil
015	08	034	662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	650016627891000	BPG	BPG 185 KPPN TANJUNG SELOR	Tanjung Selor	5/010/WPB.21/KP.185/2018	4-Jan-18	0,00	Nihil
015	08	034	662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	148008888667	RPL	RPL 185 PS KPPN TANJUNG SELOR UTU TUKIN	Tanjung Selor	5/009/WPB.21/KP.185/2018	4-Jan-18	0,00	Nihil
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	1554864859	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BNI KCP Kementerian Keuangan	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	270,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	1554835454	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BNI KCP Kementerian Keuangan	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	1554860060	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BNI KCP Kementerian Keuangan	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	1554862319	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BNI KCP Kementerian Keuangan	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	1554863469	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BNI KCP Kementerian Keuangan	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2737-2737-27	RPL	Rekening RPL 019 BPPF Sawit Unsur Dana Operasional Pengun	BNI KCP Kementerian Keuangan	5/3177/Wpb.12/KP.0230/2015	14-Jul-15	350,000,894.038	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2.11014E+13	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BTN KC Kelapa Gading Square	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2.11014E+13	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BTN KC Kelapa Gading Square	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2.11014E+13	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BTN KC Kelapa Gading Square	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	700,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2.11014E+13	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BTN KC Kelapa Gading Square	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2.11014E+13	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BTN KC Kelapa Gading Square	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2.11014E+13	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BTN KC Kelapa Gading Square	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2.11014E+13	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BTN KC Kelapa Gading Square	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	700,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2.11014E+13	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BTN KC Kelapa Gading Square	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	800,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	2.11014E+13	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BTN KC Kelapa Gading Square	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	200,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	20221R0002020	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BIB KC Bandung Tamansari	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	20221R0002021	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BIB KC Bandung Tamansari	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	20221R0002022	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BIB KC Bandung Tamansari	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	20221R0002023	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD	BIB KC Bandung Tamansari	5/1858/WPB.12/KP.02/2022	24-Jan-22	500,000,000.000	-
015	08	BLU	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNGAN KELAPA SAWIT	20221R0002024	RPL	RPL 019 BLU BPDOKS untuk PKD					

KL	BA	kdkwl	ksdskotr	Nama Satker	No Rek	Jenis Rek	Nama Rekening	Nama Bank	Nomor Surat Izin	Tanggal Surat Izin Rekening	Saldo	Keterangan
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	059601001952401	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BNI Cabang Jakarta Menteng	5-1855/WPB.12/KP.02/2022	3-Jan-22	100,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1030007777648	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK OPS K	BNI Cabang Jakarta Menteng	5-1855/WPB.12/KP.02/2022	3-Jan-22	849,816,340.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1030007777671	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK OPS P	BNI Cabang Jakarta Menteng	5-1855/WPB.12/KP.02/2022	3-Jan-22	2,904,093,842.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	103007777254	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK OPS K	BNI Cabang Jakarta Menteng	5-1855/WPB.12/KP.02/2022	3-Jan-22	-	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	103007777296	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK OPS P	BNI Cabang Jakarta Menteng	5-1855/WPB.12/KP.02/2022	3-Jan-22	28,886,652,865.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	103007777395	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK DK	BTN Cabang Syariah Pasar Minggu	5-2180/WPB.12/KP.02/2020	6-Nov-20	-	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1030206062479	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BTN Cabang Syariah Pasar Minggu	5-2180/WPB.12/KP.02/2020	6-Nov-20	500,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1030206062487	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-1548/WPB.12/KP.02/2020	21-Sep-20	500,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1030206062503	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2272/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	500,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1030206062511	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BSI Cabang Jakarta Rawamangun	5-460/KPN.1202/2022	8-Mar-22	500,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1030206062529	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2272/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	500,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1030206062537	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2272/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	500,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1328417981	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK OPS P	BTN Cabang Syariah Pasar Minggu	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	3,107,942,661.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1328420121	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK OPS K	BTN Cabang Syariah Pasar Minggu	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	159,472,650.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1333098466	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BTN Cabang Syariah Pasar Minggu	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	136,660,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1333275184	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BTN Cabang Syariah Pasar Minggu	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	340,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	13337394201	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BTN Cabang Syariah Pasar Minggu	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	100,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1339839885	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	90,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1369414813	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	65,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1548674583	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK DK	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	43,532,440,233.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	7006561367	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK DK	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	58,662,394,977.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	7006566116	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK OPS P	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	798,300,627.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	5994805	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	100,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	5994881	RPL	RPL 019 BLU BPDH UNTUK PKD	BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru	5-2270/WPB.12/KP.02/2020	20-Nov-20	300,000,000,000.00	-
015	08	BLU	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	0000002018220615	RPL	RPL 019 BLU PIP UNTUK DK	BNI KCP Depkeu	5-3352/Wpb.12/KP.0204/2018	30-05-2018	100,000,000,000.00	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	0001401400416589	RPL	RPL 019 BLU PIP UNTUK PKD	BTN Jakarta Harmoni	5-1941/KPN.1202/2022	27-05-2022	500,000,000,000.00	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	0001401400416597	RPL	RPL 019 BLU PIP UNTUK PKD	BTN Jakarta Harmoni	5-1941/KPN.1202/2022	27-05-2022	500,000,000,000.00	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	0001401400416602	RPL	RPL 019 BLU PIP UNTUK PKD	BTN Jakarta Harmoni	5-1941/KPN.1202/2022	27-05-2022	500,000,000,000.00	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	0001401400416610	RPL	RPL 019 BLU PIP UNTUK PKD	BTN Jakarta Harmoni	5-1941/KPN.1202/2022	27-05-2022	79,792,500,000.00	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	0001401400416628	RPL	RPL 019 BLU PIP UNTUK PKD	BTN Jakarta Harmoni	5-1941/KPN.1202/2022	27-05-2022	79,792,500,000.00	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	032901002911306	RPL	RPL 019 Pusat Investasi Pemerintah Untuk Ops Pendapat	BRI Jakarta Veteran	5-1022/WPB.12/KP.0230/2015	18-03-2015	179,125,533,522.75	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	032901003827306	RPL	RPL 019 PIP UTK DANA KELOLAAN	BRI Jakarta Veteran	5-1940/KPN.1202/2022	27-05-2022	367,625,507,879.75	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	032901044907402	RPL	RPL 019 BLU PIP untuk PKD	Mandiri KCP Depkeu	5-1758/WPB.12/KP.02/2021	19-05-2021	514,107,919,000.00	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	032901047029407	RPL	RPL 019 BLU PIP UNTUK PKD	Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol	5-1748/WPB.12/KP.0204/2019	26-03-2019	120,207,500,000.00	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	1030205849504	RPL	RPL 019 BLU PIP UNTUK PKD	BSI Cabang Jakarta Cikini	5-907/WPB.12/KP.02/2020	21-04-2020	342,738,613,000.00	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	3220070708188	RPL	RPL 019 Pusat Investasi Pemerintah Untuk Ops Pengeluaran	BRI Jakarta Veteran	5-1759/WPB.12/KP.02/2021	19-05-2021	2,792,339,053.57	-
015	08	BLU	440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	7140408888	RPL	RPL 019 BLU PIP untuk OPS P	BRI Jakarta Veteran	5-3333/WPB.12/KP.0230/2017	19-05-2021	79,090,017,020.18	-

							JUMLAH SATKER DJPb 223					
							JUMLAH TOTAL SALDO BPG RPL dan RKK DJPb				33,743,471,221,897.90	
							JUMLAH TOTAL SALDO BPG DJPb				3,609,912,742.00	
							JUMLAH TOTAL SALDO RPL DJPb				33,738,426,935,413.90	
							JUMLAH TOTAL SALDO RKK DJPb				1,434,373,742.00	
							JUMLAH SALDO BPG				3,609,912,742.00	
							JUMLAH SALDO RPL PS TKPKN				3,788.00	
							JUMLAH SALDO RPL OPERASIONAL BLU BPDKS				24,103,123,486,668.70	
							JUMLAH SALDO RPL OPERASIONAL BLU BPDH				4,955,620,103,257.00	
							JUMLAH SALDO RPL OPERASIONAL BLU PIP				4,679,683,341,800.25	
							JUMLAH SALDO RKK				1,434,373,742.00	
							JUMLAH REKENING BPG				220	(MINUS SAWIT-PIP-BPDH)
							JUMLAH REKENING RPL PS TKPKN				217	(MINUS KSAP-SPAN-KIP-SPOKS-PIP-BPDH)
							JUMLAH REKENING RPL OPERASIONAL BLU BPDKS				51	
							JUMLAH REKENING RPL OPERASIONAL BLU BPDH				32	
							JUMLAH REKENING RPL OPERASIONAL BLU PIP				13	
							JUMLAH REKENING RKK				3	Induk Virtual
							JUMLAH TOTAL REK				536	

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan

# LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19**  
**MENURUT JENIS BELANJA / AKUN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 08

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN PERBENDAHARAAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 14/05/23 6:05 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,351,865,000	1,483,817,000	1,467,554,020	0	1,467,554,020	98.9	16,262,980
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,351,865,000	1,483,817,000	1,467,554,020	0	1,467,554,020	98.9	16,262,980
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,100,036,000	572,821,000	564,503,839	0	564,503,839	98.55	8,317,161
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,100,036,000	572,821,000	564,503,839	0	564,503,839	98.55	8,317,161
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8,292,629,000	936,242,000	841,337,404	900,000	840,437,404	89.77	95,804,596
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	8,292,629,000	936,242,000	841,337,404	900,000	840,437,404	89.86	95,804,596
5251	Belanja Barang BLU							
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	486,200,000	194,450,000	133,466,478	0	133,466,478	68.64	60,983,522
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	648,025,000	164,144,000	127,282,000	0	127,282,000	77.54	36,862,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	1,134,225,000	358,594,000	260,748,478	0	260,748,478	72.71	97,845,522
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	13,878,755,000	3,351,474,000	3,134,143,741	900,000	3,133,243,741	93.52	218,230,259
	JUMLAH BELANJA	13,878,755,000	3,351,474,000	3,134,143,741	900,000	3,133,243,741	93.52	218,230,259

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:11 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2,687,060
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	1,112,167
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	1,557,735,901,997
0.0	015.08.440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	0
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	1,975,897
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	2,763,490
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	1,688,063
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	3,722,478
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	6,533,808
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	2,426,226
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	888,019
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	1,686,280
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	398,088
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	49,000,000
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	2,082,316
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	1,421,172
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	265,875
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	1,260,542

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:11 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	26,532,118
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	613,881
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	7,276,575
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	2,866,129
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	15,851,649
<b>TOTAL</b>			<b>1,557,868,953,830</b>

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:11 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	11,585,467,290
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	0
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	0
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	0
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	0
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	0
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	0
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	0
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	0
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	0
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	0
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	0
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	0

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:11 PM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	0
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	0
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	0
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	0
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	0
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	0
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	0
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	0
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	0
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	0
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	0
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:11 PM  
 Halaman : 3  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	244,180,000
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	0
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	0
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	0
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	0
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	0
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	0
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	388,850,342
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	31,931,346
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	0
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	0
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	0

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:11 PM  
Halaman : 4  
Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	0
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	0
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	0
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	0
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	0
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	0
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	0
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	0
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	0
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	0

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:11 PM  
Halaman : 5  
Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	0
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	882,969,297
<b>TOTAL</b>			<b>13,133,398,275</b>

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : Daftar Saldo Akruar es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	(1,932,399)
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	(596,736)
0.0	015.08.015117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	(122,175)
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	(44,641,402)
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	(2,231,100)
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	(2,001,441)
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	(11,906,034,386)
0.0	015.08.439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	0
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	(6,559,561)
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	(12,375,913)
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	(1,162,303)
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	(2,568,111)
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	(1,792,925)
0.0	015.08.451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	(2,747,416)
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	(1,034,520)
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	(11,607,577)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	(10,115,973)
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	(12,556,696)
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	(11,807,833)
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	(15,629,787)
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(575,572,259)
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	(151,618,415)
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(101,759,789)
0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	(159,801,476)
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(27,182,731)
0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	(2,191,155)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(13,276,552)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	(28,658,003)
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	(12,469,665)
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	(12,153,884)
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	(17,594,380)
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	(13,154,804)
0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	(7,813,248)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 3  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	(10,001,763)
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	(6,107,705)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	(40,535,306)
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	(14,539,385)
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	(13,311,393)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(14,367,584)
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	(12,980,294)
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	(17,150,787)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(11,709,493)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(6,716,982)
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	(16,190,906)
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	(12,809,338)
0.0	015.08.527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	(1,029,905)
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	(4,297,864)
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	(1,468,548)
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	(12,847,049)
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	(17,699,258)
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	(19,088,402)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 4  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	(10,598,910)
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	(15,668,834)
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	(11,261,826)
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	(14,845,568)
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	(13,680,680)
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	(8,265,970)
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	(13,864,573)
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	(3,151,025)
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	(626,258)
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	(10,060,395)
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	(13,575,157)
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	(10,917,265)
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWA	(13,594,712)
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	(12,894,767)
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	(7,775,661)
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	(1,683,453)
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	(14,097,601)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 5  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	(10,382,012)
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	(11,022,580)
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	(14,658,857)
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	(21,182,190)
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	(15,316,360)
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	(7,852,622)
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	(10,419,233)
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	(7,324,773)
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(26,959,627)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(19,536,931)
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	(12,717,978)
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	(8,578,687)
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	(12,868,991)
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	(7,332,676)
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	(16,072,299)
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	(12,937,741)
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	(12,350,931)
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	(12,515,279)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 6  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	(20,508,173)
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	(8,411,953)
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	(10,909,281)
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	(2,611,575)
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	(3,833,863)
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	(14,982,717)
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	(12,517,298)
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	(12,884,373)
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	(11,819,947)
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	(25,614,839)
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	(17,447,281)
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	(13,151,658)
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	(11,884,637)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(17,693,946)
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	(15,497,567)
0.0	015.08.528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	(11,314,443)
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	(10,291,351)
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	(11,144,115)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 7  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	(9,496,745)
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	(15,767,744)
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	(10,847,267)
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	(14,509,904)
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(23,269,383)
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	(19,562,250)
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(9,990,115)
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	(11,566,457)
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	(15,604,159)
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	(12,479,034)
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	(1,514,070)
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(2,373,735)
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	(13,506,892)
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	(22,009,438)
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	(9,312,564)
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	(20,112,597)
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	(13,408,631)
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	(13,671,412)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 8  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	(9,360,387)
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(2,245,806)
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(10,990,725)
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	(13,306,301)
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	(15,183,776)
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	(8,471,499)
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	(16,663,661)
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	(16,844,011)
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	(18,879,348)
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	(12,763,673)
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	(20,759,751)
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	(2,557,874)
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	(20,475,446)
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	(15,788,088)
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	(11,111,698)
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	(2,427,221)
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	(656,723)
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	(869,940)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 9  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	(17,385,997)
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	(14,227,607)
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	(6,609,720)
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(4,452,765)
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	(1,747,617)
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	(11,600,836)
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	(1,581,621)
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	(1,705,052)
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	(2,903,871)
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	(338,550)
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	(213,564)
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	(1,676,100)
0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	(796,537)
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	(2,075,085)
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	(20,808,928)
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	(12,082,203)
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	(14,013,419)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 10  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	(10,826,865)
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	(161,394)
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	(17,872,918)
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	(12,633,286)
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(34,297,867)
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(25,885,770)
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(18,032,423)
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	(15,264,414)
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(19,606,314)
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	(24,503,800)
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(18,118,459)
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(22,451,364)
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	(22,264,362)
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(1,452,599)
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	(10,852,091)
0.0	015.08.615081	KOMITE INVESTASI PEMERINTAH	0
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	(14,320,669)
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	(20,511,286)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 11  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	(32,703,605)
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	(7,233,578)
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	(8,890,661)
0.0	015.08.634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	(14,511,329)
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	(5,729,365)
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	(6,143,263)
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	(16,539,326)
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	(6,568,909)
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	(12,146,809)
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	(9,900,724)
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	(9,369,464)
0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	(10,626,024)
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	(9,534,217)
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	(11,631,389)
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	(9,531,108)
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	(9,790,074)
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	(11,932,264)
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	(11,904,101)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 12  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	(19,694,535)
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	(25,625,623)
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	(11,259,064)
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	(13,106,401)
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	(9,762,533)
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	(9,985,218)
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	(11,952,753)
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	(12,399,879)
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	(8,249,113)
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	(11,588,993)
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	(7,903,734)
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	(7,952,275)
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	(15,022,819)
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	(11,054,047)
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	(9,382,344)
0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	(10,090,829)
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	(14,181,101)
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	(7,406,050)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
Halaman : 13  
Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	(11,867,699)
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	(10,458,828)
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	(21,638,528)
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	(26,982,842)
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	(3,318,988)
<b>TOTAL</b>			(15,389,932,100)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0
0.0	015.08.015117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	0
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	0
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	(1,628,000)
0.0	015.08.451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	(20,667,000)
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	(2,682,000)
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	(5,605,000)
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	0
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	0
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	(5,233,000)
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(33,061,000)
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	0
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	0
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	(8,169,000)
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	0

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	0
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	(111,000)
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	(13,560,000)
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	(17,156,000)
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	0
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	0
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	0
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	0
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	(5,248,000)
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	0
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	0
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	0
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	(7,780,000)
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	(21,406,000)
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	0

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 3  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	(4,549,000)
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	(2,259,000)
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(26,399,000)
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(9,358,000)
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	(16,583,000)
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	0
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	0
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	(4,355,000)
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	0
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(33,305,000)
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	0
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	(8,895,000)
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	0
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	0
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	(7,848,000)
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	0
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	(2,894,000)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:12 PM  
 Halaman : 4  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	0
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(16,844,000)
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(17,682,000)
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(1,443,000)
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	0
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	(888,000)
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	(10,487,000)
<b>TOTAL</b>			<b>(306,095,000)</b>

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:13 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 212192 Dana Pihak Ketiga

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	0
<b>TOTAL</b>			0

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:13 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(809,045,403)
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	(13,000,360)
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(65,714,200)
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(24,054,000)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(3,907,250)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	(319,330,000)
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	(3,542,250)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	(40,011,668)
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	(697,500)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(27,230,500)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(11,878,500)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(38,829,750)
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	(28,424,000)
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	0
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	(1,103,085)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(4,947,917)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(10,411,250)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2022**



Tanggal : 14/05/23 6:13 PM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : Daftar Saldo Akrua es1 SAKTI  
 Tgl Data : 14/05/23 5:29 PM

AKUN : 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	(20,583,333)
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(2,506,323)
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	(900,000)
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	0
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(51,705,200)
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(5,191,000)
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(9,000,000)
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	(11,007,784)
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	(1,953,000)
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	(857,000)
<b>TOTAL</b>			(1,505,831,273)



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

### BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA | LANTAI 8-10 JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3449230 PES 6248; FAKSIMILE (021) 3852146; LAMAN [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

#### BERITA ACARA NOMOR BA-5/SJ.11/2023

Pada hari Senin, tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga telah diselenggarakan konfirmasi data penerimaan pinjaman dan/atau hibah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Konfirmasi dituangkan ke dalam Berita Acara Konfirmasi dengan dilampiri Laporan Hasil Konfirmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Konfirmasi ini;
2. Sebagai bahan konfirmasi, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1510/SJ.1/2022 hal Permintaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LPK PHLN) dan Konfirmasi Penerimaan Hibah Langsung Triwulan IV Tahun 2022;
3. Berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan bersama, hasilnya telah sesuai antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan, DJPb yaitu sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2022 DJPb **tidak menerima pinjaman dan hanya menerima hibah** sebagaimana laporan terlampir;
4. Dalam rangka melaksanakan amanat PMK 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas PMK 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah serta PMK 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah, Bagian Keuangan, DJPb akan selalu melakukan Konfirmasi Data Penerimaan Pinjaman dan/atau Hibah dengan Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pada tahun 2022 terdapat hibah yang diterima oleh DJPb, maka Bagian Keuangan akan segera melaporkannya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan format yang telah ditentukan dan melakukan penatausahaan penerimaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Bandung

Perwakilan Bagian Akuntansi dan  
Pelaporan Keuangan,  
Biro Perencanaan dan Keuangan,

Perwakilan Bagian Keuangan,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik  
Benny Fernando Panjaitan



Ditandatangani secara elektronik  
Oktana Yudha Sakti



Perwakilan Bagian Perencanaan,  
Biro Perencanaan dan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik  
Rachmad Arijanto



LAPORAN HASIL KONFIRMASI  
 PENERIMAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH  
 JANUARI S.D. DESEMBER 2022

NO	REGISTER	NAMA PINJAMAN / HIBAH	SUMBER DANA	JENIS	PAGU DIPA 2022	REALISASI s.d. Q4				STATUS/KETERANGAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
						BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL	%		
<b>HIBAH TERENCANA</b>											
1	2FPJR4SA	PROJECT SERVICE AND SUPPORT UNI-FINANCIAL MANAGEMENT MULTI DONOR TRUST FUND PHASE III	MULTI TRUST DONOR MELALUI WORLD BANK	HIBAH TERENCANA	Rp 9,374,117,000	Rp 4,649,180,500	Rp -	Rp 4,649,180,500	49.60%	-	DJPB
<b>HIBAH LANGSUNG</b>											
1	2DER3AKA	HIBAH BARANG PERALATAN OLAH RAGA	PERSEORANGAN (SUROSO)	HIBAH LANGSUNG BARANG DALAM NEGERI				Rp 16,235,100		ADA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	DJPB
<b>TOTAL HIBAH</b>								<b>Rp 4,665,415,600</b>			

Perwakilan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
 Biro Perencanaan dan Keuangan,

Perwakilan Bagian Perencanaan  
 Biro Perencanaan dan Keuangan,

Perwakilan Bagian Keuangan  
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik  
 Benny Fernando Panjaitan



Ditandatangani secara elektronik  
 Rachmad Arijanto



Ditandatangani secara elektronik  
 Oktana Yudha Sakti



**DAFTAR MUTASI PIUTANG NEGARA (TUNTUTAN GANTI RUGI)  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PER 31 DESEMBER 2022**

(dalam rupiah)

No	Unit Pengelola Nama	Debitur Nama	Kasus Kerugian Negara	Perjanjian/Keputusan		Tanggal Jatuh Tempo	Mata Uang	Jumlah Total TGR	Saldo KN Per 31 Des 2021	Penambahan/Koreksi Penambahan	Pembayaran/Koreksi Pengurangan	Saldo KN Per 31 Des 2022	Upaya Penagihan	Update Perkembangan Terakhir	Kualitas Piutang	
				Nomor	Tanggal											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KP DJPBN	Nyoman Udayana S	penerbitan bilyet giro atas beban APBN tidak sesuai ketentuan	S-67/MK.1/2009	12-Feb-09	-	Rp	1,500,000,000	1,342,201,289	0	63,000,000	1,279,201,289	Diserahkan ke DJKN	blm ada perkembangan	MACET	
2	KP DJPBN	R. Wiyatno & Yusuf Pada	tuntutan pihak ke3 atas pembatalan kontrak			-	Rp	102,178,692	102,178,692	0	0	102,178,692	dimintakan rekomendasi kpd BPK	blm ada perkembangan	MACET	
3	KP DJPBN	Rd. Soejatna	pembayaran gaji tidak berdasarkan bukti SPMUJ			-	Rp	201,000,000	181,401,553	0	0	181,401,553	dimintakan rekomendasi kpd BPK	blm ada perkembangan	MACET	
4	KP DJPBN	Etyofia /Anil wars Yuliardi, SE)	kehilangan kendaraan dinas roda 4	S-66/MK.1/2009	12-Feb-09	-	Rp	40,000,000	32,000,000	0	0	32,000,000	Diserahkan ke DJKN	blm ada perkembangan	MACET	
5	KP DJPBN	Philippus Butopoli KKN Wangapu	kekurangan perbendaharaan	S-456/SJ/2003	25-Jun-03	-	Rp	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000	Diserahkan ke DJKN	blm ada perkembangan	MACET	
6	KP DJPBN	Wakidjo Dikun KKN Ambon	kekurangan perbendaharaan	S-456/SJ/2003	25-Jun-03	-	Rp	28,176,150	14,632,775	0	0	14,632,775	Diserahkan ke DJKN	blm ada perkembangan	MACET	
7	KP DJPBN	Dina Lasti	tidak memenuhi wajib kerja pd kemenkeu				Rp	55,680,000	34,999,200	0	0	34,999,200		belum ada perkembangan	LANCAR	
8	KP DJPBN	S. Urang	TGR	SKPGR 741/KMK.01/1983			Rp	22,254,576		22,254,576		22,254,576		blm ada perkembangan	LANCAR	
9	KP DJPBN	Soemadi	TGR	SKPGR 743/KMK.01/1983			Rp	30,855,485		30,103,985		30,103,985		blm ada perkembangan	LANCAR	
10	KP DJPBN	B. Katabembang	TGR	SKPGR 742/KMK.01/1983			Rp	1,399,895		1,399,895		1,399,895		blm ada perkembangan	LANCAR	
11	KP DJPBN	Abdul Djilil Hamid	TGR	SKPGR 739/KMK.01/1983			Rp	27,724,417		27,724,417		27,724,417		blm ada perkembangan	LANCAR	
12	KP DJPBN	Markus Merapi	TGR	SKPGR 745/KMK.01/1983			Rp	53,636,442		53,636,442		53,636,442		blm ada perkembangan	LANCAR	
13	KP DJPBN	R. Mohammad Soetawinata	TGR	SKPGR 744/KMK.01/1983			Rp	8,013,282		8,013,282		8,013,282		blm ada perkembangan	LANCAR	
14	KP DJPBN	MR. Mangontan	TGR	SKPGR 746/KMK.01/1983			Rp	3,493,695		3,493,695		3,493,695		blm ada perkembangan	LANCAR	
15	KP DJPBN	Djamil Pasambon	TGR	SKPGR 748/KMK.01/1983			Rp	29,886,314		29,886,314		29,886,314		blm ada perkembangan	LANCAR	
16	KP DJPBN	Arie Atmadihardjo	TGR	SKPGR 747/KMK.01/1983			Rp	54,017,748		54,017,748		54,017,748		blm ada perkembangan	LANCAR	
17	Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta	Hasmiati S.Sos	penerbitan SPM palsu	S-514/MK.1/2011 tgl 27 Juli 2011	27-Jul-11	Feb-11	Rp	679,007,672	345,800,360	0	345,800,360	0		LUNAS		
18	Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta	Sasmito Yudha Husada	tidak memenuhi wajib kerja pd kemenkeu				Rp			17,400,000	17,400,000	0		LUNAS		
19	KPPN Cirebon	Ujang Sugino Yusuf	kehilangan kendaraan dinas roda 4	SPN-001/WPB.13/KP.09/2012	17-Sep-12	2026	Rp	177,000,000	53,000,000	0	12,000,000	41,000,000	potong uang pensiun PT Taspen	dalam proses pelunasan	LANCAR	
19	KPPN Wamena	Agus Hermanto	kehilangan kendaraan dinas roda 2				Rp		0	25,714,286	25,714,286	0		lunas, belum dilaporkan	LANCAR	
20	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara	Ronald Lambok Gultom	tidak memenuhi wajib kerja pd kemenkeu				Rp	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0		LUNAS		
<b>JUMLAH</b>								<b>3,021,324,368</b>	<b>2,109,713,869</b>	<b>277,144,640</b>	<b>467,414,646</b>	<b>1,919,443,863</b>				

Penyajian pada Neraca Eselon I		31-Dec-21	31-Dec-22
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	2,062,714,669	1,641,914,309
115421	Baingan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	46,999,200	277,529,554
<b>TOTAL Piutang TGR</b>		<b>2,109,713,869</b>	<b>1,919,443,863</b>

	KP DJPBN	Kanwil DKI Jkt	KPPN Cirebon				total
D	1,612,914,309	0	29,000,000	0		0	1,641,914,309
D	265,529,554	0	12,000,000	0		0	277,529,554
	1,878,443,863	0	41,000,000	0		0	1,919,443,863



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 8-10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) Pes. 6248, 3812337; FAKSIMILIE (021) 3852146; LAMAN [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**Berita Acara Rekonsiliasi**

Pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan antara dua pihak:

1. Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Dengan

2. Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode penatausahaan tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dengan melakukan proses pencocokan data terhadap 31 kasus kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. 21 kasus kerugian negara dengan saldo sebesar Rp1.919.443.863,00 dicatat sebagai piutang dalam Laporan Keuangan;
- b. 10 kasus kerugian negara belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan telah dilunasi pada tahun 2016 s.d. 2022 sehingga belum dicatat dalam Laporan Perkembangan Kerugian Negara. Terhadap 10 kasus dimaksud agar segera dikoordinasikan dengan satker terkait untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan PMK Nomor 218/PMK.1/2017.

Dari hasil rekonsiliasi data kerugian negara diketahui **tidak terdapat perbedaan saldo piutang** antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kedua belah pihak sepakat bahwa saldo kerugian negara yang dicatat dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Semester II TA 2022 adalah sebesar Rp1.919.443.863,00. Sedangkan 10 kasus kerugian negara pada huruf b di atas, diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 21 Februari 2023

Perwakilan  
Bagian Perbendaharaan  
Biro Perencanaan dan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Frank Sinatra  
NIP 196907011996031002

Perwakilan  
Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat  
Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik

Oktana Yudha Sakti  
NIP 197310021994031002

Perwakilan  
Bagian Akuntansi dan Pelaporan  
Biro Perencanaan dan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Benny F. Panjaitan  
NIP 198109092009011012



Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan

# DAFTAR SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



**DAFTAR SATUAN KERJA**  
**LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
1	409999	-	KP	BDPD SAWIT
2	439039	-	KP	BPDH
3	439165	-	KP	KSAP
4	439171	-	KP	SPAN
5	440781	-	KP	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
6	615081	-	KP	KOMITE INVESTASI PEMERINTAH
7	527010	-	KP	KP DJPb
8	527556	001	KD	KANWIL DJPb PROVINSI ACEH
9	527560	001	KD	KPPN BANDA ACEH
10	527577	001	KD	KPPN MEULABOH
11	527581	001	KD	KPPN LANGSA
12	527598	001	KD	KPPN TAPAK TUAN
13	527603	001	KD	KPPN LHOEK SEUMAWE
14	527610	001	KD	KPPN KUTACANE
15	527624	001	KD	KPPN TAKENGON
16	451562	002	KD	KPPN MEDAN II
17	527645	002	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SUMATERA UTARA
18	527652	002	KD	KPPN MEDAN I
19	527666	002	KD	KPPN PEMATANG SIANTAR
20	527670	002	KD	KPPN PADANG SIDEMPUAN
21	527687	002	KD	KPPN GUNUNG SITOLI
22	527691	002	KD	KPPN TANJUNG BALAI ASAHAN
23	527709	002	KD	KPPN RANTAU PRAPAT
24	527713	002	KD	KPPN SIBOLGA
25	527734	002	KD	KPPN SIDIKALANG
26	527741	002	KD	KPPN TEBING TINGGI
27	527755	002	KD	KPPN BALIGE
28	527776	003	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SUMATERA BARAT
29	527780	003	KD	KPPN PADANG
30	527797	003	KD	KPPN BUKITTINGGI
31	527802	003	KD	KPPN SIJUNJUNG
32	527819	003	KD	KPPN SOLOK
33	527823	003	KD	KPPN LUBUK SIKAPING
34	634409	003	KD	KPPN PAINAN
35	527844	004	KD	KPPN PEKANBARU
36	527865	004	KD	KPPN RENGAT
37	527872	004	KD	KPPN DUMAI
38	613739	004	KD	KANWIL DJPb PROVINSI RIAU
39	527890	005	KD	KPPN JAMBI
40	527908	005	KD	KPPN SUNGAI PENUH
41	527912	005	KD	KPPN MUARA BUNGO
42	613743	005	KD	KANWIL DJPb PROVINSI JAMBI
43	634497	005	KD	KPPN KUALA TUNGKAL
44	648762	005	KD	KPPN BANGKO
45	527933	006	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SUMATERA SELATAN
46	527940	006	KD	KPPN PALEMBANG
47	527961	006	KD	KPPN LUBUK LINGGAU
48	527975	006	KD	KPPN BATURAJA
49	634530	006	KD	KPPN LAHAT
50	648779	006	KD	KPPN SEKAYU
51	528001	007	KD	KANWIL DJPb PROVINSI LAMPUNG
52	528015	007	KD	KPPN BANDAR LAMPUNG
53	528022	007	KD	KPPN KOTABUMI
54	528036	007	KD	KPPN METRO LAMPUNG
55	634572	007	KD	KPPN LIWA
56	445371	008	KD	KPPN MUKO MUKO
57	528785	008	KD	KPPN BENGKULU
58	528792	008	KD	KPPN MANNA
59	613750	008	KD	KANWIL DJPb PROVINSI BENGKULU
60	634608	008	KD	KPPN CURUP
61	527954	009	KD	KPPN PANGKAL PINANG
62	527982	009	KD	KPPN TANJUNG PANDAN
63	634256	009	KD	KANWIL DJPb PROVINSI BANGKA BELITUNG
64	527162	010	KD	KPPN SERANG
65	634260	010	KD	KANWIL DJPb PROVINSI BANTEN
66	634633	010	KD	KPPN TANGERANG
67	648783	010	KD	KPPN RANGKASBITUNG
68	015114	011	KD	KPPN JAKARTA VI
69	015115	011	KD	KPPN JAKARTA VII
70	015116	011	KD	KPPN KHUSUS PENERIMAAN

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
71	015117	011	KD	KPPN KHUSUS INVESTASI
72	527027	011	KD	KANWIL DJPb PROVINSI DKI JAKARTA
73	527031	011	KD	KPPN JAKARTA I
74	527048	011	KD	KPPN JAKARTA II
75	527052	011	KD	KPPN JAKARTA III
76	531293	011	KD	KPPN JAKARTA IV
77	579330	011	KD	KPPN JAKARTA V
78	613811	011	KD	KPPN JAKARTA KHUSUS PINJAMAN dan HIBAH
79	451531	012	KD	KPPN BANDUNG II
80	527094	012	KD	KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
81	527102	012	KD	KPPN BANDUNG I
82	527120	012	KD	KPPN CIREBON
83	527137	012	KD	KPPN BOGOR
84	527141	012	KD	KPPN TASIKMALAYA
85	527158	012	KD	KPPN PURWAKARTA
86	527183	012	KD	KPPN KARAWANG
87	527205	012	KD	KPPN GARUT
88	527230	012	KD	KPPN SUKABUMI
89	634661	012	KD	KPPN KUNINGAN
90	648790	012	KD	KPPN SUMEDANG
91	652449	012	KD	KPPN BEKASI
92	451547	013	KD	KPPN SEMARANG II
93	527268	013	KD	KANWIL DJPb PROVINSI JAWA TENGAH
94	527272	013	KD	KPPN SEMARANG I
95	527289	013	KD	KPPN SURAKARTA
96	527293	013	KD	KPPN PURWOREJO
97	527301	013	KD	KPPN PURWOKERTO
98	527315	013	KD	KPPN PEKALONGAN
99	527322	013	KD	KPPN PATI
100	527336	013	KD	KPPN KUDUS
101	527340	013	KD	KPPN MAGELANG
102	527357	013	KD	KPPN TEGAL
103	527361	013	KD	KPPN CILACAP
104	634722	013	KD	KPPN KLATEN
105	648805	013	KD	KPPN SRAGEN
106	648812	013	KD	KPPN PURWODADI
107	648826	013	KD	KPPN BANJARNEGARA
108	497587	014	KD	KPPN WATES
109	527399	014	KD	KPPN YOGYAKARTA
110	634277	014	KD	KANWIL DJPb PROVINSI DI YOGYAKARTA
111	634792	014	KD	KPPN WONOSARI
112	451553	015	KD	KPPN SURABAYA II
113	527411	015	KD	KANWIL DJPb PROVINSI JAWA TIMUR
114	527425	015	KD	KPPN SURABAYA I
115	527432	015	KD	KPPN MALANG
116	527446	015	KD	KPPN KEDIRI
117	527450	015	KD	KPPN MADIUN
118	527467	015	KD	KPPN BONDOWOSO
119	527471	015	KD	KPPN PAMEKASAN
120	527488	015	KD	KPPN BOJONEGORO
121	527492	015	KD	KPPN BANYUWANGI
122	527500	015	KD	KPPN MOJOKERTO
123	527514	015	KD	KPPN PACITAN
124	527521	015	KD	KPPN JEMBER
125	634860	015	KD	KPPN BLITAR
126	648830	015	KD	KPPN SIDOARJO
127	648889	015	KD	KPPN TUBAN
128	528057	016	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT
129	528061	016	KD	KPPN PONTIANAK
130	528078	016	KD	KPPN SINTANG
131	528082	016	KD	KPPN KETAPANG
132	528099	016	KD	KPPN SINGKAWANG
133	528104	016	KD	KPPN PUTUSSIBAU
134	648893	016	KD	KPPN SANGGAU
135	528125	017	KD	KPPN PALANGKARAYA
136	528146	017	KD	KPPN BUNTOK
137	528150	017	KD	KPPN PANGKALAN BUN
138	613764	017	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
139	648868	017	KD	KPPN SAMPIT
140	528171	018	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
141	528188	018	KD	KPPN BANJARMASIN
142	528192	018	KD	KPPN KOTABARU
143	528200	018	KD	KPPN BARABAI
144	634963	018	KD	KPPN TANJUNG

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
145	648872	018	KD	KPPN PELEIHARI
146	528221	019	KD	KPPN SAMARINDA
147	528242	019	KD	KPPN BALIKPAPAN
148	613771	019	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
149	634934	019	KD	KPPN TANJUNG REDEP
150	528544	020	KD	KANWIL DJPb PROVINSI BALI
151	528551	020	KD	KPPN DENPASAR
152	528565	020	KD	KPPN SINGARAJA
153	635045	020	KD	KPPN AMLAPURA
154	528586	021	KD	KPPN MATARAM
155	528590	021	KD	KPPN BIMA
156	528608	021	KD	KPPN SUMBAWA BESAR
157	613785	021	KD	KANWIL DJPb PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
158	648847	021	KD	KPPN SELONG
159	528629	022	KD	KANWIL DJPb PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
160	528633	022	KD	KPPN KUPANG
161	528640	022	KD	KPPN ENDE
162	528654	022	KD	KPPN WAINGAPU
163	528661	022	KD	KPPN RUTENG
164	652453	022	KD	KPPN ATAMBUA
165	662770	022	KD	KPPN LARANTUKA
166	451578	023	KD	KPPN MAKASSAR II
167	497593	023	KD	KPPN SINJAI
168	528366	023	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI SELATAN
169	528370	023	KD	KPPN MAKASAR I
170	528387	023	KD	KPPN PARE PARE
171	528391	023	KD	KPPN BANTAENG
172	528409	023	KD	KPPN PALOPO
173	528420	023	KD	KPPN WATAMPONE
174	635120	023	KD	KPPN BENTENG
175	648851	023	KD	KPPN MAKALE
176	528310	024	KD	KPPN PALU
177	528324	024	KD	KPPN LUWUK
178	528331	024	KD	KPPN POSO
179	528345	024	KD	KPPN TOLI TOLI
180	613807	024	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI TENGAH
181	528441	025	KD	KPPN KENDARI
182	528455	025	KD	KPPN BAU BAU
183	613792	025	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI TENGGARA
184	635155	025	KD	KPPN RAHA
185	635162	025	KD	KPPN KOLAKA
186	497622	026	KD	KPPN MARISA
187	528281	026	KD	KPPN GORONTALO
188	648741	026	KD	KANWIL DJPb PROVINSI GORONTALO
189	497607	027	KD	KPPN BITUNG
190	528260	027	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI UTARA
191	528277	027	KD	KPPN MANADO
192	528298	027	KD	KPPN TAHUNA
193	635197	027	KD	KPPN KOTAMUBAGU
194	452878	028	KD	KPPN TOBELO
195	528497	028	KD	KPPN TERNATE
196	662787	028	KD	KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU UTARA
197	528476	029	KD	KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU
198	528480	029	KD	KPPN AMBON
199	528502	029	KD	KPPN TUAL
200	528519	029	KD	KPPN SAUMLAKI
201	652460	029	KD	KPPN MASOHI
202	528682	030	KD	KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA
203	528696	030	KD	KPPN JAYAPURA
204	528701	030	KD	KPPN BIAK
205	528743	030	KD	KPPN MERAUKE
206	528750	030	KD	KPPN NABIRE
207	528764	030	KD	KPPN WAMENA
208	539049	030	KD	KPPN SERUI
209	613832	030	KD	KPPN TIMIKA
210	325237	031	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KEPULAUAN RIAU
211	527851	031	KD	KPPN TANJUNG PINANG
212	539032	031	KD	KPPN BATAM
213	340249	032	KD	KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI BARAT
214	451604	032	KD	KPPN MAMUJU
215	528413	032	KD	KPPN MAJENE
216	330171	033	KD	KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA BARAT
217	528718	033	KD	KPPN MANOKWARI
218	528722	033	KD	KPPN SORONG

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
219	528739	033	KD	KPPN FAK FAK
220	528235	034	KD	KPPN TARAKAN
221	634991	034	KD	KPPN NUNUKAN
222	662788	034	KD	KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN UTARA
223	662789	034	KD	KPPN TANJUNG SELOR

Laporan Keuangan  
Audited Tahun Anggaran 2022  
UAPPA E-1 Ditjen Perbendaharaan

# TELAAH LAPORAN KEUANGAN



**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT ESELON-1**  
**PERIODE AUDITED TA. 2022**

Kode BA dan Nama BA : ( 015) Kementerian Keuangan  
 Kode Es1 dan Nama Es1: ( 08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>		
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Pernyataan Tanggung Jawab	v	Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	v	Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	v	Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Neraca Percobaan Akrual	v	Ada
2. Neraca Percobaan Kas	v	Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	v	Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&amp;LK</b>		
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan Aplikasi Sakti/Monsakti termasuk perbandingan dengan tahun 2021?	v	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&amp;LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>		
<b>Neraca Balance</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "	v	Tidak
<b>Saldo antar Laporan</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v	Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v	Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
<b>NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>		
<b>PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ?	v	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"	v	Tidak
<b>TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN</b>		
<b>AKUN ASET (1xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti	v	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)	v	Tidak
<b>Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)	v	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	v	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
<b>Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? ( <i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i> )		√	Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengeshan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? ( <i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021</i> )		√	Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 <b>tidak sama</b> saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?		√	Ya
<b>AKUN EKUITAS (3xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	√		Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	√		Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengeshan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	√		Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>			
<b>Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)</b>			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk			0
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			19,774,210,364
<b>AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)</b>			
<b>Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan <i>kecuali BA.015.04</i> ?		√	Tidak
<b>Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)</b>			
1. Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
<b>Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>			
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak

2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>		√	Tidak
<b>Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
<b>Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>		√	Ya/Tidak
<b>AKUN BELANJA (5xxxxx)</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
<b>TELAH TERKAIT BLU</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal ?		√	Tidak
<b>Jika TIDAK Memiliki Satker BLU</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
<b>Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			0
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			0
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>				
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3.	Adakah beban bunga		√	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		√	Tidak
5.	Adakah beban hibah		√	Tidak
6.	Adakah beban transfer		√	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		√	Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi )		√	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang		√	Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang **dapat** bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
---	----	-------	------------

10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya
--	---	--	----

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
--	-----	-------	------------

1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
--	--	---	-------

Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.

2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
---	---	--	------

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
-------------------------	----	-------	------------

Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119

1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
---	---	--	----

**Contoh 1 :** Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

**Contoh 2 :** Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

### NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
--	----	-------	------------

1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
--	---	--	----

2. Apakah ada Penjumlahan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
---	--	---	-------

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun reaster (D/K) dan Akun Beban (D/K)

3. Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
---	--	---	-------

4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2021, Apakah demikian?	√		Ya
--	---	--	----

### TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
--	----	-------	------------

1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
--	---	--	----

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
---	-----	-------	------------

2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
---	---	--	-----------

- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
---	---	--	-----

- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
------------------------------------	---	--	-----

Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
--	-----	-------	------------

3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
---	---	--	-----------

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	√		Ada
--	---	--	-----

Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
-----------------------	-----	-------	------------

4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
--	---	--	-----------

- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
----------------------------	---	--	-----

- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
--	--	---	-----------

- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
---	--	---	-----------

Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
----------------------------------	-----	-------	------------

5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&amp;LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
<b>Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
<b>Pengecekan Jurnal Akrual</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?	√		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ( ) ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca	√		Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
<b>KESESUAIAN DENGAN L-BMN</b>			
<b>Rekon Internal LKKL dengan L-BMN</b>	<b>Ya/Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2022 ?		√	Tidak
3. Apakah terdapat Jurnal Tidak lazim		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	N/A		Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN	√		
<b>MENU DAFTAR BMN</b>			
	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Terdapat Pagu Minus?		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
<b>Pengecekan TDK</b>			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<b>SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA</b>			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
<b>Satker Konsolidasian</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2021 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	√		
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	N/A		
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2022</i>			
<b>Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	√		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
8. ....			Ya

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
<b>Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)</b>	<b>Ya/Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	√		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	N/A		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?		√	Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
9. Apakah belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	√		Ya
<b>ANALISIS LAINNYA</b>			
<b>Analisis Laporan Keuangan Lainnya</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	√		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2022 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2022	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir ( <i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i> )	√		Ya
<b>Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19</b>			
<b>Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19		√	
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√		
<b>Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√		
<b>Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	

10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		✓
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		✓
<b>Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		✓
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .....		✓
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		✓
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		✓

*Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.*

### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"*

Mengetahui

Plt. Pejabat Penyusun LKKL,

15 Mei 2023

Penelaah,

Ditandatangani secara elektronik

( Oktana Yudha Sakti )

Ditandatangani secara elektronik

( Oktana Yudha Sakti )

Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LK Kemenkeu BA015 Tahun 2009-2021							
Unit Eselon I DJPB							
No	Tahun	Judul Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Usulan Status	Catatan	
1	1.1.6	2013	PNBP Dari Denda Keterlambatan Sebesar Rp556,81 Juta, Sewa atas Pemanfaatan BMN sebesar Rp21,87 Juta Belum Dipungut, dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp131,12 Juta Belum Dicairkan	a2) memerintahkan PPK untuk segera memungut kekurangan penerimaan PNBP sebesar Rp473.471.097,00 atas denda keterlambatan dan Rp131.123.065,00 atas jaminan pelaksanaan kepada pihak terkait dan menyetorkan ke Kas Negara;	Catatan PTL Semester II 2021: Belum ada pelunasan/pencairan atas Jaminan pelaksanaan pada kasus DJPB sebesar Rp131.123.065,00. Selain itu, dengan penyerahan piutang pada DJPB atas denda keterlambatan ke PUPN senilai Rp134.577.991,00 apakah tindak lanjut dapat dianggap selesai.	Dalam Proses	
				Update Juni 2021 DJPB : DIUSULKAN SESUAI Penyampaian ulang Surat S-55/MK.1/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n. PT Multi Sarana Siaga. Berdasarkan S-1382/WPB.11/KP.02/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penagihan ketiga atas hasil pemeriksaan Tim BPK Tahun 2013 disebutkan piutang PNBP PT Multi Sarana Niaga sebesar Rp123.662.065,00 atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Renovasi Gedung KPPN Tangerang Tahun 2013 dan Rp10.915.846,00 atas biaya sewa listrik dan air dengan total piutang sebesar Rp134.577.991,00.  Status TL: diusulkan sesuai			
2	1.2.3	2019	Potensi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1.201.595.192,46 dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1.579.115.306,13 atas Realisasi Belanja Modal serta Denda Keterlambatan Belum Dipungut Sebesar Rp131.237.911,71	b. Direktur Jenderal Bea Cukai, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta PPK untuk menarik kelebihan pembayaran serta menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.579.115.306,13 dan menagih denda keterlambatan serta menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp131.237.911,71.  Nilai temuan DJPB: Rp163.610.982,69	Catatan PTL Semester I 2021: Diajukan selesai jika ada surat yang menyebutkan bahwa KPKNL telah menerima pengurusan piutang PNBP untuk PT Jaya Sakti Permai Status TL: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut  Tindak Lanjut Semester II 2021: Piutang atas PT Jaya Sakti Permai telah diserahkan kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-578/MK.01/2021 tanggal 5 Juli 2021. PUPN telah mengirimkan surat panggilan pertama tanggal 5 Agustus 2021 kepada PT Jaya Sakti Permai melalui surat nomor S-1686/WKN.07/KNL.05/2021 dan surat panggilan terakhir tanggal 12 November 2021 melalui surat nomor S-2670/WKN.07/KNL.05/2021. Selanjutnya telah terbit Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) atas nama PT. Jaya Sakti Permai melalui Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-24/PUPNC.10.05/2021 tanggal 14 Desember 2021.  Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Paksa No. 419/PUPNC.10.00/2022 tanggal 16 Desember 2022	Dalam Proses	
3	1.2.1	2019	Pembayaran Ongkos Angkut Biodiesel Tidak Sesuai Keputusan Menteri ESDM Mengakibatkan Kelebihan Bayar Rp9.551.903.910,00	Memerintahkan Direktur Utama BPDPKS untuk menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp9.551.903.910,00 dari pihak BUBBN.	BPDPKS mengajukan TPTD dengan didukung bukti riil invoice pendukung nilai OA Rp.9.551.903.910 dari pihak BUBBN dan diperkuat perubahan regulasi atas KEPMEN ESDM	Diusulkan TPTD	Mohon dapat disampaikan progres pembahasan internal di BPK
				PTL Semester II 2021  BPDPKS telah menyampaikan Revisi Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam rangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit  Mengacu pada usulan pembahasan tim sebelumnya, yaitu catatan pembahasan usulan TPTD tanggal 28 Juni - 2 Juli 2021 yang menyatakan: 1. telah disampaikan Draft Revisi Kepmen ESDM Nomor 41 Tahun 2018, peraturan masih dalam proses dan diusulkan TPTD. 2. Telah disampaikan surat dari Dirut BPDPKS ke Tortama AKN II nomor S-600/DPKS/2021 perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2019 terkait Ongkos Angkut Biodiesel yang menyatakan agar temuan tersebut sebagai TPTD. Tindak lanjut Sem I 2021 : diusulkan TPTD  Tindak lanjut Sem II 2021: Usulan status belum sesuai, diusulkan TPTD  PTL Semester I 2021 (Juni 2021) DJPB DALAM PROSES Telah disampaikan surat dari Ketua Harian APROBI ke Dirut BPDPKS nomor S-017/II-APROBI/2021 perihal Tanggapan atas surat Pengembalian Dana Pembayaran Biodiesel Tahun 2019 yang menyatakan agar PT.TBL, PT LDC Indonesia, PT BB, PT DB tidak mengembalikan OA karena sesuai dengan biaya dikeluarkan dan mengusulkan perbaikan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 supaya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Telah disampaikan surat dari Dirut BPDPKS ke Tortama AKN II nomor S-600/DPKS/2021 perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2019 terkait Ongkos Angkut Biodiesel yang menyatakan agar temuan tersebut sebagai TPTD. Telah disampaikan Draft Revisi Kepmen ESDM Nomor 41 Tahun 2018, peraturan masih dalam proses. Catatan : posisi per tanggal 6 Juli 2021 masih dalam proses pembahasan/reviu berjenjang di internal BPK sehingga belum mengubah statusnya			
				PTL Semester II 2020 (Januari 2021) DJPB DALAM PROSES BPDPKS telah menyampaikan surat permintaan pengembalian kelebihan pembayaran dana pembiayaan biodiesel kepada 4 BUBBN, yaitu kepada PT Bayas Biofuels, PT Dabi Biofuels, PT LDC Indonesia, dan PT Tunas Baru Lampung (Surat penagihan terlampir).  Tanggapan atas surat tersebut di atas dari PT Tunas Baru Lampung telah diterima oleh BPDPKS yang menyatakan keberatan atas permintaan pengembalian (terlampir). Status TL: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			

Bukti (Rencana Aksi)

4	1.1.2 2	2021	Pengelolaan Penerimaan Pungutan Ekspor pada BLU BPDPKS Belum dapat Dioptimalkan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Utama BPDPKS untuk: a. Mengusulkan ke Dirjen Perbendaharaan terkait penambahan informasi yang diperlukan BPDPKS dalam mengoptimalkan pendapatan pungutan ekspor ke dalam SKB antara DJBC dan DJPb, dan	Direktur Utama BPDPKS menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sesuai Nota Dinas Nomor ND-459/DPKS/2022 tanggal 28 Juni 2022 hal Usulan Penguatan Sinergi antara BPDPKS dengan Ditjen Bea dan Cukai melalui Joint Program Kementerian Keuangan. Melalui ND tersebut diharapkan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar dapat dimasukkan dalam salah satu program Joint Proses Bisnis yg digalakkan melalui program sinergi  Dirut BPDPKS telah menyampaikan Nota Dinas nomor ND-869/DPKS/2022 tanggal 13 Desember 2022 kepada Dit. SMI DJPb terkait Koordinasi dengan DJBC tentang revisi perubahan struktur data yang diperlukan (yang telah disepakati dengan DJBC) meliputi: 1. Dalam hal kesepakatan atas pertukaran data antara DJBC & DJPb perlu dikordinasikan lebih lanjut secara lebih teknis antara DJPb, DJBC & BPDPKS 2. Penambahan struktur data yang dibutuhkan BPDPKS meliputi - Tarif Pungutan berdasarkan jenis barang atas ekspor kelapa sawit, CPO dan dan/atau produk turunannya - Tanggal pemberitahuan Pabean Ekspor diterima SKP (Dalam hal terdapat perbedaan dalam penamaan, BPDPKS akan menyesuaikan dengan struktur data yang akan disediakan oleh DJBC) 3. DJBC telah mengakomodir beberapa hal yang dibutuhkan BPDPKS (dalam hal diterbitkan SPKPBK, disampaikan tembusan ke BPDPKS) 4. Penambahan informasi lain yang dibutuhkan oleh BPDPKS adalah tindak lanjut Laporan Hasil Rekonsiliasi	Dalam Proses	- Sesuai dengan substansi rekomendasi yaitu terkait penambahan informasi pungutan ekspor, dimungkinkan alternatif solusi selain SKB - Sebagai bukti tindak lanjut atas penambahan informasi PE yang dibutuhkan oleh BPDPKS, agar dilengkapi bukti screenshot aplikasi E Billing Levy yang telah terinterkoneksi dengan aplikasi CESA	SKB antara DJBC dan DJPb yang mengatur secara lengkap informasi yang diperlukan BPDPKS untuk mengoptimalkan pendapatan pungutan ekspor, antara lain berupa: 1. tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi antara BPDPKS dan DJBC; 2. penambahan kolom tarif atas jenis layanan BLU BPDPKS; 3. unit yang bertugas dan tata cara terkait penetapan maupun penetapan kembali atas pungutan ekspor; 4. tata cara penyampaian penetapan perhitungan bea keluar dan penetapan kembali perhitungan bea keluar sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 22 Tahun 2019 pada pasal 10 ayat (4) 5. tanggal/waktu penetapan tarif yang berlaku untuk pungutan ekspor 6. penerbitan kode billing pelunasan kurang bayar pungutan atas ekspor komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.
5		2021		b. Melakukan revisi Perdirut BPDPKS Nomor PER-13/DPKS/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan produk turunannya yang mengatur mekanisme pelaksanaan atas kurang bayar dan lebih bayar pungutan ekspor secara terperinci	Tindak lanjut revisi Perdirut BPDPKS Nomor 13 tahun 2019 Tentang Tatacara Pengenaan Pungutan Atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya: Perdirut telah terbit yaitu Perdirut Nomor 5 Tahun 2022, Tanggal 7 Desember 2022 yang mengatur mekanisme pelaksanaan atas kurang bayar dan lebih bayar pungutan ekspor secara terperinci.  - Pasal 18 tentang Penerbitan Kode Billing dalam rangka pelunasan pungutan terkait penggunaan kode billing pelunasan atas hasil penetapan kembali pungutan ekspor - Pasal 5 ayat (3) terkait pengaturan secara jelas tarif yang dikenakan berdasarkan pada tahapan kegiatan ekspor (Terlampir)	Diusulkan Selesai	Revisi Perdirut BPDPKS Nomor 13 tahun 2019 Tentang Tatacara Pengenaan Pungutan Atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya yang mengatur mekanisme pelaksanaan atas kurang bayar dan lebih bayar pungutan ekspor secara terperinci, antara lain mengatur: 1. penggunaan kode billing pelunasan atas hasil penetapan kembali pungutan ekspor 2. mengatur secara jelas tarif yang dikenakan berdasarkan pada tahapan kegiatan ekspor yang mana	
6	1.2.2	2021	Pemotongan/Pemungutan PPH Pasal 23 Sebesar Rp27.789.280,00 Belum Dilakukan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Perbendaharaan, Kepala BKF, dan Dirjen Anggaran untuk memerintahkan bendahara terkait untuk melakukan pemotongan/pemungutan PPH Pasal 23 sebesar Rp27.789.280,00 dan menyetorkan ke kas negara	Terkait temuan adanya kekurangan pemotongan/pemungutan PPH Pasal 23 senilai Rp19.048.000,00, PPK Kantor Pusat DJPb telah menyampaikan Surat Penagihan kepada 2 (dua) penyedia sbb : I. Penyedia PT.MMS (Hotel Grand Mercure Maha Cipta Jakarta Kemayoran) Surat penagihan : (Nilai Tagihan Rp9.720.000,00) 1. tanggal 21 April 2022 No. S-2/PB.143/2022 II. Penyedia PT.Saripuri Permai Hotel (Shangri-La Hotel Surabaya) Surat penagihan : (Nilai Tagihan Rp9.328.000,00) 1. tanggal 21 April 2022 No. S-1/PB.143/2022; dan 2. tanggal 24 Mei 2022 No. S-5/PB.143/2022  Kemudian penyedia melakukan penyetoran atas kekurangan pemotongan/pemungutan PPH Pasal 23 sbb: a. Penyedia PT.MMS (Hotel Grand Mercure Maha Cipta Jakarta Kemayoran) Nilai setor : Rp9.720.000,00 Tanggal buku : 27 April 2022 Kode NTPN : 8AC125B8TF07ETOI b. Penyedia PT.Saripuri Permai Hotel (Shangri-La Hotel Surabaya) Nilai setor : Rp9.328.000,00 Tanggal buku : 07 Juni 2022 Kode NTPN : D210F67MGB34UP9H Surat Penagihan dan Bukti konfirmasi penerimaan negara untuk kedua penyedia terlampir	Diusulkan Selesai	1. Surat Penagihan ke Penyedia v 2. bukti setor PPH 23 v	
7	1.2.3	2021	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Jasa Pengiriman Surat/Dokumen/Buku dan Barang Lainnya pada Kantor/Pusat DJPb Belum Dikenakan Denda senilai Rp43.677.772,00	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Perbendaharaan untuk memerintahkan PPK mengenai denda keterlambatan senilai Rp43.677.772,00 kepada PT PI dan disetorkan ke kas negara	Terkait temuan adanya pengenaan denda keterlambatan yang belum disetorkan ke nas negara senilai Rp43.677.772,00, PPK Kantor Pusat DJPb telah menyampaikan Surat Penagihan kepada penyedia sbb: 1. tanggal 22 April 2022 No. S-32/PB.14/2022; 2. tanggal 18 Mei 2022 No. S-37/PB.14/2022; 3. tanggal 23 Mei 2022 No. S-39/PB.14/2022; dan 4. tanggal 27 Juli 2022 No. S-53/PB.14/2022 Penyedia telah menanggapi surat penagihan dari PPK tersebut diatas yaitu: 1. tanggal 28 April 2022 No. 966/KL300/10000/2022; 2. tanggal 20 Mei 2022 No. 1144/KL300/10000/2022; dan 3. tanggal 30 Mei 2022 No. 1230/KL300/20000/2022  Berdasarkan surat tanggapan terakhir dari penyedia (No. urut 3 diatas) maka PPK memberikan penjelasan sekaligus penagihan melalui surat tanggal 27 Juli 2022 No. S-53/PB.14/2022 Surat penagihan dari PPK dan surat tanggapan dari penyedia terlampir.  Telah disetorkan denda keterlambatan oleh PT Pos Indonesia ke kas negara pada tanggal 30 September 2022 senilai Rp43.677.772,00 dengan nomor NTPN EBBBA2G4V7DBU9D8 (bukti setor terlampir)	diusulkan selesai	1. Surat Penagihan ke Penyedia v 2. bukti setor denda keterlambatan v	
8	1.2.5	2021	Pengelolaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada BLU BPDPKS Belum Optimal	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Utama BPDPKS untuk: a. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dalam rangka pengembalian dana atas penerima dana PPK yang melebihi batasan alokasi sesuai ketentuan ke BPDPKS;	Seluruh Penyaluran Dana PPK yang melebihi Batasan luasan sebesar telah terkonfirmasi. Penyaluran yang tidak melebihi 4 Ha dapat dibuktikan dengan dokumen terlampir. Untuk penyaluran yang melebihi 4 Ha dikembalikan ke rekening BPDPKS. Sesuai surat Dirtanhugar no.1586/SR.210/E.4/09/2022 tanggal 26 September 2022 hal hasil konfirmasi terkait temuan BPK TA 2021 tentang kelebihan penyaluran 4 ha per KK (terlampir surat Dirtanhugar no.1586/SR.210/E.4/09/2022 dan bukti pengembalian dana atas penerima dana PPK yang melebihi batasan alokasi sesuai ketentuan ke BPDPKS, serta hasil konfirmasi data penyaluran yang tidak melebihi 4 Ha )	Diusulkan Selesai	-tambahan dokumen pendukung surat konfirmasi LP -bukti rekening aktif dan valid (rekening tujuan/escrow)	hasil koordinasi BPDPKS dengan Ditjen BUN berupa konfirmasi penerima dana PPK yang melebihi batasan alokasi senilai Rp657.688.500 serta surat penagihan atas kelebihan penyaluran dana dari BPDPKS kepada lembaga pekebun

9	2021		<p>b. Menginstruksikan:</p> <p>1) Bank Mitra untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening pekebun ke rekening escrow Lembaga Pekebun;</p> <p>2) Lembaga Pekebun dan Bank Mitra untuk memisahkan dana PPKS dan non dana PPKS; dan</p>	<p>b1) Dana telah ditransfer ke escrow atau dikembalikan ke rek BPDPKS s.d. 11 November 2022:</p> <p>1. Dana telah ditransfer ke escrow atau dikembalikan ke rek BPDPKS s.d. 10 November 2.684.538.706,-;</p> <p>2. 11 Nopember: Atas dana Rp16.106.448,- yang berada di BRI</p> <p>b2) Proses rekonsiliasi pada triwulan IV tahun 2021 mengidentifikasi terdapat rekening yang sama pada 8 lembaga pekebun dan saat ini telah dipisahkan sisa dana per proposal per 31 Desember 2021 sehingga tidak lanjut untuk proposal yang direkening sama akan dipisahkan per rekening berdasarkan sisa dana per 31 Desember 2021 hasil rekonsiliasi.</p> <p>Atas 8 LP yang mengelola dana PPKS lebih dari 1 proposal di 1 rekening, sudah dilakukan rekonsiliasi 3 pihak antara BPDPKS, LP, dan bank mitra. Atas hasil rekonsiliasi telah dibukukan rekening escrow baru, diterbitkan addendum PKS terhadap pasal nomor rekening escrow LP, dan dipindahbukukan sisa dana PPKS ke rekening escrow baru.</p> <p>Dari total 35 Proposal penyaluran dana PPKS yg tercampur dananya di rekening yg sama atau dengan dana lainnya, seluruhnya telah dilakukan pemisahan dana menjadi 1 rekening Lembaga Pekebun utk 1 proposal. Terlampir berita acara rekonsiliasi dan rekoran (terlampir surat instruksi Dirut BPDPKS dan bukti terkait pemindahbukuan dari rekening pekebun ke rekening escrow Lembaga Pekebun dan pemisahan dana PPKS dan non dana PPKS)</p>	Diusulkan Selesai	<p>-tambahkan bukti rekening koran yang sudah divalidasi bank</p> <p>-covering letter (jika jumlah rekening korannya banyak)</p>	<p>b1. Surat Instruksi Direktur Utama BPDPKS dan Bukti Pemindahbukuan dari rekening pekebun ke rekening escrow Lembaga Pekebun Sebesar 2.700.645.154,00</p> <p>b2. Surat Instruksi Direktur Utama BPDPKS dan Bukti pemisahan rekening Lembaga Pekebun untuk dana PPKS dan non dana PPKS pada Bank Mitra</p>	
10	2021		<p>c. Mengembangkan aplikasi PSR Online dan Smart PSR yang terintegrasi untuk monitoring data dan evaluasi fisik serta penggunaan dana PPKS.</p>	<p>1. Telah selesai pembangunan aplikasi PSR Online dengan memasukkan halaman monitoring yang mengintegrasikan data penggunaan dana PPKS dari SMART PSR serta menampilkan input halaman move kemajuan fisik dari dinas dan Ditjen Perkebunan (manual guidance berupa video singkat terlampir).</p> <p>2. Saat ini kedua aplikasi telah terintegrasi pada saat dana PPKS telah ditransfer. Data penggunaan dana lembaga pekebun di Aplikasi SMART PSR sudah terhubung dengan Aplikasi PSR Online.</p> <p>3. Fitur monitoring progress fisik kebun dan progress penggunaan dana telah tersedia di PSR Online.</p> <p>(terlampir screenshot aplikasi SMART PSR dan PSR Online)</p>	Diusulkan Selesai	<p>-pastikan screenshot aplikasi atas seluruh informasi yang dibutuhkan</p>	<p>-Bukti Screenshot Input data pada aplikasi yang terdiri dari:</p> <p>1) seluruh transaksi mutasi dana PPKS di dalam aplikasi SMART PSR beserta dokumen pendukung (SPJ)</p> <p>2) Informasi data penggunaan, pengembalian, dan sisa dana PPKS per proposal di dalam aplikasi PSR Online</p> <p>3) Informasi data kemajuan fisik kebun dari Ditjenbud di dalam aplikasi PSR Online yang diintegrasikan ke dalam SMART PSR</p> <p>4) Informasi data hasil kunjungan lapangan surveyor di dalam SMART PSR yang diintegrasikan ke aplikasi PSR Online</p>	
11	1.3.2	2021	<p>Pengelolaan Persediaan pada DJP dan DJPb Belum Tertib serta Pengungkapan Informasi Persediaan dengan Kondisi Rusak atau Usang pada Cal.K per 31 Desember 2021 Belum Lengkap</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:</p> <p>a. Menginstruksikan kepada Dirjen Pajak dan Dirjen Perbendaharaan untuk:</p> <p>1) Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja terkait agar mengendalikan dan mengawasi pengelolaan barang persediaan secara optimal;</p>	<p>Sekretaris DJPB menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-1964/PB.1/2022 tanggal 7 Juni 2022 hal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 berupa Pengelolaan Persediaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dengan memerintahkan Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja terkait agar mengendalikan dan mengawasi pengelolaan barang persediaan secara optimal;</p>	Diusulkan selesai		<p>ND Seditjen PB kepada Kuasa Pengguna Barang pada satker terkait agar mengendalikan dan mengawasi pengelolaan barang persediaan secara optimal v</p>
12		2021	<p>2) Memerintahkan Pengelola persediaan agar memahami ketentuan pengelolaan persediaan; dan</p>	<p>2) Memerintahkan Pengelola persediaan agar memahami ketentuan pengelolaan persediaan; dan</p>	<p>Sekretaris DJPB menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-1964/PB.1/2022 tanggal 7 Juni 2022 hal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 berupa Pengelolaan Persediaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dengan memerintahkan Pengelola persediaan agar memahami ketentuan pengelolaan persediaan</p>	Diusulkan selesai		<p>ND Seditjen PB kepada Pengelola Persediaan agar memahami ketentuan pengelolaan persediaan v</p>
13		2021	<p>b. Menginstruksikan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk menerapkan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan oleh tim penyusun laporan keuangan secara optimal.</p>	<p>Sekretaris DJPB menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-2296/PB.1/2022 tanggal 5 Juli 2022 hal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 berupa Pengelolaan Persediaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dengan memerintahkan Pengelola persediaan agar memahami ketentuan pengelolaan persediaan</p>	Diusulkan selesai		<p>ND Seditjen PB kepada Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Umum Seditjen PB agar menerapkan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan oleh tim penyusun laporan keuangan secara optimal v</p>	
14	1.3.9	2021	<p>Pengelolaan Tunggakan Pokok dan Bunga serta Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran pada PT BAV Tidak Memadai</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Utama PIP untuk:</p> <p>a. Menginstruksikan Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi BLU PIP supaya mengelola tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil serta denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan surat tagihan tunggakan pokok pembiayaan dan bunga/bagi hasil kepada PT BAV bersamaan dengan penyampaian surat tagihan denda keterlambatan; dan</p>	<p>a.) Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi BLU PIP telah melakukan rekonsiliasi Nilai Outsanding antara PIP dengan PT. BAV serta menyampaikan tagihan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen pendukung dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Berita Acara Rekonsiliasi Nilai Outstanding antara Pusat Investasi Pemerintah dengan PT. BAV (BA-44/IP.1/2022)</p> <p>2) Surat pengenaan Denda Keterlambatan kepada PT. BAV s.d. 30 April 2022 (S-63/IP.1/2022)</p> <p>3) Surat pengenaan Denda Keterlambatan kepada PT. BAV s.d. s.d. bulan Mei 2022 (S-67/IP.1/2022)</p> <p>4) Surat pengenaan Denda Keterlambatan kepada PT. BAV s.d. s.d. bulan Juni 2022 (S-87/IP.1/2022)</p> <p>b.) Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah melalui Nota Dinas nomor ND-229/IP/2022 telah menginstruksikan PIt. Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi agar mengelola tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil serta denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan surat tagihan tunggakan pokok pembiayaan dan bunga/bagi hasil kepada PT BAV bersamaan dengan penyampaian surat tagihan denda keterlambatan</p>	Diusulkan selesai	<p>-tambahkan ND Dirut PIP ke Dir KUSI agar menindaklanjuti rekomendasi BPK</p>	<p>bukti hasil rekonsiliasi dan penyampaian surat tagihan tunggakan pokok pembiayaan dan bunga/bagi hasil kepada PT BAV bersamaan dengan penyampaian surat tagihan denda keterlambatan pada tahap berikutnya v</p>
15		2021	<p>b. Menyelesaikan potensi kurang saji denda kepada PT BAV per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.886.627.879,00.</p>	<p>1) FGD Pembahasan Ti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan BA 015 BLU PIP Tahun 2021 dengan Fokus pembahasan FGD adalah Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK dan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK (UND-55/IP/2022);</p> <p>2) Rapat Pembah4) Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Perihal Penyampaian Kajian Hukum Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015) - Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.</p> <p>Secara umum Biro Hukum menyepakati pemberlakuan addendum akad antara BLU PIP dan PT. BAV meskipun berlaku secara retroaktif (Nomor ND-1390/Si.3/2022)</p> <p>asan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-Ri atas Pengenaan Denda BPK-Ri dengan Pokok pembahasan aspek legal dengan Biro hukum terkait addendum akad antara PIP dan PT. BAV (ND-130/IP/2022);</p> <p>3) Nota Dinas kepada Biro Hukum perihal Permohonan Revisi atas Pengenaan Denda Keterlambatan kepada Penyalur Pembiayaan UMI Pusat Investasi Pemerintah (ND-138/IP/2022);</p> <p>4) Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Perihal Penyampaian Kajian Hukum Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015) - Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.</p> <p>Secara umum Biro Hukum menyepakati pemberlakuan addendum akad antara BLU PIP dan PT. BAV meskipun berlaku secara retroaktif (Nomor ND-1390/Si.3/2022)</p> <p>5) FGD Lanjutan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan BA 015 BLU PIP Tahun 2021 dengan Fokus FGD adalah pembahasan Kajian Hukum dari Biro Hukum untuk selanjutnya meminta revisi lanjutan kepada Itjen Kemenkeu (UND-81/IP/2022).</p> <p>6) Nota Dinas kepada Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan perihal Permohonan Revisi atas Pengenaan Denda Keterlambatan kepada Penyalur Pembiayaan UMI Pusat Investasi Pemerintah (ND-161/IP/2022)</p> <p>7) Nota Dinas dari Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-621/I.4/2022 perihal Penyampaian Hasil Penelaahan atas Temuan dan Rekomendasi BPK terkait Potensi Kurang Saji Pengenaan Denda kepada PT. Bahana Artha Ventura (BAV) pada Laporan Keuangan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun 2021.</p> <p>dengan simpulan:</p> <p>PIP memiliki 3 (tiga) opsi yang dapat dipilih yaitu:</p>	Diusulkan selesai	<p>-atas hasil revisi itjen, agar dikoordinasikan lebih lanjut di lingkup internal Kemenkeu</p>	<p>Hasil revisi dan penyelesaian atas potensi kurang saji denda kepada PT BAV per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.886.627.879,00 v</p>	

|

|